

Lembar K. Foto keempat Calon Kepala Desa Kampunganyar 2007

1. Calon nomor urut satu Imam Turmudi



2. Calon nomor urut dua Akhmad Budiyono



3. Calon nomor urut tiga Mestari



4. Calon nomor urut empat Umar Said



**KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA
KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH
BANYUWANGI 2007-2010**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelas Sarjana Sastra

Oleh

WURI WINDYATI

NIM. 110110301046

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Wuri Windyati

NIM: 110110301046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi 2007-2010” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2015

Yang menyatakan,

Wuri Windyati

NIM 110110301046

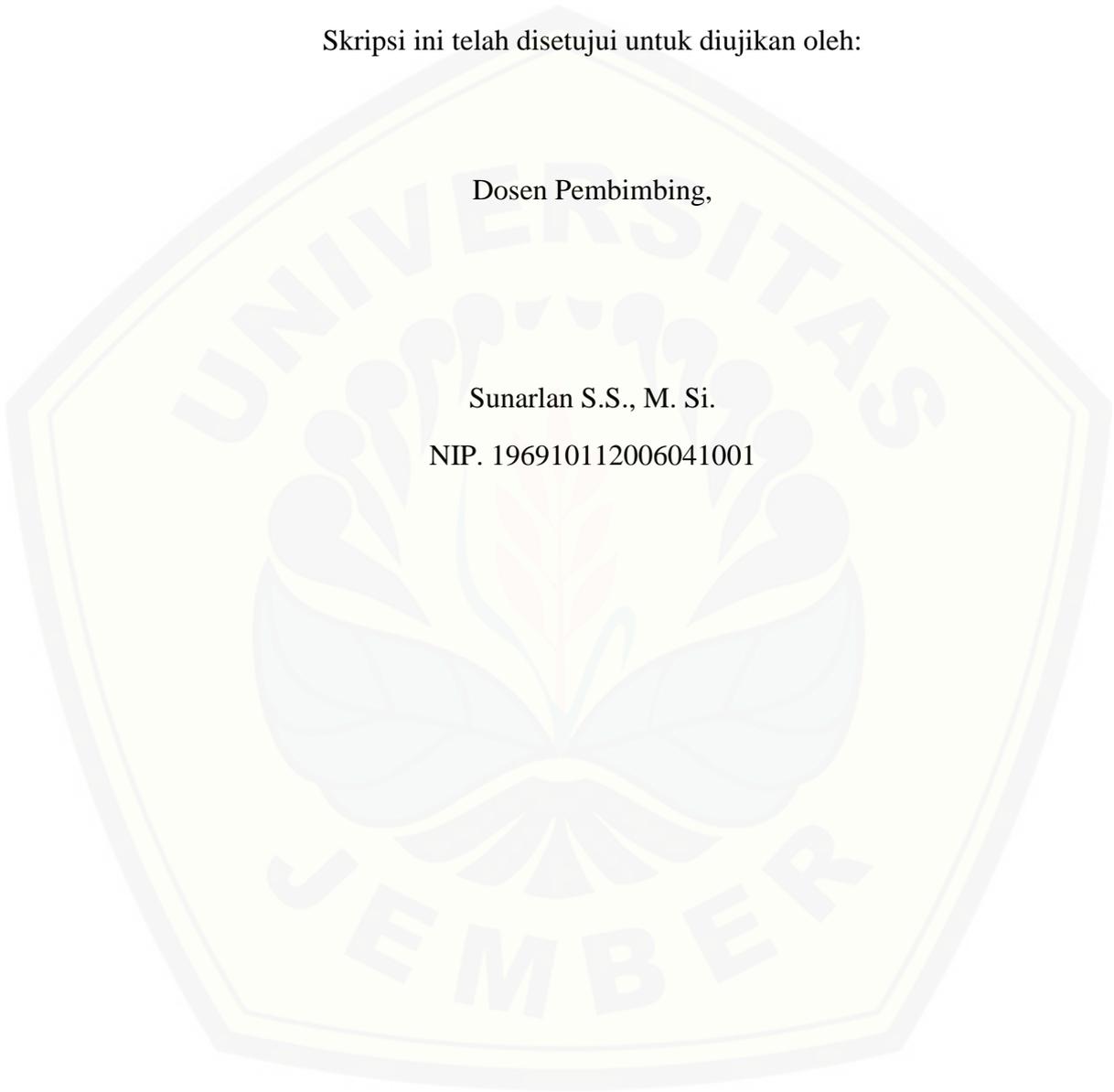
PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing,

Sunarlan S.S., M. Si.

NIP. 196910112006041001



PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Sunarlan S.S., M. Si

NIP.196910112006041001

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. Parwata, M. Hum

Drs. Nurhadi Sasmita M. Hum

NIP. 195308011985031002

NIP. 196012151989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember

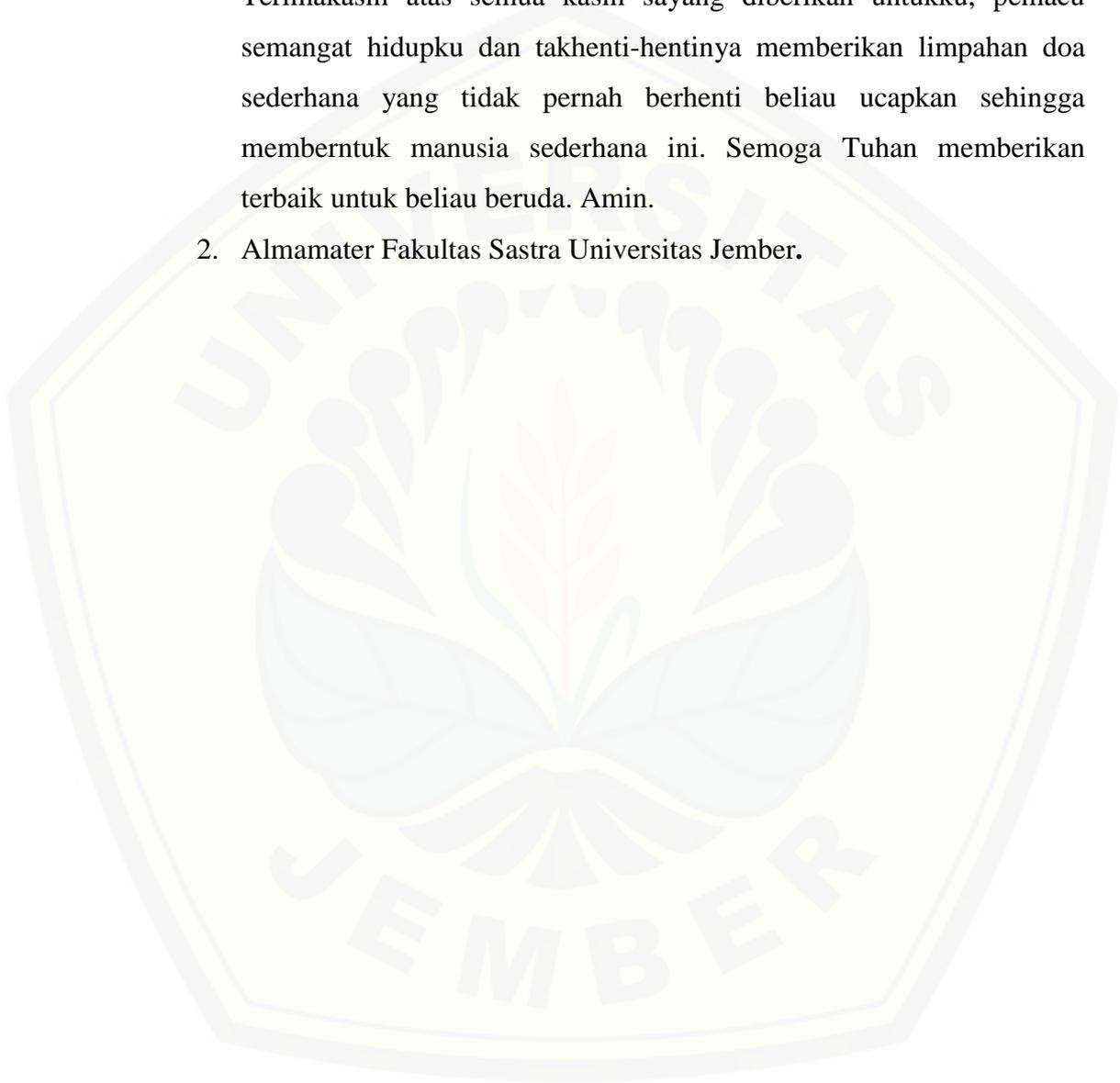
Dr. Hairus Salikin, M. Ed.

NIP. 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Riyanto dan Ibunda Khoriyatun.
Terimakasih atas semua kasih sayang diberikan untukku, pemacu semangat hidupku dan takhenti-hentinya memberikan limpahan doa sederhana yang tidak pernah berhenti beliau ucapkan sehingga memberntuk manusia sederhana ini. Semoga Tuhan memberikan terbaik untuk beliau beruda. Amin.
2. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.



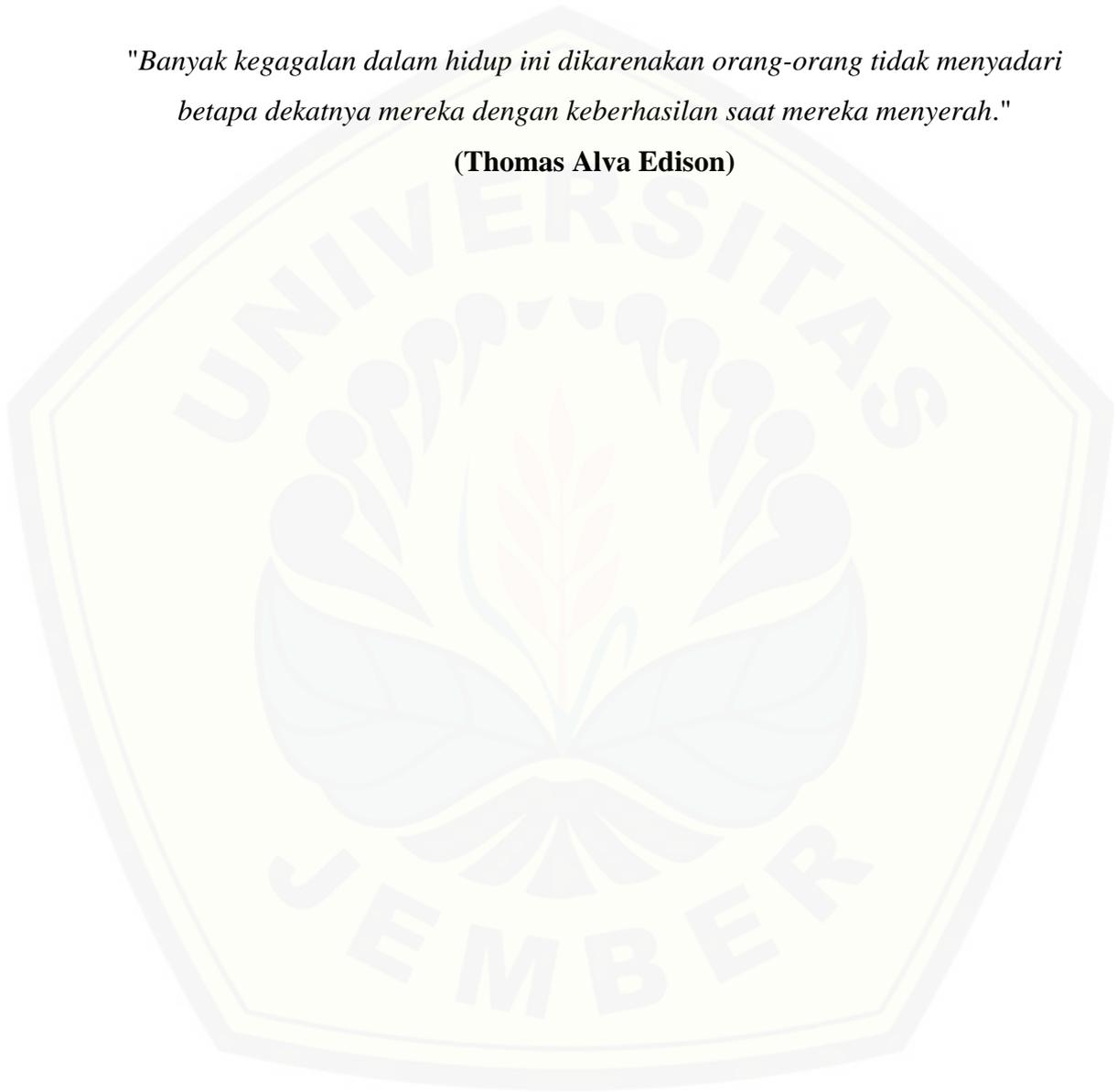
MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."

(Confusius)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi 2007-2010. Konflik ini dilatar belakangi oleh persaingan antara calon dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa Kampunganyar. Ketengangan yang terjadi menjelang pemilihan berlanjut setelah pemilihan dan sampai pengunduran diri yang dilakukan oleh Akhmad Budiyo sebagai Kepala Desa Kampunganyar.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan konflik pemilihan kepala desa tersebut sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M. Ed selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember.
2. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D selaku Ketua Jurusan Sejarah.
3. Bapak Sunarlan S.S., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Nurhadi Sasmita, M. Hum dan Drs. Parwata. M. Hum yang telah memberikan kepercayaan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Sastra khususnya dosen Jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah.

- 6.Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra UniversitasJember, atas segala bantuan, informasi, dan pelayanan selama ini.
- 7.Perpustakaan Universitas Jember, Pepustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu penulis dalam memperoleh sumber, serta instansi-instansi lain.
- 8.Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'a sepanjang masa kepada penulis.
- 9.Perangkat Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah yang telah membantu mengumpulkan data untuk skripsi ini.
- 10.Keluarga Pak. Rayis yang telah memberikan tempat dan waktu penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 11.Fifi Anggreni, Rodiatam Mardiyah, Rohmatul Lalila, atas kebersamaannya selama ini.
- 12.Arinal Haq, yang banyak memberikan cerita, motivasi, dan berbagi pengalaman baik suka maupun duka.
- 13.Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan, berdiskusi dan menambahkan refrensi buku sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-seluasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
RINGKASAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	10
1.3.1 Tujuan	11
1.3.2 Manfaat	11
1.4 Ruang Lingkup	11
1.5 Tinjauan Pustaka	13
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	19
1.7 Metode Penelitian	23
1.8 Sistematika Penulisan	26

BAB 2. GAMBARAN UMUM DESA KAMPUNGANYAR	27
2.1 Kondisi Geografis Desa Kampunganyar	27
2.2 Kondisi Demografis DesaKampunganyar	31
2.3 Kondisi Sosial Budaya	36
2.4 Kondisi Sosial Ekonomi	39
2.5 Kondisi Sosial Politik	45
BAB 3.KONFLIK DAN DINAMIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DIDESA KAMPUNGANYAR	56
2.1 Proses Awal Munculnya Konflik	58
3.2 Proses Pemilihan Kepala Desa	72
3.3 Kondisi Desa Kampunganyar Setelah Pemilihan Kepala Desa 2007	84
BAB 4. PENUTUP KESIMPULAN	95

DAFTAR SINGKATAN

BPD	:Badan Perwakilan Rakyat
G-30-s/PKI	:Gerakan Tiga Pulus September/ Partai Komunis Indonesia
HUT	:Hari UlangTahun
KUD	:Koperasi Unit Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLINDES	: Pondok Bersalin Desa
POLSEK	: Polisi Sektor
POSYANDU	: Pusat Pelayanan Terpadu
PT	: PerguruanTinggi
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SD	: Sekolah Dasar
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tahap Akhir
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TNI	: Tetntara Nasional Indonesia
TK	: Taman Kanak-Kanak
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

Civil Society	: Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya
<i>Dor to Door</i>	: Pada lingkup politik dimaksudkan sebuah strategi politik untuk berkampanye dengan cara datang dari rumah ke rumah
Gapoktan	: Gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
Istigosah	: Doa bersama yang dipimpin oleh kiai
Jagong	: Kebiasaan bertamu masyarakat pedesaan
Kiai	: Sebutan bagi ulama (pandai dalam agama Islam)
Legitimate	: Seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil seorang pemimpin
<i>Money Politic</i>	: Politik uang
Multikultural	: Suatu budaya dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, kebiasaan, dan politik yang mereka anut
Periode	: Kurun waktu
Reformasi	: Perubahan terhadap sistem yang telah ada pada suatu masa

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Ketinggian Dari Permukaan Laut	30
Tabel 2.2	Komposisi Etnis Madura di Desa Kampunganayar 2007	32
Tabel 2.3	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Kampunganayar 2006-2010	34
Tabel 2.4	Jumlah Profesi Masyarakat Desa Kampunganayar	35
Tabel 2.5	Komposisi Besarnya Penganut Agama-Agama	36
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kampunganayar Menurut Tingkat Pendidikan	37
Tabel 2.7	Banyaknya Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Per-Desa/Kelurahan	46
Tabel 2.8	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampunganayar	49
Tabel 2.9	Daftar Nama-Nama Perangkat Desa Kampunganayar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	52
Tabel 3.1	Jumlah Pemilu Kepala Desa Kampunganayar 2007	79
Tabel 3.2	Jumlah Perolehan Suara Masing-Masing Calon Kepala Desa Kampunganayar 2007	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Peta Desa Kampunganyar	29
Gambar 3.1	Kantor Kepala Desa Kampunganyar Setelah Pembakaran	68
Gambar 3.2	Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007	76

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Surat Izin Penelitian Universitas Jember	107
Lampiran B	Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi	107
Lampiran C	Surat Ijin Penelitian Desa Kampunganyar	108
Lampiran D	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi	109
Lampiran E	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi	110
Lampiran F	Surat Pernyataan Pengunduran Diri	112
Lampiran G	Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah	113
Lampiran H	Sumber internet DetikNews	117
Lampiran I	Sumber internet Bali Post	118
Lampiran J	Surat keterangan dari cuplikan wawancara	120
Lampiran J.1	Wawancara dengan Umar Said	120
Lampiran J.2	Wawancara dengan Pandris	122
Lampiran J.3	Wawancara dengan Akhmad Budiyono	124
Lampiran J.4	Wawancara dengan Rayis	127
Lampiran J.5	Wawancara dengan Suwedi	129
Lampiran J.6	Wawancara dengan Warso	131
Lampiran J.7	Wawancara dengan Sukemi	133
Lampiran J.8	Wawancara dengan Sukamat	135
Lampiran J.9	Wawancara dengan Mutono	137
Lampiran J.10	Wawancara dengan Sujali	139
Lampiran J.11	Wawancara dengan Sumawi	141
Lampiran J.12	Wawancara dengan Imam Turmudi	143
Lampiran J.13	Wawancara dengan Mestari	145

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 2007-2010. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik Pemilihan Kepala Desa? (2) Bagaimana proses terjadinya konflik Pemilihan Kepala Desa? (3) Bagaimana proses penyelesaian konflik Pemilihan Kepala Desa? Teori yang digunakan adalah teori konflik dan resolusi konflik, dan metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi di tingkat lokal, namun dalam perkembangannya dalam kegiatan tersebut sering diwarnai dengan terjadinya konflik yang membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Seperti yang terjadi di Desa Kampunganyar, dimana menjelang Pemilihan Kepala Desa 2007 desa ini dalam kondisi tidak stabil. Artinya Kantor Kepala Desa Kampunganyar dibakar oleh sejumlah oknum warga. Pembakaran ini terkait dengan ketidakpuasan proses persiapan Pemilihan yang akan berlangsung pada September. Proses demokrasi di tingkat lokal terutama di pedesaan sangat dinamis. Seperti dalam proses Pilkades. Munculnya konflik dalam pilkades di Desa Kampunganyar menggambarkan sangat dinamisnya proses demokrasi di tingkat pedesaan.

Kata Kunci: Persaingan, Konflik, dan Pilkades.

ABSTRACT

This thesis discusses the conflict of Kampunganyar Village Head election, District of Glagah, Banyuwangi Regency in 2007-2010. The problems in this thesis are (1) What prompted the conflict of Village Head election? (2) How did the conflict of Village Head election occur? (3) How was the conflict resolution of Village Head election? The research used theories of conflict and conflict resolution, and the method used was historical method consisting of five phases, that is, selection of topics, heuristics, criticism of sources, interpretation and historiography. Village Head Election is one form of democracy at local level. However, in its development this event is often colored with conflicts that make the conditions inconducive. As what happened in Kampunganyar Village, coming closer to Village Head Election 2007, the village was in an unstable condition. At the time, the office of Kampunganyar village head was burnt by some citizens. This burning was related to the dissatisfaction of the process of election preparation that would take place in September. The democratic process at local level, especially in village, is very dynamic as it is seen in the process of village head election. The emergence of Conflicts in Kampunganyar Village head election describes the very dynamic democratic process at village level.

Keywords: Competition, Conflicts, and Pilkades.

RINGKASAN

Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi 2007-2010; Wuri Windyati; 110110301046;xx-..... halaman; Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Skripsi ini membahas tentang Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi 2007-2010. Permasalahan yang dikaji adalah latar belakang terjadinya konflik pemilihan kepala desa, bagaimana proses terjadinya konflik pemilihan kepala desa, serta bagaimana penyelesaian dari konflik pemilihan kepala desa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang meliputi tahapan-tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tulisan ini menggunakan pendekatan politik, yang digunakan untuk menganalisis tentang permasalahan terkait dengan kajian kekuasaan pada umumnya. Kajian tersebut yang ada dilapangan, yaitu untuk mengkaji adanya persaingan yang terjadi diantara calon, baik dari peta politik seperti pendukung dari masing-masing calon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjelang pemilihan Kepala Desa massal ini situasi di Desa Kampunganyar sempat memanas. Artinya Kantor Kepala Desa Kampunganyar dibakar oleh sejumlah oknum warga. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, terdapat barang bukti yang menunjukkan kejadian ini memang sengaja dilakukan oleh warga. Barang bukti tersebut seperti: tutup botol bensin dan tulisan yang berisi hujatan terhadap mantan kepala desa sebelumnya yang mencalonkan diri kembali pada pemilihan yang akan berlangsung pada September.

Adanya kejadian pembakaran ini proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan. Kondisi saat pemilihan berlangsung dalam keadaan stabil, artinya tidak ada situasi yang mengarah konflik. Pendukung dari masing-masing calon menunjukkan sikap baik dan tertib dan sampai pengumuman hasil perolehan suara. Permasalahannya setelah kegiatan pemilihan dan telah diumumkan pemenangnya ialah Akhmad Budiyo, mulai

muncul isu yang mewarnai kemenangannya. Menurut salah satu mantan calon kepala desa bahwa Akhmad Budiyono menggunakan money politic agar masyarakat memilihnya.

Setelah Akhmad Budiyono menjabat sebagai kepala desa yang kedua kali, kinerjanya menjadi perhatian bagi kelompok LSM yang ada di Desa Kampunganyar. LSM pro reformasi ini mengangkap Akhmad Budiyono kurang baik dalam memimpin desa ini dan terbukti sering menyelewengkan dana desa. Hal ini yang menjadikan posisi Akhmad Budiyono tidak nyaman dan merasa tidak sukses dalam membangun desanya. Menurut Akhmad Budiyono sudah mengupayakan yang terbaik bagi perkembangan desa, namun masyarakat hanya memandang sebelah mata.

Adanya isu-isu yang dibuat oleh kelompok masyarakat tersebut menjadikan Akhmad Budiyono untuk mengambil keputusan, bahwa ia harus mengundurkan diri atau memperkarakan permasalahan desa ini ke jalur hukum. Dapat diketahui kelompok masyarakat tersebut melaporkan Akhmad Budiyono di Kecamatan dan sampai permasalahan dana desa diperkarakan dikejaksaan. Upaya mengatasi permasalahan ini, maka hasil akhirnya ialah meberikan pilihan kepada Akhmad Budiyono bersedia untuk mengundurkan diri atau tetap menjadi kepala desa namun tetap diperkarakan. Dari pihak Akhmad Budiyono mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala desa dan ia butikan dalam surat pernyataan pada 27 Desember 2010.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan, dengan demikian dapat dikatakan penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk daerah pedesaan yang sangat besar itu, apabila dapat dibina dengan baik, merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.

Seperti halnya dalam pemilihan kepala desa, masyarakat memiliki andil atau hak untuk menentukan siapa yang pantas untuk memimpin desanya, sebaliknya kepala desa juga harus dipilih oleh masyarakat selain dipilih berdasarkan keputusan Bupati, sehingga tidak tiba-tiba menjadi kepala desa. Masyarakat dalam suatu desa juga patut untuk diperhitungkan keberadaannya, karena suara masyarakat sebagai pembantu untuk melengkapi proses pemilihan tersebut, sekaligus sebagai penentu kemenangan calon.

Melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia yang berakibat pada rusaknya lembaga-lembaga tradisional atau adat yang dihormati warga desa.¹

¹ Dhurorudin Mashad dkk, *Konflik Elite Politik Pedesaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1 .

UU No.5 tersebut, kepala desa dan dewan desa dirancang sedemikian rupa oleh Pusat sehingga desa lebih bertanggung jawab kepada pemerintah atasan dari pada kepada warga desa yang memilih secara langsung kepala desa dalam suatu pemilihan kepala desa.²

Undang-Undang ini yang dimaksud desa yang menyangkut dengan ketentuan umum pasal 1 ialah, desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, dan Pejabat yang berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, sedangkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian ada dalam Pasal 14 yakni yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-30-S/PKI dan atau organisasi terlaranglainnya.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.

² *Ibid.*, hlm. 2 .

- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- i. Sehat jasmani dan rohani.

Menurut pasal 5 dalam UU ini menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin. Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu masa jabatan sebagai kepala desa yang tercantum dalam pasal 7 yakni 8 (delapan tahun) terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Desa dalam perkembangannya juga memiliki hambatan-hambatan yang ada di dalamnya, yakni, *Pertama*, hambatan legal rasional yang menempatkan desa sebagai sub-ordinasi atau bawahan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. *Kedua*, hambatan substantif prosedural untuk mewujudkan pemerintah desa yang demokratis. *Ketiga*, hambatan berupa penyeragaman struktur dan fungsi organisasi kemasyarakatan di desa.³

Pemerintahan Desa semasa Orde Baru tidak mengenal lembaga pengontrol pemerintah desa dan pada era reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata pemerintahan desa terjadi dengan ditebitkannya UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai pemerintahan desa pada pasal-pasal 93 hingga 111. Pemerintahan desa menurut rumusan pasal 95

³ *Ibid.*, hlm. 2 .

terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan calon yang memenuhi syarat, calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Implikasi nyata dari otonomi desa semestinya tampak dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat desa, di mana pemberdayaan masyarakat desa dipahami sebagai proses transformasi masyarakat desa dari suatu keadaan tertentu yang kurang baik menuju masyarakat yang lebih baik, namun desa dalam perkembangan pemberdayaan kadang tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi terhadap perkembangan lokal salah satunya yang terjadi yakni, memungkinkan timbulnya konflik akibat hadirnya lembaga-lembaga baru di tingkat desa. Seperti yang terjadi di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Konflik ini terjadi menjelang pemilihan Kepala Desa di Kampunganyar. Konflik ini diwarnai dengan aksi pembakaran Kantor Kepala Desa yang terjadi pada 18 Agustus 2007.⁴ Pembakaran Kantor Kepala Desa ini terjadi karena, ketidakpuasan masyarakat terhadap proses persiapan pemilihan Kepala Desa yang akan berlangsung pada September 2007.⁵ Ketidakpuasan masyarakat bermula dari pencalonan Akhmad Budiyono sebagai kepala desa. Pada awalnya ia sudah berjanji bahwa, tidak akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa, namun pada kenyataannya mendekati pemilihan ia mendaftarkan diri. Sebelumnya, posisi Akmad Budiyono sebagai PJ Desa Kampunganyar harus dicopot, kemudian ia dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa.⁶ Realitas politik semacam ini yang membuat masyarakat merasa tidak puas dengan proses persiapan pemilihan kepala desa, kemudian melakukan aksi kekerasan dengan cara membakar Kantor Kepala Desa. Pencalonan Akhmad Budiyono untuk yang kedua kalinya ini, mendapatkan dukungan tertinggi dari masyarakat Kampunganyar dengan

⁴ <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/8/19/b8.html> diunduh pada 4 April 2014.

⁵ “Jelang Pilkades, Kantor Kades Di Banyuwangi Dibakar”, dalam DetikNews.com diunduh pada 4 April 2014.

⁶ Hasil wawancara dengan Dakemen, pada 20 Desember 2014.

perolehan 1.029 suara dan merupakan kemenangan kedua bagi Akhmad Budiyo.⁷ Terkait perolehan hasil suara yang didapat oleh pihak Akhmad Budiyo, muncul isu-isu politik yang mewarnai kemenangannya, bahwa pihak Akhmad Budiyo menggunakan *money politic* untuk menarik simpati warga. Ketiga calon dan para pendukungnya menganggap hal ini tidak balance antara waktu pendaftaran Akhmad Budiyo yang secara tiba-tiba dengan kemenangan yang diperoleh. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terkait dengan kualitas Ahmad Budiyo dalam memimpin Desa Kampunganyar periode pertama, di mana ia pernah melakukan penyelewengan dana desa terkait dengan penebangan pohon yang berada di tanah bengkok.

Sebelumnya, pada saat pembakaran Kantor Kepala Desa di dinding Kantor Kepala Desa terdapat tulisan yang mengejutkan, isi tulisan tersebut yaitu "awas penipu swadaya masyarakat yang haram jadi harum" intinya pesan tulisan tersebut berupa kritik dan hujatan terhadap pihak yang diduga pernah melakukan penipuan swadaya masyarakat dalam bentuk penyalahgunaan keuangan desa. Akibat peristiwa pembakaran ini seluruh dokumen desa hangus terbakar, termasuk dokumen persiapan pemilihan calon kepala desa. Desa Kampunganyar ini sebelumnya pernah dijabat oleh Akhmad Budiyo mulai 1999 sampai 2007. Pada pencalonan kepala desa tersebut Akhmad Budiyo mencalonkan kembali, sehingga ada empat nama calon yang akan maju ke pemilihan Kepala Desa Kampunganyar. Keempat calon tersebut yakni: Mestari, Akhmad Budiyo, Imam Turmudi, dan Umar Said.⁸

Pembakaran Kantor Kepala Desa tersebut terjadi ketika Akhmad Budiyo sudah tidak menjabat sebagai kepala desa dan posisi sementara dijabat oleh PJ (penjabat kepala desa) yaitu Achmad Mulyono. Pembakaran Kantor Kepala Desa pertama kali diketahui oleh Murtoyo yakni tukang kebun desa setempat. Kejadian pembakaran terjadi pada pukul 03.30 dini hari. Kantor Kepala Desa sudah hangus terbakar. Aparat kepolisian juga ikut dikerahkan Wakapolres Banyuwangi Kompol Danny Nasution yang turun langsung di lokasi kejadian untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyo, pada 18 Agustus 2015.

⁸ Hasil wawancara dengan Sujali, pada 4 April 2015.

menangani kasus ini dan ditemukan sejumlah barang bukti salah satunya yakni berupa tutup botol bensin.

Pembakaran Kantor Kepala Desa awalnya dimaknai sebagai konsleting listrik saja, namun dengan ditemukannya barang bukti oleh pihak kepolisian dugaan berubah, bahwa pembakaran Kantor Kepala Desa diduga dilakukan oleh sejumlah oknum warga yang sengaja membakar kantor tersebut. Polisi saat itu meminta keterangan para saksi, yakni seluruh perangkat Desa Kampunganyar termasuk keempat calon kepala desa yang lolos pencalonan, namun polisi belum bisa memastikan pelaku pembakaran dan sampai pemilihan kepala desa selesai dilaksanakan, kasus ini belum juga terungkap pelaku sebenarnya, dengan berjalannya waktu kasus ini pun hilang dari perbincangan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dimenangkan oleh Akhmad Budiyo yang memperoleh suara sebanyak 1.029 suara, Umar Said memperoleh 895 suara, Mestari memperoleh 765 suara, dan Imam Turmudi memperoleh 244 suara.⁹ Akhmad Budiyo dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kampunganyar sehingga kemenangan Akhmad Budiyo ini merupakan kemenangan untuk yang ke dua kalinya sebagai kepala desa di desa tersebut. Pemilihan yang ke dua Akhmad Budiyo seharusnya menjalankan tugas sebagai kepala desa mulai tahun 2007-2013 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 / 509 / KEP / 429.012 /2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah,¹⁰ namun pada 2010 ia mengundurkan diri sebagai kepala desa. Pengunduran diri Akhmad Budiyo disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jabatannya sebagai Kepala Desa Kampunganyar. Faktor penyebabnya ialah terkait dengan program Prona dari pemerintah anggaran dana yang diminta kepada masyarakat. Dana pembuatan sertifikat bagi warga yang seharusnya tidak dikenakan biaya

⁹ Arsip pemerintah Desa Kampunganyar tentang hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa 2007.

¹⁰ Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampunganyar 2007 .

tetapi kebijakan kepala desa pada saat itu yakni Akhmad Budiyo meminta biaya kepada masyarakat setempat sebesar kurang lebih Rp.300.000. Padahal dana untuk pembuatan sertifikat sudah ada sendiri dari pemerintah. Penarikan dana tersebut sebenarnya juga digunakan untuk keperluan operasional desa, namun ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan tersebut dan menganggap Akhmad Budiyo melakukan korupsi. Faktor lainnya yakni mengenai penebangan pohon mahoni yang berada di tanah bengkok kepala desa. Penebangan pohon dilakukan oleh pihak Ahmad Budiyo yang kemudian hasil penjualannya dipakai sebagai modal untuk pemilihan gubernur pada saat itu, sehingga masyarakat kecewa dengan tindakan kepala desa yang seperti itu, dan faktor tidak sukanya sejumlah kelompok masyarakat atas kedudukan Akhmad Budiyo sebagai kepala desa kembali.

Setelah proses penetapan Akhmad Budiyo sebagai Kepala Desa Kampunganyar periode ke dua masa jabatan 2007-2013, ketegangan masyarakat tidak berhenti sampai di situ. Setelah ia diangkat sebagai kepala desa dari pihak pendukung calon-calon kepala desa yang lain memberikan peringatan seperti berikut “awas kalau P. Akhmad Budiyo jadi lagi nanti akan diungkap kesalahannya”,¹¹ karena ada pihak-pihak yang geram dengan tingkah lakunya yakni melakukan penyelewengan dana desa. Akhmad Budiyo sebagai Kepala Desa Kampunganyar merasa terganggu dengan tindakan masyarakat yang melakukan aksi teror atau ancaman kepadanya, yakni dengan meneror lewat pesan singkat. Permasalahan yang terjadi di desa ini sangatlah kompleks sehingga menimbulkan banyak asumsi yang menjadikan posisi kepala desa tidak nyaman dan seperti tidak dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut.

Pemilihan kepala desa bukan hal yang bisa dibuat ajang main-main dan mencari keunggulan dalam perolehan suara saja, namun kadang dalam proses pemilihan kepala desa intrik atau cara-cara yang digunakan masing-masing pihak untuk menarik simpati warga berbeda-beda. Guna menciptakan desa yang damai,

¹¹ Wawancara dengan Umar Said, ia salah satu kandidat calon Kepala Desa Kampunganyar 2007, pada 17 Oktober 2014 .

maju, dan berkualitas, maka peran kepala desa dan masyarakat juga harus seiring dan sejalan, sehingga desa dapat berkembang dengan baik.

Pada masa jabatan Akhmad Budiyo sebelumnya, isu-isu yang mewarnai masa pemerintahannya terkait penyelewengan dana desa. Setelah itu Ahmad Budiyo mencalonkan kembali sebagai kepala desa warga tetap menaruh kepercayaan kepadanya dan terpilih kembali, isu-isu yang berkembang terkait kemenagannya kembali bahwa ia menggunakan *money politic* untuk menarik simpati masyarakat, namun bila dilihat secara sosial-masyarakatnya pihak Ahmad Budiyo memang memiliki pendukung banyak di desa tersebut, yang sebagian besar berasal dari kalangan keluarga, sehingga tidak heran jika dalam pencalonannya kembali ia menang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi 2007-2010”**. Judul tersebut mengandung beberapa suku kata yang terdiri dari berbagai pengertian, antara lain bahwa konflik merupakan istilah yang berasal dari kata kerja Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul.¹² Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹³ Istilah pemilihan kepala desa berarti pemilu yang diselenggarakan setiap enam tahun sekali, dimana kepala desa yang sudah terpilih bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang sesuai dengan Undang-

¹² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 246 .

¹³ Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Shinta Darma, Lembaga Bahasa Nasional, 1982), hlm. 14 .

Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁴ Desa Kampunganyar sendiri adalah sebuah desa yang berada di wilayah terpencil, namun dengan kondisi alam yang memadai sehingga desa ini dapat disejajarkan dengan desa-desa yang lain, yang merupakan bagian dari Kecamatan Glagah dan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.¹⁵

Pemilihan judul skripsi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: *Pertama*, Penulis sangat tertarik dengan permasalahan terkait pemilihan Kepala Desa Kampunganyar, bahwa satu minggu menjelang Pemilihan Kepala Desa terjadi pembakaran Kantor Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak puas dengan proses persiapan menjelang Pemilihan Kepala Desa. *Kedua*, Penulis yakin bahwa belum ada kajian penelitian yang pernah mengulas permasalahan yang terjadi di Desa Kampunganyar terkait Pemilihan Kepala Desa, sehingga penulis yakin bahwa kajian di atas masih orisinal. Mengenai perbedaan penelitian yang pernah dilakukan dalam buku atau karya lain ketika mengkaji permasalahan yang sama tetapi dengan wilayah yang berbeda, tentunya menjadi salah satu rujukan yang sangat berharga untuk dijadikan bahan acuan, dengan catatan permasalahan yang pernah dikaji di atas sangat berbeda dengan kajian yang ada pada buku atau karya yang pernah ditulis oleh peneliti lainnya. *Ketiga*, tersedianya akses sumber untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder merupakan alasan utama dalam mengambil judul di atas.

¹⁴ Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., hlm. 15-24.

¹⁵ Profil Desa Kampunganyar, diperoleh pada saat melakukan wawancara pada 10 Oktober 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Koentjaraningrat menyatakan sebuah ilmu dimulai dengan merumuskan batasan masalah yang hendak dijadikan objek. Perumusan masalah dilakukan dengan maksud menghindari penyimpangan sehingga analisisnya dapat difokuskan. Dengan kata lain, masalah yang diteliti didefinisikan dengan rumusan pertanyaan secara eksplisit dan beruntutan sesuai dengan intensitas topik penelitian.¹⁶

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik pilkades ?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik pilkades ?
3. Bagaimana proses penyelesaian konflik pilkades ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Seperti halnya dalam penulisan karya sejarah tentunya di dalamnya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari setiap tulisan yang dibuat. Tujuan yang ingin dicapai nantinya diharapkan juga memperoleh manfaat dari hasil tulisan tersebut. Antara masalah, tujuan dan manfaat memiliki kaitan erat dan logis, tidak boleh ada perbedaan. Ketiga bagian ini harus seiring dan sejajar. Tujuan merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh penulis atau peneliti, dan manfaat adalah jawaban langsung atas keinginan penulis.

Dinamika pemilihan kepala desa di Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi, merupakan suatu proses pemilihan yang memanfaatkan suara rakyat untuk memilih salah satu calon kades mereka. Pemilihan kepala desa tersebut terdapat empat calon dan salah satu diantara ke empat calon tersebut dulunya pernah menjabat sebagai kepala desa dan ia mencalonkan kembali. Tetapi menjelang pilkades di Desa Kampunganyar tersebut malah terjadi kericuhan yakni insiden pembakaran ruangan kantor kepala desa. Hal ini yang patut untuk dipertanyakan apakah ada perebutan kekuasaan diantara elite desa menjelang pilkades.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 4 .

Tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik pilkades
2. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik pilkades
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik pilkades

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Tulisan ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para penikmat sejarah lebih tepatnya yang menyukai konflik lokal atau sebaliknya.
2. Tulisan ini dapat diketahui oleh masyarakat perkembangan suatu daerah dan daerah tersebut tidak dilihat dalam segi perkembangan yang positif saja, melainkan sejarahnya terdapat konflik atau tidak.
3. Memberikan pengetahuan lebih atau stimulus kepada penulis lain yang ingin mengembangkan konflik lokal yang sama namun dari segi pembahasan yang berbeda.

1.4 Ruang Lingkup

Setiap penulisan sejarah memerlukan pembatasan dalam topik yang akan dibahas agar diperoleh suatu kejelasan dalam pembahasan. Menurut Taufik Abdullah, penentuan ruang lingkup yang terbatas dari suatu studi sejarah bukan saja lebih praktis dan lebih mempunyai kepentingan untuk mengkaji secara empiris, tetapi secara metodologis lebih bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam penulisan ruang lingkup harus menunjukkan secara jelas lingkup penelitiannya, baik lingkup spasial (ruang geografis), lingkup temporal (waktu) dan lingkup kajian (prespektif).¹⁷

Lingkup spasial adalah batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administratif tertentu. Lingkup temporal adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam penelitian. Sedangkan lingkup kajian merupakan batasan aspek-aspek yang dianalisis dalam suatu penelitian sejarah. Penulisan skripsi ini lingkup spasial yang digunakan adalah Desa Kampunganyar

¹⁷ Nurhadi Sasmita dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 19 .

Glagah Banyuwangi, lingkup temporalnya yakni 2007-2011 dan lingkup kajiannya yaitu kajian sejarah lokal atau sejarah pedesaan.

Pemilihan lingkup spasial Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi adalah, karena desa ini sebenarnya terletak di pelosok dan dekat dengan Perkebunan Kalibendo. Desa ini dulunya merupakan pemekaran dari Desa Tamansuruh. Sejak itu desa ini menjadi desa yang berdiri sendiri. Desa ini memiliki lima dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Kalibendo, Dusun Panggang, Dusun Rejopuro dan Dusun Kopen Cungkung. Seperti desa lainnya desa ini juga memiliki kepala desa pada 1999-2007 yang bernama Akhmad Budiyo setelah masa baktinya selesai awal 2007, selanjutnya Akhmad Budiyo mencalonkan kembali sebagai kepala desa Kampunganyar. Menjelang pemilihan kepala desa tersebut ada ketegangan disaat Akhmad Budiyo sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa yakni kantor kepala desa dibakar. Motif dari pembakaran tersebut dipicu oleh ketidakpuasan proses persiapan pemilihan kepala desa di tempat tersebut. Akibat peristiwa itu seluruh dokumen desa hangus terbakar termasuk dokumen persiapan pemilihan calon kades setempat.

Pemilihan lingkup temporal 2007-2010 adalah 2007 merupakan tahun menjelang pilkades yakni berkisar antara September 2007 yang diwarnai aksi pembakaran ruangan Kantor Kepala Desa pada saat itu. Pemilihan kepala desa dimenangkan Akhmad Budiyo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 509/ KEP/429.012/ 2007 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah. Pada 2010 merupakan akhir dari ketegangan yang berlangsung mulai awal persiapan pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa baru, yakni dengan pengunduran diri Akhmad Budiyo sebagai kepala desa. Selain itu dampak dari pengunduran Ahkmad Budiyo sebagai kepala desa juga meredakan ketegangan yang sempat terjadi di Desa Kampunganyar.

Lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah pedesaan atau sejarah lokal. Skripsi ini disebut demikian karena peristiwa ini terjadi di suatu desa dan menyangkut pemilihan kepala desa termasuk politik tingkat lokal atau

hanya politik lokal. Kuntowijoyo mengenai pemilihan kepala desa (pilkades), peraturan desa (perdes), peraturan daerah (perda), pemilihan bupati, pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilu, dan aktivitas partai-partai mungkin termasuk politik tingkat lokal, mungkin hanya politik lokal.¹⁸ Dinamika politik di desa kadang-kadang lain dengan dinamika politik di tingkat nasional. Politik di sini tidak selalu harus berganti gerakan politik formal, tetapi dapat merupakan fraksi-fraksi perorangan atau keluarga. Seperti pemilihan kepala desa misalnya, seorang calon dapat dianggap sebagai kekuatan politik di tingkat desa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Mengenai tingkat orisinalitas karya tulis, keabsahan suatu karya ilmiah yang berbasis pada ilmu pengetahuan, harus dapat didukung dengan adanya perbandingan-perbandingan yang memaparkan dalam sudut pandang apa karya tersebut dihasilkan dan menunjukkan letak perbedaan dan orisinalitas dari karya lainnya. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis mengenai isi buku, hasil penelitian atau pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga ditunjukkan perbedaan anatara karya yang ditinjau itu dengan penelitian yang dilakukan berbeda dengan buku atau hasil penelitian terdahulu, sehingga tampak aspek orisinalitasnya.¹⁹

Sumber literatur yang dijadikan rujukan adalah *pertama*, buku yang di editor Heru Cahyono yang berjudul *Konflik Elite Politik di Pedesaan* merupakan bunga rampai yang secara umum menggambarkan tentang permasalahan pencalonan dan pemilihan kepala desa, menjelaskan serta memberikan gambaran mengenai fenomena politik yang terjadi di beberapa wilayah desa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Buku ini secara jelas menggambarkan isu-isu politik yang berkembang di masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik. Beberapa sub bab yang ditulis dalam buku ini antara lain: Konflik Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa (Kasus Desa Sitanggal, Brebes), Badan

¹⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 185 .

¹⁹ Nurhadi Sasmita, *op. cit.*, hlm. 23 .

Perwakilan Desa dan Perpanjangan Konflik Pilkades Bero Klaten, Konflik Badan Perwakilan Desa dengan Lurah Desa (Kasus Rejosari Bantul), Konflik Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa Majasetra Bandung, Kolusi BPD-Kepala Desa dan Para Penentang Kasus Desa Gelap Lamongan, Ketegangan dan Kompromi Badan Perwakilan Desa dengan Perbekel Studi Kasus Desa Tulikep Gianyar. Dari beberapa artikel di atas ada kasus yang hampir sama dengan kasus yang sedang saya tulis yakni, mengenai persaingan dan pencalonan kepala desa yang diwarnai dengan tindakan *money politic* seperti kasus yang terjadi di Bero Klaten Jawa Tengah yang dijelaskan dalam bab 3.²⁰ Ironisnya isu-isu politik seperti ini selalu dikaitkan dengan Pemilihan Kepala Desa dan masih kuat berkembang di masyarakat, sebab masyarakat merupakan alat politik yang sangat mudah untuk dimobilisasi oleh mereka yang memiliki strata tinggi dan cara tersebut selalu mengarah pada masyarakat ekonomi kelas bawah. Cara-cara berdemokrasi seperti itu menunjukkan cara untuk menarik simpati masyarakat, namun dengan cara yang sangat tidak *fair* dan terlihat bahwa masyarakat pun mendukung cara-cara berdemokrasi yang tidak berkualitas tersebut.

Dapat dilihat sebagai contoh kasus yang diungkapkan dalam buku ini menunjukkan betapa antusias dan persaingan yang ditunjukkan oleh masing-masing calon dan pendukungnya dalam pemilihan kepala desa, di mana masing-masing calon saling bersaing untuk memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, maka dari sikap antusias tersebut masing-masing calon berusaha untuk memperoleh suara rakyat dan tidak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan diluar aturan yang telah disepakati bersama dan menimbulkan kondisi politik yang cacat hukum. Mereka menganggap dirinya perlu melakukan cara-cara seperti itu karena, mereka sudah mengeluarkan biaya banyak untuk modal kampanye namun pada akhirnya tidak mendapatkan kemenangan yang diharapkan. Apabila individu-individu tersebut tidak dapat menerima keputusan yang sudah ditetapkan, maka sering muncul konflik atau ketegangan dari masing-masing pihak. Guna

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77 .

pencapaian penyelesaian suatu konflik dalam buku ini dijelaskan bahwa, para elit desa semestinya belajar bagaimana menjalankan sebuah transformasi konflik.

Kedua, buku yang berjudul *Elite Lokal dan Civil Society* karya Yusron. Buku ini membahas tentang peran *civil society* dan hubungannya dengan masyarakat lokal. Hubungan negara, masyarakat, dan *civil society* dalam buku ini ditunjukkan dalam Pemilihan kepala Desa 1999 yang berlangsung di Desa Silir Kediri.²¹ Yusron dalam hal ini berusaha menunjukkan kondisi politik yang tengah terjadi di Silir Kediri dengan mengamati kondisi masyarakat secara keseluruhan. Implikasi nyata dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut yaitu, masyarakat dan *civil society* menunjukkan sikapnya untuk melawan kekuasaan otoriter dalam Pemilihan Kepala Desa, dimana masyarakat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait Pemilihan Kepala Desa yang dianggap cacat hukum. Masyarakat merasa tuntutan mereka tidak diwujudkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah tetap menjalankan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, namun masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditunjukkan dengan meminimalisasi partisipasi dengan cara golput (golongan putih). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan yang sentralistis yakni munculnya perlawanan terhadapnya.

Sesuai penelitian yang telah dilakukan dalam buku ini, menunjukkan ketidakseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat, yaitu pada saat Pemilihan Kepala Desa di Silir terlihat bahwa pihak yang berkuasa mencoba menekan resistensi masyarakat dengan cara mengeliminasi terbentuknya kondisi-kondisi yang menjadi *raison de'tre* terbentuknya *civil society*.²² Seperti berusaha mati-matian untuk menyukseskan pemilihan kepala desa, hingga dianggap perlu melakukan penekanan melalui pengerahan satu peleton Dalmas (pengendalian massa) untuk mendatangi rumah penduduk Silir secara *dor to door*. Adanya *counter-pressure* dari kekuasaan tersebut masyarakat semakin terkonsolidasi

²¹ Lihat, Yusron, *Elite Lokal dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 43 .

²² *Ibid.*, hlm. 60 .

dengan baik.²³ Perilaku kekuasaan semacam itu, membuat masyarakat mengiginkan adanya konsistensi dari Negara. Sebab, elite lokal berpendapat bahwa kebijakan panitia Pemilihan Kepala Desa di Silir tidak rasional dan tidak konsisten, tidak rasional karena, pemerintah memaksakan terselenggaranya pemilihan kepala desa yang cacat hukum, padahal panitia pemilihan kepala desa masih dipertanyakan legalitasnya, hal ini berarti tidak *legitimate*, tidak konsisten karena, soal tanggal kelahiran calon kepala desa yang sejak awal tidak dipermasalahkan, belakangan dipersoalkan pada saat pengumuman hasil seleksi, sehingga calon yang didukung elite lokal tidak lolos. Dapat dilihat bahwa, di sini masyarakat terlihat memihak kepada salah satu calon yang telah memberikan kontribusi besar terhadap desanya, sehingga masyarakat mempunyai pandangan sendiri bahwa mereka harus bersikap timbal balik kepada orang yang telah memberikan kontribusi tersebut, dimana dalam hal ini diibaratkan masyarakat sebagai pembeli dan calon yang akan dipilih sebagai penjual, model perilaku semacam ini masih sering dijumpai dalam pemerintahan desa.

Permasalahan di atas apabila dihubungkan dengan kasus yang sedang saya tulis menunjukkan sikap masyarakat yang sama-sama menentang atau merasa tidak puas dengan proses pemilihan kepala desa, namun dalam kasus yang saya tulis masyarakat melampiaskan ketidapuasannya dengan cara anarki yakni dengan membakar kantor kepala desa. Ketidakpuasan puasan masyarakat Desa Kampunganyar yakni menjelang pemilihan, sebelumnya hanya ada tiga calon kepala desa, namun mendekati waktu pemilihan ada salah satu nama mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, di mana pada awalnya ia telah berkomitmen bahwa tidak akan mencalonkan kembali dan posisinya saat itu sebagai PJ, sehingga situasi tersebut membuat kaget masyarakat dan calon yang lain serta masing-masing pendukung yang merasa tidak puas dengan persiapan pemilihan kepala desa. Adanya kejadian tersebut pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap berlangsung dan dibantu aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan.

²³ *Ibid*

Tinjauan pustaka ketiga berupa skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa* oleh Jeli Sandi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, merupakan sebuah kajian dalam ilmu hukum yang membahas tentang sengketa dalam proses pemilihan kepala desa yang berlangsung pada 2008, dalam karyanya tersebut Jeli Sandi mengupas persiapan menjelang pemilihan kepala desa yang diwarnai dengan munculnya isu-isu politik menjelang pemilihan kepala desa seperti, salah satu calon kepala desa melakukan cara-cara berdemokrasi yang tidak berkualitas dengan cara menjanjikan akan memberikan keuntungan apabila masyarakat mau mencoblos atau memilihnya, ironisnya cara ini dilakukan pada waktu masa tenang,²⁴ di mana menurut peraturan yang telah ditetapkan pada saat minggu tenang seluruh atribut calon harus dicopot, aksi-aksi kampanye dilarang dan dianggap sudah selesai. Hal tersebut sama dengan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2006. Tentang tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu ia juga menjelaskan permasalahan terkait dengan perhitungan suara, di mana dalam proses perhitungan suara terjadi kerancuan yakni ditemukan banyaknya kartu suara yang tidak ada tanda tangan dan berstempel panitia, sehingga surat suara yang tidak sesuai prosedur tersebut dianggap tidak sah, namun dari pihak calon lainnya menganggap hal tersebut sah dengan keadaan tersebut maka muncul konflik dari pihak masing-masing calon yang saling bersikukuh. Masing-masing calon menyetujui untuk dilakukannya perhitungan suara ulang namun masing-masing calon juga tidak berkenan untuk menandatangani berita acara, karena melihat perolehan suara ulang yang hasilnya dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Permasalahan terus berlanjut dan tidak diperoleh titik temu

²⁴ Jeli Sandi, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), hlm. 38 .

antara kedua calon. Kasus ini juga melibatkan banyak pihak diantaranya BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Camat, POLSEK Trenggalek, dan panitia penyelenggaraan pilkades. Kasus ini menunjukkan lemahnya kinerja panitia dalam mengatur dan mendistribusikan kelengkapan surat suara kepada masyarakat menjelang pemilihan, yang dampaknya mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan.

Hal ini menunjukkan bahwa, proses pemilihan kepala desa di setiap wilayah atau daerah masih saja diwarnai dengan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang calon pemimpin atau bisa disebut melakukan pesta demokrasi namun dengan cara yang tidak berkualitas. Seperti aksi penyuaan dan lain sebagainya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Negara ini masih sangat lemah dan sarat adanya *money politic*. Selain itu, terlihat tidak adanya ketegasan hukum baik dari pihak panitia untuk menangani hal-hal seperti itu.

Dari penjelasan sumber-sumber pustaka di atas, maka dalam skripsi ini, menjelaskan kondisi politik yang mewarnai pemilihan kepala desa yang berlangsung di beberapa wilayah. Realitasnya, bahwa masih diwarnai dengan isu-isu kecurangan masyarakat seperti, *money politic*, penggelembungan hasil suara, dan surat suara yang tidak sah di mana tidak terdapat tanda tangan dan stempel panitia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perpolitikan di Indonesia terutama politik lokal masih banyak diwarnai oleh isu-isu kecurangan. Seperti kajian yang dihasilkan oleh: Heru Cahyono, Jeli Sandi, dan Yusron tentang permasalahan pemilihan kepala desa.

Dari ketiga sumber literatur di atas, kajiannya sama dengan permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini yakni, mengupas permasalahan terkait pemilihan kepala desa yang terjadi di beberapa wilayah. Ketiga kajian tersebut, memiliki tingkat perbedaan dengan skripsi yang sedang ditulis. Letak perbedaan tersebut nantinya akan menjadi bahan perbandingan bagi penulis dalam menghasilkan karya yang orisinal dan berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Secara tematik, skripsi yang ditulis oleh penulis merupakan kajian yang menggunakan pendekatan politik. Apabila dibandingkan dengan karya lain yakni,

kajian Jeli Sandi yang sama-sama membahas tentang permasalahan pemilihan kepala desa, terkait dengan isu-isu kecurangan seperti *money politic* dan terdapat surat suara yang tidak sah, sehingga terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan karya Jeli Sandi yang pada waktu itu membahas kajian pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Kajian Jeli Sandi lebih menggunakan prespektif ilmu hukum untuk menjelaskan dan mengupas fenomena tersebut, di mana ia lebih menekankan pada undang-undang hukum terkait dengan peraturan desa yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, skripsi yang ditulis oleh penulis yakni menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, studi lapang yang dilakukan dengan cara wawancara secara lebih mendalam (*indepth interview*) dan berbeda dengan kajian Jeli Sandi yang lebih melihat kepada undang-undang hukum saja, tidak mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Skripsi yang ditulis oleh penulis secara keseluruhan lebih lengkap dalam membahas permasalahan dengan menekankan sifat diakronis yaitu, mempertimbangkan perkembangan waktu yang menjadi kekhasan sejarah, sehingga akan terlihat aspek orisinalitas karya dan lebih menarik bahwa belum pernah ada kajian yang sama-sama membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis, sehingga kajian dalam skripsi ini berbeda dengan karya-karya yang pernah dikaji sebelumnya.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu karya ilmiah seorang penulis membutuhkan suatu pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan ditulisnya. Adapun fungsi dari pendekatan adalah dari segi mana kita akan mengungkapkan suatu peristiwa, dan dimensi mana yang akan dikhususkan oleh seorang peneliti. Fungsi dari kerangka teori yaitu untuk mempertegas suatu analisis dari penulis, serta mempermudah penulis dalam menentukan sumber-sumber sejarah yang relevan sesuai dengan kajian masing-masing. Penulis bisa lebih gamblang dalam pengumpulan sumber-sumbernya. Para ahli dalam bidang metodologi sejarah, sering kali menyatakan bahwa untuk

mempermudah sejarawan di dalam pengkajiannya terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau akan selalu membutuhkan kerangka teori dan konsep, yang keduanya berfungsi sebagai alat-alat analisis serta sintesis sejarah.²⁵ Sejarah dikenal sebagai ilmu yang miskin konsep dan teori sehingga penulisan sejarah memerlukan ilmu bantu.²⁶ Konsep dan teori dapat dipinjam dari ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan politikologi. Sejarah dan sosiologi seharusnya sangat akrab, sebab para praktisi kedua disiplin ilmu ini mencoba atau seharusnya mencoba, mengamati pengalaman-pengalaman manusia sebagai suatu kesatuan.²⁷

Sebagai upaya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan politik, karena pendekatan tersebut merupakan salah satu ilmu bantu dalam kajian sejarah menyangkut aspek kajian kekuasaan pada umumnya.²⁸ Pada dasarnya kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *'polis'* untuk menyebut pengertian negara atau negara kota, selanjutnya menurut Plato *'Politeia'* digunakan untuk menamakan hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan.²⁹ Perkembangan istilah politik kemudian menyangkut suatu seni untuk mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Selain itu dalam arti kata, politik adalah kebijakan atau tindakan mengambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan penetapan bentuk, tugas dan lingkup kenegaraan. George Washington mengatakan bahwa politik merupakan sistem kekuasaan yang di dalamnya tidak boleh terdapat kekuasaan yang mutlak, melainkan harus ada perpindahan kekuasaan secara damai.³⁰

Untuk mengkaji skripsi ini lebih dalam penulis perlu menggunakan alat bantu berupa kerangka analitis yang digunakan sebagai bekal penelitian untuk

²⁵ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2007), hlm. 31 .

²⁶ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 3 .

²⁷ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial terjemahan Yayasan Obor Indonesia* (Jakarta: Adikarya Ikapi Program Pustaka, 2001), hlm. 25 .

²⁸ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 176.

²⁹ Telly Sumbu, Merry, Engelién dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum* (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2010), hlm.639 .

³⁰ Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 3 .

mendapatkan berbagai pertanyaan yang dapat digunakan dalam menggali berbagai informasi terhadap fenomena yang diteliti. Teori yang paling relevan digunakan dalam kajian tersebut, penulis menggunakan teori Konflik dan Resolusi Konflik. Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik berarti suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik juga merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, akan tetapi memberikan dampak yang cukup serius dalam berbagai kehidupan. Konflik sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Konflik juga diartikan sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial.³¹

Menurut Adam Curle membuat sebuah konseptualisasi dan melukiskan bagaimana hubungan yang penuh penindasan berubah menjadi sebuah konfrontasi. Chri Mitchel mengenali konflik menarik konsep Johan Galtung tentang kekerasan struktural. John Paul Lederach perlunya pembagian kekuasaan bagi kelompok yang tertindas. Louis Kriesberg mengembangkan ide dari konflik konstruktif, dimana peningkatannya harus diikuti dengan sebuah resolusi.³² John Burton menjelaskan mengenai teori kebutuhan. Fokus mereka secara garis besar terletak pada peranan pihak ketiga, terutama pihak-pihak luar sebagai penengah dan penghubung. Avruch mengatakan sebagai model resolusi konflik '*restricted*', dimana setiap pihak yang terlibat dalam konflik yang memutuskan hasil yang diinginkan dan peran pihak ketiga membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.³³

Penulis dalam hal ini setelah memaparkan pandangan mengenai konflik dan resolusi konflik menurut kelima tokoh tersebut, memilih untuk menggunakan teori Konflik dan Resolusi Konflik John Burton yakni yang diaplikasikan dalam

³¹ Hugh Miall dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7 .

³² Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (Yogyakarta: Quills, 2006) hlm. 60 .

³³ *Ibid.*, hlm. 57 .

Teori Kebutuhan, merupakan salah satu teori yang sangat berpengaruh terhadap resolusi konflik dan dapat menjelaskan persoalan yang sedang ditulis. Menurut pandangan teori ini kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan sebab yang paling sering terjadi dan sangat serius dalam konflik. Resolusi tidak mungkin tercapai tanpa dipengaruhinya kebutuhan tersebut.³⁴ Jika sertiap pihak yang bertikai dapat mengetahui kebutuhannya masing-masing, mereka mungkin akan dapat melihat bahwa kebutuhan tersebut tidak perlu dicapai melalui konflik bersenjata atau kondisi tawar-menawar, namun melalui pencarian jalan untuk mempertemukan kebutuhan dari setiap pihak. Cara semacam ini lebih dikenal sebagai pendekatan sama-sama menang dan bersifat tidak sensitif.

Pihak-pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah hasil kalah-menang (satu pihak menang, pihak yang lain kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada). Pada dasarnya ada banyak hasil yang sama dalam konflik dengan kekerasan keduanya sma-sama kalah. Jika tidak ada yang mampu memaksakan sebuah hasil atau bersedia untuk kompromi, pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing-masing pihak dimana pada akhirnya semua pihak berakhir dalam keadaan lebih buruk dibandingkan dengan jika mereka menggunakan stategi yang lain. Analisa penyelesaian konflik ditemukan bahwa hal ini merupakan hasil yang sering muncul ketimbang yang diharapkan.³⁵

Resolusi konflik dapat dilakukan dengan cara dialog, negosiasi, dan peran pihak ketiga yang dapat terjadi secara umum, untuk membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerja sama, atau berfokus pada pencarian kesepakatan yang digambarkan sebagai negosiasi. Tujuan dalam resolusi konflik adalah mencari atau mengembangkan dasar yang umum demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui proses kerja sama dari pada persaingan.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 60 .

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9 .

³⁶ *Ibid.*, hlm. 61 .

Pada dasarnya seperti permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini, merupakan adanya persaingan diantara keempat calon. Salah satu calon merupakan mantan kepala desa sebelumnya dan kembali mencalonkan diri. Keempat calon yang memiliki pendukung banyak yaitu kelompok Ahmad Budiyo yang terdiri dari keluarga, dan kerabat dekat. Calon yang lain juga memiliki pendukung banyak namun masih kalah dengan pendukung Ahmad Budiyo, seperti diketahui bahwa masyarakat desa sebagian besar adalah orang Madura dulunya dan keluarga Ahmad Budiyo banyak yang menetap di desa sehingga massa pendukungnya tambah banyak, sehingga sangat mudah untuk menarik massa, sehingga rasa persaingan semakin tinggi dan memunculkan konflik pembakaran Kantor Kepala Desa karena dari keempat calon merasa tidak puas dengan persiapan pilkades tersebut.

Resolusi konflik sangat diperlukan dalam keadaan seperti ini dengan tujuan agar ketegangan segera hilang, dan dapat dilakukan dengan cara dialog, negosiasi, dan peran pihak ketiga. Pada saat permasalahan ini terjadi menjelang pemilihan aparat kepolisian datang untuk meredakan kondisi yang kemudian pihak kepolisian memanggil seluruh perangkat desa untuk dimintai keterangan, panitia penyelenggaraan pilkades juga dimintai keterangan dan kemudian bermusyawarah bersama demi mencapai kondisi politik yang tenang.

Penjelasan mengenai teori diatas dan sedikit ulasan tentang intensitas politik yang ada di Desa Kampunganyar dengan mencocokkan dengan teori Konflik dan Resolusi Konflik dirasa sudah cukup untuk menjelaskan, bahwa dimanapun kekuasaan menjadi ajang untuk melakukan perebutan dan tidak jarang selalui diwarnai dengan aksi kekerasan.

1.7 Metode Penelitian

Pada umumnya yang disebut metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan obyek. Namun pendapat lain mengatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengajarkan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur,

proses, atau teknis yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan obyek penelitian.³⁷

Dalam penulisan sejarah para sejarawan juga mempunyai suatu metode yang digunakan dalam tahapan karya tulis sejarah. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis dengan kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Proses yang akan menggambarkan kembali peristiwa masa lampau dengan data yang diperoleh, dengan sumber-sumber yang akan menunjang penulisan sebuah karya ilmiah.³⁸

Kuntowijoyo dalam bukunya pengantar Ilmu Sejarah, membagi langkah-langkah penelitian sejarah ke dalam lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topic, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.³⁹

Pemilihan topic adalah langkah pertama dalam metode sejarah. Dalam kajian ini topic yang dipilih adalah Konflik Pemilihan Kepala Desa yang terletak di Desa Kampunganyar. pemilihan topic ini didasarkan pada ketertarikan pribadi penulis dengan masalah konflik pemilihan kepala desa di mana menjelang pemilihan terjadik pembakaran Kantor Kepala Desa Kampunganyar. Selain itu, juga karena letak kedekatan geografis antara Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi.

Tahap kedua adalah pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.⁴⁰ Sumber sekunder bentuknya bisa berupa dokumen dan arsip dari Kantor Kepala Desa Kampunganyar, foto-foto keempat calon kepala desa 2007, hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, keempat calon kepala desa dan lain sebagainya dapat diperoleh dalam bentuk tulisan maupun lisan. Untuk mendapatkan data yang factual, maka dilakukan observasi yaitu pengamatan

³⁷ Suhartono W Pronoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 11.

³⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 32.

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 90.

⁴⁰ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 35.

langsung oleh penulis sekaligus membuat catatan sistematis tentang fenomena yang timbul dan terkait dengan obyek penelitian. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa yang bukan merupakan saksi utama, yaitu kesaksian dari pegawai kecamatan dan pegawai desa. Sumber sekunder lainnya diperoleh dengan cara mengumpulkan buku literature yang mendukung pemecahan masalah seperti tesis, skripsi laporan penelitian, makalah serta sumber dari internet yang mendukung pemecahan masalah.

Data yang diperoleh kemudian diverifikasi. Verifikasi merupakan kritik sejarah atau keabsahan sumber. Dalam verifikasi ada dua macam yaitu autentisitas dan kredibilitas. Autentisitas atau keaslian (kritik eksternal) sumber berguna untuk melihat kebenaran dari sumber yang sudah didapat, sedangkan kredibilitas atau (kritik intern) dimana seorang sejarawan setelah mendapatkan data harus memilih dan membandingkan data yang sudah kita dapat, tidak langsung memasukkannya.⁴¹

Data yang sudah diverifikasi kemudian diinterpretasi. Interpretasi merupakan suatu analisis dan sintesis, dimana sebagai seorang penulis harus bisa menguraikan kembali apa yang sudah didapat dari penelitian dengan menyatukan data yang sudah didapatkan.⁴²

Setelah dilakukan verifikasi, tahapan selanjutnya adalah penulisan. Penulisan atau historiografi merupakan pengaplikasian dari semua yang sudah kita dapat dilapangan mulai sumber tertulis juga sumber lisan yang sudah diperoleh. Penulisan merupakan proses menyusun suatu pengetahuan sejarah yang bisa dibaca orang lain dan dalam penulisannya para sejarawan harus bersikap seobyektif mungkin dan menghilangkan sikap subyektif.

Selain ituterdapat metode *oral history* atau sejarah lisan yang mempunyai banyak kegunaan sebagai metode yang digunakan sebagai dokumentasi dan metode pelengkap terhadap memperoleh sumber-sumber sejarah.⁴³ Dalam

⁴¹ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 100-101.

⁴² *Ibid.*, hlm. 102-104.

⁴³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 26-28.

penulisan skripsi ini sejarah lisan yang didapat dari wawancara dengan masyarakat Desa Kampunganyar dan keempat calon.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri dari empat pokok bahasan, Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Merupakan gambaran umum Desa Kampunganyar yang meliputi kondisi geografis Desa Kampunganyar, kondisi demografis, kondisi sosial budaya, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik. Bab 3 membahas tentang konflik dan dinamika politik dalam Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar, proses awal munculnya konflik, proses Pemilihan kepala desa kondisi Desa Kampunganyar setelah Pemilihan kepala desa 2007. Bab 4 berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan bab-bab terdahulu. Uraian ini sekaligus menjadi penutup terakhir dari penulisan ini.

BAB 2

GAMBARAN UMUM DESA KAMPUNGANYAR

Bagian ini mengkaji tentang permasalahan politik yang terjadi di tingkat lokal yang terjadi di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi. Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah menjelaskan karakteristik desa terlebih dahulu. Beberapa hal tersebut seperti kondisi geografis Desa Kampunganyar, demografis Desa Kampunganyar, sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Permasalahan yang dikaji menjadi gambaran umum mengenai keadaan desa secara keseluruhan, serta menjadi latar belakang bagi penulis sebelum menjelaskan permasalahan yang lain di bab berikutnya. Hal-hal signifikan tersebut perlu diperhatikan dalam memahami permasalahan politik. Pembahasan mengenai kondisi geografis, demografis, sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik dapat memberi pengertian dasar tentang adanya permasalahan politik yang terjadi di wilayah ini. Penulis hendak menjelaskan kondisi desa selama pemerintahan kepala desa Akhmad Budiyo periode pertama sekaligus menjelaskan terkait permasalahan politik menjelang pemilihan kepala desa 2007 yang diwarnai dengan aksi anarki warga. Permasalahan sosial politik tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan pada bab berikutnya.

2.1 Kondisi Geografis Desa Kampunganyar

Desa Kampunganyar adalah desa yang berada di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Jarak Desa Kampunganyar dengan Kecamatan Glagah yaitu 7 km dan jarak desa dengan Kabupaten Banyuwangi 15 km.¹ Secara geografis, Desa

¹ *Profil Desa Kampunganyar 2009*, hlm 3.

Kampunganyar berada di wilayah yang jauh dari pusat kota Banyuwangi. Keberadaan desa yang jauh dengan pusat kota, tidak membuat Desa Kampunganyar menjadi tempat yang minim sumber daya alam. Terbukti dengan potensi alam yang terdapat di wilayah tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat. Serta kondisi jalan yang sudah beraspal.

Sejarah munculnya Desa Kampunganyar menjadi pembahasan yang penting bagi penulis bahwa desa ini dahulu merupakan bagian dari Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah. Perkembangan Desa Tamansuruh dibagi menjadi dua wilayah yaitu Desa Tamansuruh dan Desa Kampunganyar. Desa Tamansuruh sebagai induk desa memiliki luas wilayah sekitar 41,55km², kondisi tersebut menjadikan desa ini dibagi menjadi dua bagian yakni Desa Tamansuruh dan Desa Kampunganyar pada 1970an. Pembagian wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas wilayah Desa Tamansuruh yang cukup besar yaitu 41,55 km² sehingga memungkinkan untuk dibagi menjadi dua desa, jumlah penduduk Desa Tamansuruh yang banyak yakni 5.234, untuk memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat terjangkau ke seluruh masyarakat, dan meningkatkan keamanan desa guna memperkecil tingkat kriminalitas yang sering terjadi di desa.²

Tingkat keamanan di Desa Kampunganyar tergolong kurang maksimal, terbukti sering terjadi kasus pencurian hewan ternak, perabotan rumah tangga, dan kendaraan bermotor. Hal ini menjadi perhatian bersama bagi penduduk yang ada di di Desa Tamansuruh untuk meningkatkan keamanan wilayahnya. Adanya pembagian desa ini diharapkan tingkat kriminalitas akan berkurang dan diusahakan tidak ada, sebab dengan pembagian desa maka kepadatan penduduk juga akan seimbang. Jumlah penduduk yang seimbang memudahkan penduduk dalam mengatur kegiatan keamanan di desa. Oleh karena itu dibentuk desa baru yaitu Desa Kampunganyar. Secara keseluruhan, desa ini dapat digambarkan sesuai dengan peta sosial masyarakat desa, sebagai berikut:

² Hasil wawancara dengan Suwedi Kepala Desa Kampunganyar, pada 12 Februari 2015.

Gambar 2.1
Peta Desa Kampunganyar



Sumber: Koleksi Kantor Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Peta di atas menunjukkan gambaran Desa Kampunganyar secara keseluruhan yang meliputi batasan wilayah antara desa satu dengan desa yang lain, dan klasifikasi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Secara administratif desa ini memiliki pembagian wilayah yang membatasi antara desa satu dengan desa yang lain:

- Sebelah Utara : Desa Bulusari+Desa Grogol+Kalipuro
- Sebelah Timur : Desa Tamansuruh Kec. Glagah
- Sebelah Selatan : Desa Licin + Desa Tamansari Kec. Licin
- Sebelah Barat : Hutan Lindung Kab. Bondowoso + Banyuwangi

Desa Kampunganyar memiliki luas wilayah 31.08 Km² dan berada di ketinggian 460 meter di atas permukaan laut. Memiliki curah hujan rata-rata pertahunnya 2.550 mm dengan suhu rata-rata antara 20 derajat. Desa ini terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Kopencungking, Dusun Kalibendo,

Dusun Panggang, dan Dusun Rejopuro.³ Desa Kampungayar berada di sebelah barat Kecamatan Glagah dan secara umum didominasi oleh perkebunan serta pertanian. Tabel di bawah ini menunjukkan mengenai luas masing-masing desa secara keseluruhan yang berada di Kecamatan Glagah:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Ketinggian dari Permukaan Air Laut Dirinci
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2010

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)	Ketinggian (m)
1	Paspan	6.94	300.00
2	Glagah	3.90	250.00
3	Olehsari	3.59	144.00
4	Rejosari	2.64	150.00
5	Bekungan	2.88	75.00
6	Banjarsari	5.16	75.00
7	Kemiren	2.50	144.00
8	Tamansuruh	10.47	375.00
9	Kenjo	7.12	300.00
10	Kampungayar	31.08	460.00
Jumlah		76.28	

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2010, hlm. 90.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Kampungayar memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan dengan luas wilayah desa lainnya, yaitu 31.08 Km². Desa ini termasuk salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Glagah, di mana kecamatan ini terbagi menjadi sepuluh Desa/ Kelurahan seperti yang telah disebutkan di atas.

Tipologi wilayah ini merupakan wilayah yang berada di sekitar hutan dan termasuk wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain yakni Kabupaten Bondowoso. Wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dibatasi oleh gunung Ijen dan gunung Raung. Pada umumnya wilayah Banyuwangi tidak memiliki sungai yang besar, sehingga dapat terhindar dari bencana banjir.

Komposisi tanah di desa Kampungayar terdiri dari tanah persawahan, antara lain: sawah irigasi teknis seluas 64. 290 Ha, sawah irigasi 1/2 teknis

³ *Profil Desa Kampungayar 2009, loc.cit.*

141.000 Ha, tanah kering meliputi ladang atau tegalan 274.179 Ha, pemukiman 20.670 Ha, tanah basah meliputi tanah rawa dan pasang surut.⁴ Desa ini juga memiliki tanah Perkebunan Swasta dengan luas wilayahnya secara keseluruhan yakni 822.960 Ha. Serta memiliki tanah fasilitas umum meliputi: tanah kasa desa 6.300 Ha, lapangan 1.045 Ha, perkantoran pemerintah 1.070 Ha, tanah hujan meliputi hujan lindung 850.190 Ha, hujan produksi, hujan konversi serta beberapa bagian tanah kecil dengan luas 23.993 Ha.⁵

Kondisi tanah di wilayah ini cukup subur dengan tekstur tanah berupa lempengan. Tekstur tanah yang subur menjadikan lahan yang ada di desa dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam seperti tanaman padi dan buah-buahan seperti manggis dan durian. Kondisi tanah yang subur juga menjadi faktor pendukung perusahaan perkebunan untuk mengembangkan tanaman kopi, karet, dan cengkeh di wilayah ini.

2.2 Kondisi Demografis Desa Kampunganyar

Secara demografis, kabupaten Banyuwangi didiami oleh sejumlah etnis campuran antara lain etnis Madura, Osing, Cina, Arab, Bali dan Mandar. Sementara di Desa Kampunganyar didiami oleh tiga kelompok etnis, yaitu: Madura, Osing, dan Jawa. Etnis Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi yang dianggap sebagai keturunan tokoh-tokoh kerajaan Blambangan.⁶ Selain etnis Osing juga terdapat etnis Madura dan Jawa. Etnis Madura di desa ini lebih banyak tinggal di daerah

⁴*Ibid.*, hlm. 1.

⁵*Ibid.*

⁶Mereka itulah yang telah turun-temurun berabad-abad menghuni daerah Blambangan. Pemilihan nama dari tokoh-tokoh Blambangan dengan memakai kata wira, sejak wiraraja lalu wirabumi kemudian wiraguna berikutnya wiryadanuningrat. Mereka itulah yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa percakapan yang di sebut dengan nama Osing. Sebutan itu konon diberikan oleh para migran dari Jawa Tengah di daerah Banyuwangi selatan dalam abad ke-18 untuk menyebut orang-orang Banyuwangi. Penamaan itu diperkirakan karena pada bahasa orang-orang Banyuwangi terdapat pemakaian kata Osing atau Using dengan arti “tidak”. Lihat, Darusaputro, *Babad Blambangan Kajian Historiografi Tradisional*, makalah yang disampaikan dalam sebuah “Seminar Sejarah Blambangan”, di pendapa Kabupaten dan di Gedung DPRD Tingkat II Banyuwangi pada 9-10 November 2002, hlm 2.

perkebunan,⁷ sedangkan etnis Jawa hanya sebagai pendatang sehingga jumlahnya relatif sedikit. Dibandingkan dengan etnis Jawa, penduduk desa lebih didominasi oleh etnis Madura dan Osing. Etnis Madura secara turun-temurun dalam jangka waktu yang lama sudah mendiami desa ini. Etnis Madura pada dasarnya adalah masyarakat perantauan karena kondisi tanah di tempat asalnya gersang dan tidak baik untuk bercocok tanam sehingga Banyuwangi merupakan salah satu wilayah tujuan migrasi yang penting bagi mereka.⁸ Etnis Madura pada dasarnya senang berdagang dan dominan di pasar-pasar, ada pula yang bekerja menjadi nelayan, buruh dan pemulung. Berikut ini adalah jumlah rata-rata etnis yang ada di setiap dusunnya:

Tabel 2.2
Komposisi Etnis Madura di Desa Kampunganyar Tahun 2007

No	Nama Dusun	Etnis Madura	Etnis Osing	Etnis Jawa
1	Krajan	60%	25%	15%
2	Kopencungking	60%	40%	-
3	Kalibendo	50%	-	50%
4	Panggung	40%	60%	-
5	Rejopuro	30%	70%	-

Sumber: *BPS Banyuwangi dalam angka 2008, hlm. 24.*

Tabel di atas menunjukkan presentase penduduk etnis Madura, Osing, dan Jawa yang tinggal di setiap dusunnya. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa di Dusun Krajan terdapat 60% etnis Madura, 25% Osing, dan 15% Jawa. Dusun Kopencungking: 60% Madura, 40% Osing. Dusun Kalibendo: 50% Madura, dan 50% Jawa. Dusun Panggang: 40% Madura, dan 60% Osing. Dusun Rejopuro 30% Madura dan 70% Osing. Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat Desa Kampunganyar mayoritas adalah etnis Madura, meskipun terdapat etnis yang lain namun jumlahnya

⁷ Pemukiman penduduk suku Madura berbeda dengan yang digunakan di Jawa. Kehidupan sosial masyarakat Madura adalah pekarangan atau kelompok rumah yang disebut “kampong meiji”. Lihat, Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 60-61.

⁸ Hasil wawancara Sukemi penduduk Desa Kampunganyar, pada 10 Februari 2015.

tidak banyak. Keberadaan etnis tersebut menunjukkan bahwa etnis Madura di desa ini lebih dominan dibandingkan dengan etnis lainnya.

Etnis Madura memiliki latar belakang kehidupan yang keras, mudah tersinggung, tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin dan rajin bekerja. Harga diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan etnis Madura, seperti ungkapan pribahasa *Ango'an Poteya Tollang Pote Mata* artinya, lebih baik mati dari pada harus menanggung malu.⁹ Etnis Madura juga dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat. Masyarakat etnis Madura di Kampunganyar sangat menghormati kedudukan kiai sebagai pemimpin pesantren dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para santri yang belajar di pondok pesantren.¹⁰

Pertumbuhan penduduk di desa ini setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan masyarakat setiap tahunnya tidak sama. Kondisi tersebut dikarenakan adanya kelahiran, kematian, dan transmigrasi yang dilakukan oleh penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk di Desa Kampunganyar berdasarkan jumlah penduduk 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Kampunganyar tahun 2006-2010

Tahun	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2006	2.434	2.158	4.592
2007	2.112	1.993	4.105
2008	2.413	2.138	4.551
2009	2.453	2.105	4.558
2010	2.187	2.127	4.314

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2006-2010, hlm. 66.

Tabel di atas menunjukkan populasi jumlah penduduk Desa Kampunganyar dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Tahun 2006 jumlah penduduk sebanyak 4.592 jiwa, 2007 sebanyak 4.105 jiwa, 2008 sebanyak 4.551 jiwa, 2009

⁹ A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 172.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

sebanyak 4.558 jiwa, 2010 sebanyak 4.314 jiwa, dan 2011 sebanyak 4.321 jiwa. Angka penduduk perempuan menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laiki-laki. Hal ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan penduduk perempuan cenderung lebih dominan di wilayah ini.

Desa Kampunganyar dulunya merupakan salah satu wilayah yang dijadikan tujuan migrasi orang-orang dari luar wilayah, selain itu masyarakat desa ini juga ada yang melakukan urbanisasi,¹¹ seperti Kalimantan, Bali, dan lain sebagainya sehingga angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 dan 2010 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan masyarakat untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang lebih menjanjikan. Adanya masyarakat yang melakukan urbanisasi di wilayah lain, memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi yakni mereka dapat membangun rumah dari hasil kerjanya di wilayah lain serta dapat membeli sawah atau tanah.¹²

Tabel 2.4
Jumlah Profesi Masyarakat Desa Kampunganyar

Profesi	Jumlah
Petani	2.062
Tambang	5
Industri	61
Pedagang	269
Konstruksi	204
Angkutan	38
Jasa	64
PNS/ABRI	18

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2010, hlm. 18.

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Desa Kampunganyar pada umumnya bekerja sebagai petani dengan jumlah 2.062 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini banyak yang bergelut

¹¹ Urbanisasi merupakan suatu proses migrasi dengan tujuan daerah perkotaan (urban) dan bersifat swakarsa dan sukarela. Lihat, Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 99-100.

¹² Hasil wawancara dengan Rayis masyarakat Desa Kampunganyar, pada 4 Februari 2015.

dengan tanah persawahan. Selebihnya jumlah masyarakat dengan profesi sebagai penambang sebanyak 5 jiwa, industri 61 jiwa, pedagang 269 jiwa, konstruksi 204 jiwa, angkutan 38 jiwa, jasa 64 jiwa, dan PNS/ABRI 18 jiwa. Desa ini juga memiliki sarana kesehatan di antaranya 2 Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan 6 Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Penduduk yang terdiri dari multi etnis menunjukkan keragaman agama penduduknya. Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, namun juga terdapat pemeluk agama lain yang jumlahnya tidak banyak. Berikut ini adalah data penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut:

Tabel 2.5
Komposisi Besarnya Penganut Agama-Agama

Desa/ Kelurahan	Islam	Protestan	Khatolik	Hindhu	Budha
Paspas	3.370	-	-	-	3.370
Glagah	2.504	8	4	-	2.516
Olehsari	2.495	7	-	-	2.502
Rejosari	2.639	-	-	-	2.639
Bakungan	4.679	12	-	-	4.691
Banjarsari	5.726	104	12	21	5
Kemiren	2.479	7	10	-	-
Tamansuruh	4.146	18	6	-	14
Kenjo	1.825	-	-	-	-
Kampunganyar	4.309	12	-	-	-
Jumlah	34.172	168	32	21	19

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2010, hlm. 125.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa penduduk Desa Kampunganyar yang memeluk agama Islam sebanyak 4.309 jiwa sedangkan penduduk yang beragama Protestan sebanyak 12 jiwa. Dibandingkan dengan Desa/Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Glagah, di desa ini hanya terdapat dua agama yaitu, agama Islam dan agama Protestan, dan agama Islam lebih dominan. Selain jumlah pemeluk agama, penulis juga mengamati tingkat pendidikan penduduknya, karena tingkat kesejahteraan penduduk terlihat dari tingkat pendidikannya. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kampunganyar Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Prosentase
Tidak tamat SD	662
Tamat SD-SMP	865
Tamat SLTA	105
Tamat AK/PT	30
Jumlah	1.662

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2010, hlm. 168.

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa tingkat pendidikan dalam masyarakat pedesaan masih rendah,¹³ terbukti penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 662 jiwa. Perkembangan dan kemajuan suatu wilayah dapat diukur dari tingkat pendidikan, karena dari pendidikan tersebut baik formal maupun non formal dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakatnya sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur.¹⁴ Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki respon positif terhadap keadaan yang sedang terjadi di desanya, berusaha menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebaliknya, penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah mudah terpengaruh oleh keadaan yang sedang terjadi di desanya yang memicu kesalah pahaman.

2.3 Kondisi Sosial Budaya

Keberagaman budaya dalam masyarakat desa tidak terlepas dari keberagaman etnis yang ada di di daerah tersebut, sehingga kesenian yang tumbuh dan berkembang juga beragam. Kesenian yang berkembang di dalam masyarakat lahir

¹³ Rendahnya tingkat pendidikan para pekerja di pedesaan bukan saja disebabkan berbagai kesulitan yang sudah menjadi ciri lingkungan pedesaan, tetapi juga karena adanya pendapat yang tersebar merata bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa didukung oleh pendidikan pekerja pedesaan. Lihat, Louis Malassis, *Dunia Pedesaan Pendidikan dan Perkembangan* (Jakarta: PT Gunung Agung IKAPI, 1981). hlm. 24.

¹⁴ Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 6.

dari kelompok Madura, Osing, dan Jawa yang merupakan etnis yang tinggal di desa ini. Etnis Madura membentuk dinamika tersendiri bagi perkembangan masyarakat. Mereka dulunya melakukan migrasi ke desa ini dan menetap hingga sekarang. Kebudayaan Madura mempunyai penanda yang berbeda dengan etnis lain seperti: bahasa, bentuk rumah, gaya berpakaian dan berasesoris. Keberadaan kedua etnis ini sudah cukup lama sehingga sudah terjalin hubungan persaudaraan yang cukup erat, di mana masyarakat di desa ini menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Seperti orang Osing mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di dasarkan pada konsep “rukun” atau dalam bahas Osing disebut *rahab*.¹⁵ Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti: mendirikan rumah, acara keagamaan, ritual dan kegiatan lainnya.

Bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Madura dan bahasa Osing. Selain bahasa, kesenian yang ada di desa ini juga beragam di antaranya: jaranan, barong, kuntulan, orkestra polo, dan ithuk-ithukan. Keragaman kesenian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kesenian dan kepercayaan spiritual yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Salah satu kesenian yang menarik dan menjadi kekhasan dari desa ini adalah ithuk-ithukan.¹⁶ Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Kampungayar:

¹⁵ Sodaqoh Zainuddin dkk, “Orientasi Nilai Budaya Osing di Kabupaten Banyuwangi *Laporan Penelitian*, (Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996), hlm. 25.

¹⁶ Ithuk-ithukan merupakan kesenian yang ada di Desa Kampungayar yang hanya dilaksanakan di Dusun Rejoporo saja. Kesenian ini dilaksanakan setiap tanggal 12 Dulqaidah tahun Hijriyah. Warga kampung yang hampir seluruhnya keturunan etnis Osing selalu menggelar acara selamatan ini bersama. Selamatan ini dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rejeki yang telah mereka peroleh selama ini. Tradisi selamatan ini berbeda dengan acara selamatan pada umumnya. Tradisi ithuk-ithukan menu makanan yang sudah dibagi rata dan ditata di atas ratusan ithuk, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh warga dusun yang bertugas untuk membagikan ithuk ke rumah-rumah warga adalah 4 orang wanita tua yang telah ditunjuk. Selain membawa ithuk untuk dibagikan, mereka juga membawa semacam sesajen yang berisi beras kuning untuk ditaburkan di halaman rumah warga. Setelah ithuk dibagikan dan dimakan bersama-sama, warga beramai-ramai menuju sebuah sumber mata air yang ada di sebelah barat dusun yang oleh warga Rejopuro disebut *Sumber Kajar*, di sumber air ini masyarakat memanjatkan doa yang dipimpin oleh tokoh desa setempat. Lihat, Eko Budi

“ Tujuan warga menggelar acara selamatan di Sumber Kajar itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur warga atas segala nikmat dan rejeki yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, karena sumber air ini terus mengalir dan memberi kehidupan bagi warga masyarakat Dusun Rejopuro. Tradisi ithuk-ithukan yang digelar warga itu karena dulunya Buyut Wuku pernah berpesan agar warga melakukan acara selamatan setiap satu tahun sekali, yaitu setiap tanggal 12 Dulqaidah pada tahun Hijriyah. ”¹⁷

Dari kesenian tersebut terlihat bahwa masyarakat di sini masih percaya kepada hal-hal yang magis atau gaib, meskipun sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang fanatik. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama wilayah Jawa.

Mayoritas masyarakat di desa ini merupakan pemeluk agama Islam, namun mereka juga tidak meninggalkan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Kehadiran Islam bagi masyarakat Banyuwangi tidak dianggap sebagai ancaman yang dapat menggusur tradisi yang ada sebelumnya, sebaliknya terjadi akulturasi budaya antara kedua budaya tersebut. Seperti tesis yang telah disampaikan Clifford Geertz,¹⁸ tentang abangan yang sangat melekat pada masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dalam melakukan upacara ritual seperti: selamatan pernikahan atau selamatan kematian.¹⁹ Penyelenggaraan pengajian mereka juga menyuguhkan sesajian yang untuk dikirimkan pada leluhur mereka. Bagi masyarakat selamatan bukan semata-mata seremonial atau sekedar jamuan makan-makan bersama, melainkan simbolisasi mistis dan sosial sekaligus.²⁰

Setianto, *Bunga Rampai Ritual Adat Istiadat Masyarakat Banyuwangi* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, 2014), hlm. 41.

¹⁷ Cuplikan wawancara dengan Abdullah tokoh masyarakat Desa Kampunganyar, pada 17 Juni 2015.

¹⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

¹⁹ Hadiri, "Sistem Nilai Pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi: Sebuah Tinjauan Tentang Hakikat Waktu *Laporan Penelitian*, (Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996), hlm.37.

²⁰ Sodaqoh Zainuddin dkk, *op.cit.*, hlm. 46.

Tradisi masyarakat yang beragama Islam di desa Kampunganyar yakni seperti kegiatan pengajian yang diadakan setiap minggunya. Masyarakat juga sering melakukan kegiatan banca'an dengan membuat nasi tumpeng yang merupakan warisan leluhur dan menjadi kebudayaan turun temurun. Agama Islam yang berkembang secara umum memunculkan kebudayaan santri. Dengan adanya struktur masyarakat yang menempatkan peran kiai sebagai orang yang paham memegang teguh agama Islam serta sebagai tokoh masyarakat. Atas dasar inilah muncul para pemuka agama yang tampil sebagai pemimpin masyarakat.

2.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan yang mencerminkan adanya suatu aktifitas kehidupan untuk tetap *survive* di suatu masyarakat. Kondisi sosial ekonomi di Desa Kampunganyar umumnya bergerak di sektor perkebunan dan sektor pertanian. Kondisi wilayahnya yang agraris menjadikan sebagian masyarakat yang berada di Desa Kampunganyar berprofesi sebagai petani. Hal ini karena banyak lahan yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk bertani. Sektor pertanian ini juga memberikan peran penting bagi masyarakatnya. Terbukti dari kondisi desa yang agraris dan sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, maka masyarakat dapat melakukan panen padi sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun. Kondisi ini sangat membantu ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sumber kehidupan, khususnya masyarakat yang berada di wilayah tengah dan timur yang bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan geologis serta curah hujan yang mendukung.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani juga memiliki etos kerja yaitu: kerja keras, disiplin, rajin, bertanggungjawab, jujur, dan mandiri. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggungjawab mereka untuk menopang kelangsungan hidup keluarganya, meskipun kadang dihadapkan pada hambatan. Seperti: irigasi sawah yang kurang lancar, ketersediaan pupuk, hama, dan lain sebagainya.

Selain mengandalkan pada sektor pertanian, masyarakat Desa Kampunganyar juga bekerja di sektor perkebunan. Perkebunan lahir dan

berkembang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang sengaja didirikan demi kepentingan Belanda.²¹ Perkebunan berskala besar itu berawal dari sistem *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) pada 1830, dengan cara mewajibkan setiap desa menanam tanaman komoditi ekspor seperti, kopi, tebu, dan nila di sebagian tanahnya (20%),²² sedangkan hasil dari tanaman tersebut akan dijual sepenuhnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch tersebut, sangat membatasi dan menekan kaum pribumi sehingga tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum pribumi. Oleh karena itu, berbagai kalangan di Belanda melakukan protes keras dan menganggap tanam paksa tidak manusiawi, karena pada kenyataannya penduduk yang tidak memiliki tanah, harus bekerja dalam waktu 75 hari dalam setahun pada perkebunan milik Pemerintah Kolonial Belanda, sebagai pajak tenaga kerja. Protes tersebut membuahkan hasil, yaitu 1870 sistem tanam paksa dihapuskan.²³ Pengganti dari sistem Tanam Paksa adalah diterapkannya sistem sewa tanah, yaitu berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 oleh Engelbertus de Wall.²⁴ Diberlakukannya Undang-Undang tersebut, memunculkan suatu keterbukaan bagi berbagai kalangan dan termasuk siapa saja yang memiliki modal untuk membuka perkebunan swasta di Indonesia.

Perkebunan yang terdapat di desa ini yang sampai sekarang masih berkembang yaitu Perkebunan Kalibendo yang merupakan perkebunan milik swasta. Perkebunan ini bergerak di bidang budidaya tanaman cengkeh, karet, dan kopi. Masyarakat yang berada di wilayah bagian barat bekerja di sektor perkebunan. Mereka bekerja mulai dari pukul 06.00 sampai 13.00 WIB. Upah yang diberikan berdasarkan golongan buruh harian atau musiman, untuk buruh

²¹ Hasil wawancara dengan Erna pegawai bagian administrasi Perkebunan Kalibendo, pada 18 Agustus 2015.

²² Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Pekebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 79.

²³ Anne Booth dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 41.

²⁴ Indah Suhartini, *Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN XII Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Tahun 1997-2007*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2011, hlm. 44.

harian upah yang didapat sebesar Rp. 35.000/hari. Upah sebesar itu sebenarnya sedikit jika dibandingkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tetap bersyukur dengan upah sebesar itu, sebab dengan adanya perkebunan di desanya mereka memiliki pekerjaan dan mendapat penghasilan meskipun upahnya tidak seberapa. Kebanyakan buruh yang bekerja di dalam perkebunan atau bagian produksi adalah perempuan, sedangkan yang bekerja di lapangan yaitu sebagai pengangkut tanaman yang berasal dari kebun adalah laki-laki.

Kehidupan dalam perkebunan mencerminkan suatu komunitas yang terpisah dari dunia luar.²⁵ Hampir dapat dipastikan, bahwa kehidupan masyarakat perkebunan dipertaruhkan untuk perkebunan, dengan kata lain regenerasi masyarakat perkebunan berlangsung secara ilmiah, masyarakat perkebunan lahir, dewasa, kawin, menjadi tua dan meninggal di lingkungan perkebunan. Wilayah perkebunan terletak di tempat yang cukup terpencil, untuk itu peluang bagi penduduk di sekitarnya untuk memperoleh pekerjaan di luar perkebunan sangat minim.²⁶ Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat perkebunan:

“Adanya perkebunan Kalibendo ini saya sangat terbantu dek, karena dari sini lah saya dapat mencari tambahan penghasilan untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari, sedikit demi sedikit dikumpulkan dari pada menganggur di rumah tidak ada pekerjaan.”²⁷

Ikatan *patronclient*,²⁸ antara perkebunan dengan pekerja juga menjadi faktor yang sangat sulit bagi penduduk desa untuk meninggalkan pekerjaannya.

²⁵ Ita Setiawati dkk, *Teh Kajian Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 60.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

²⁷ Hasil wawancara dengan buruh perkebunan Ibu Mujiyati, pada 20 Januari 2015.

²⁸ Pola hubungan *patronclient* merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Selain itu dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 136.

Kendala berikutnya juga berkaitan dengan keberadaan desa yang cukup jauh dari keramaian kota, dan akses transportasi menuju kota cukup jauh jaraknya. Terjadinya krisis moneter menjadi tantangan tersendiri bagi perkebunan untuk mempertahankan eksistensinya dalam berproduksi.²⁹

Adanya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, tidak menghilangkan sektor perekonomian yang lain di desa ini. Seperti kegiatan perekonomian yang lain yaitu: Pegawai Negeri Sipil/ABRI, guru, bidan, bangunan atau konstruksi, tambang, industri, angkutan, jasa, pedagang, dan lain sebagainya.

Selain pertanian, perkebunan, dan sektor pekerjaan yang lain, wilayah ini dari segi kondisi sosial-ekonomi juga dapat dilihat dari perkembangan pariwisatanya. Hal ini karena wilayah Kabupaten Banyuwangi yang letaknya sangat strategis khususnya Desa Kampunganyar yang terletak di dataran tinggi, memungkinkan desa ini memiliki potensi wisata yaitu: Wisata Alam Perkebunan Kalibendo, Air Terjun Kembar, dan Pegunungan Ijen. Destinasi pariwisata tersebut menunjukkan bahwa wilayah pedesaan juga memiliki daya tarik dan tidak kalah dengan wilayah perkotaan. Adanya sektor pariwisata tersebut membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yaitu, masyarakat bisa melakukan pekerjaan sebagai pedagang makanan atau soufenir dan oleh-oleh khas Banyuwangi. Masyarakat juga menawarkan jasa yang lain seperti, membuka lahan parkir yang bisa memberikan keuntungan dan menambah penghasilan sehari-hari.³⁰ Sektor pariwisata di desa ini juga memberikan pengaruh bagi desa. Terbukti adanya pembenahan infrastruktur seperti jalan desa guna memperlancar akses menuju

²⁹Adanya krisis moneter akan menjadikan perkebunan berhati-hati dalam mengalokasikan keuangan atau modal dalam pembelanjaan, pemberian gaji karyawan pemberian tunjangan karyawan, dan aspek lainnya. Hal tersebut juga mengancam posisi karyawan, karena bisa saja sewaktu-waktu di PHK, apabila perkebunan sudah tidak sanggup membayar karyawan dalam jumlah besar. Lihat, Indah Suhartini “Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN XII Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Tahun 1997-2007”, Skripsi pada Universitas Jember 2011, hlm. 8.

³⁰ Hasil wawancara dengan Suwedi Kepala Desa Kampunganyar, pada 17 Oktober 2014.

desa ini. Masyarakat mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan di desanya, karena dengan begitu wilayah ini semakin dikenal banyak orang.³¹

Melihat kawasan pusat kota berpotensi di sektor perdagangan yang lebih modern. Dapat dijumpai industri perdagangan atau bisnis terdapat di pusat kota. Seperti pasar, toko, meubel dan perusahaan lainnya. Wilayah Jawa merupakan wilayah yang berpotensi besar di bidang ekonomi. Pendapat ini dipertegas oleh Carey,³² menurutnya pada saat itu pulau Jawa merupakan salah satu tempat di muka bumi di mana pangan tersedia secara lebih dari cukup bagi masyarakatnya. Perkembangan ekonomi telah menciptakan dampak ganda pada masyarakat yaitu, kemakmuran yang mendorong terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat pedesaan. Masyarakat desa tidak lagi terkungkung yang hanya mengandalkan kehidupan atau pola kehidupan sosial-ekonomi tradisional yang lazim disebut dengan ekonomi subsisten. Tetapi masyarakat mulai berubah menuju masyarakat pra-kapitalis. Masyarakat jenis ini menunjukkan pola kehidupan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada ekonomi rumah tangga, namun mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk kebutuhan pasar meskipun masih terbatas pada pasar di tingkat lokal.

Karakteristik Masyarakat pedesaan umumnya secara fisik relatif terisolasi, homogenitas dari segi latar belakang etnik dan budaya, sebagian besar penduduk adalah petani atau buruh tani serta ekonomi subsistensi.³³ Pendapat di atas diperkuat dengan analisis yang dilakukan oleh Sayogyo bahwa ia mengatakan struktur masyarakat dan sistem ekonomi desa itu tidak seragam menurut suatu tipe ideal tertentu dan bahwa bayangan orang kota mengenai masyarakat desa tenang dan tentram, rela, rukun dan berjiwa gotong-royong sering tidak cocok dengan

³¹Hasil wawancara dengan Rayis Kaur. Pemerintahan Desa Kampunganyar, pada 17 Oktober 2014.

³²Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Program Studi Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004), hlm. 35.

³³Lihat, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiolog*, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 129-131.

kenyataan.³⁴ Modernisasi dan pembangunan ekonomi juga telah membuka peluang dan kesempatan bagi lahirnya patron-patron baru di tingkat lokal, termasuk patron di luar desa (*supra-village patron*). Selain itu, modernisasi mempengaruhi orientasi masyarakat desa dari komunalistik ke individualistik dan matrealistis. Dalam perkembangannya, kehidupan dalam masyarakat pedesaan mengalami perubahan sosial-ekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi dan mempercepat perubahan tersebut antara lain: (1) sikap dan motivasi masyarakat, (2) ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan.³⁵ Hal ini menunjukkan adanya upaya dari masyarakat berupa sikap dan motivasi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kampunganyar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, misalnya dengan peningkatan kehidupan perekonomian dikeluarganya. Secara otomatis status sosial ditentukan berdasarkan ekonomi keluarga di mata masyarakat. Kedua, berarti adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang tentunya memicu masyarakat untuk terus berusaha dan berkembang. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat yang sifatnya tanpa batas.

Upaya peningkatan status sosial tersebut, diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa masyarakat desa mulai menampilkan dirinya dan meninggalkan struktur masyarakat tradisional. Kedudukan sosial dilihat dari sistem kasta yang mempergunakan keturunan, sekali dilahirkan oleh kasta yang tinggi, sampai mati seseorang akan menempati kedudukan tinggi.³⁶ Konsep status sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat sejak jaman tradisional tersebut, kini dianggap kuno dan perlahan ditinggalkan oleh masyarakat Desa Kampunganyar.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di desa ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor bermacam-macam, menunjukkan tingkat kesejahteraan

³⁴ Sajogyo dan Pudjiwati Sayogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 12.

³⁵ Mudjia Rahardjo, *Sosiologi Pedesaan: Studi Perubahan Sosial* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 36-37.

³⁶ Soedjito S, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1998), hlm. 5.

masyarakat juga berbeda-beda. Berikut tabel yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.7
Banyaknya Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Per-Desa/Kelurahan
Tahun 2010

Desa/ Kelurahan	Pra Sejahtera	Sejahtera				Jumlah
		I	II	III	III+	
Paspan	532	340	161	76	59	1.168
Glagah	354	36	37	253	115	795
Olehsari	225	75	86	334	154	874
Rejosari	340	142	143	278	74	977
Bakungan	580	241	137	337	27	1.322
Kemiren	511	140	99	258	34	1.012
Tamansuruh	879	237	124	375	48	1.663
Kenjo	404	150	75	39	19	687
Kampunganyar	723	445	250	125	119	1.662

Sumber: BPS Banyuwangi dalam angka 2010, hlm. 50

Tabel di atas menunjukkan hasil tahapan keluarga sejahtera per-des/kelurahan yang ada di Kecamatan Glagah. Dari tabel tersebut dapat kita lihat kondisi ekonomi masyarakat Desa Kampunganyar terdiri dari lima golongan artinya, tingkat ekonomi masyarakat terdiri dari: pra sejahtera yakni masyarakat dengan ekonomi sangat miskin, I ekonomi miskin tapi di atas pra-sejahtera, II ekonomi menengah ke bawah, III ekonomi cukup atau kaya, dan III+ ekonomi sangat kaya berlebih. Hal ini menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat bermacam-macam dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga berbeda-beda.

2.5 Kondisi Sosial Politik

Pada 1998 Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun mengundurkan diri setelah terjadi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tersebut terjadilah perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan yang bercorak sentralistik-militeristik ke pemerintahan reformasi yang demokratis. Seperti UU No.32/2004 menganut prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan,

keadilan, dan keanekaragaman.³⁷ Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, desa diatur sebagai berikut: status desa dikembalikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat. Kedudukan desa yang awalnya menurut UU No.5/1979 berada di bawah pemerintah wilayah kecamatan, namun dengan adanya perubahan UU No.32/2004 desa berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.³⁸

Implementasi model pemerintahan desa semacam ini memberi perubahan terhadap struktur pelaksanaan pemerintahan yang ada di setiap desa. Salah satunya sistem pemerintahan yang terjadi di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintahan di desa ini sudah ada sejak lama yaitu sejak terbentuknya desa ini sekitar 1970-an dan selama itu pula desa ini sudah enam kali melaksanakan pemilihan kepala desa. Pada dasarnya pemilihan kepala desa merupakan wujud sikap demokrasi masyarakat terhadap pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai dengan UU yang berlaku pada saat itu dan seiring berjalannya waktu, model pemilihan kepala desa juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan UU. Pada era Reformasi pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh masyarakat dengan cara mencoblos foto atau gambar calon yang dipilihnya. Masyarakat yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Hasil penghitungan suara yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak maka menjadi pemenangnya.

Pada dasarnya posisi kepala desa merupakan posisi tertinggi yang ada di desa serta memiliki kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Selain itu seseorang yang menduduki posisi tersebut dapat menguasai fungsi-fungsi birokrasi yang ada di desa. Dari segi prestise ia juga dikenal banyak orang sebagai pemimpin desa dan dianggap memiliki kontribusi besar dalam perkembangan desanya. Maka tidak heran kalau jabatan sebagai kepala desa diinginkan oleh

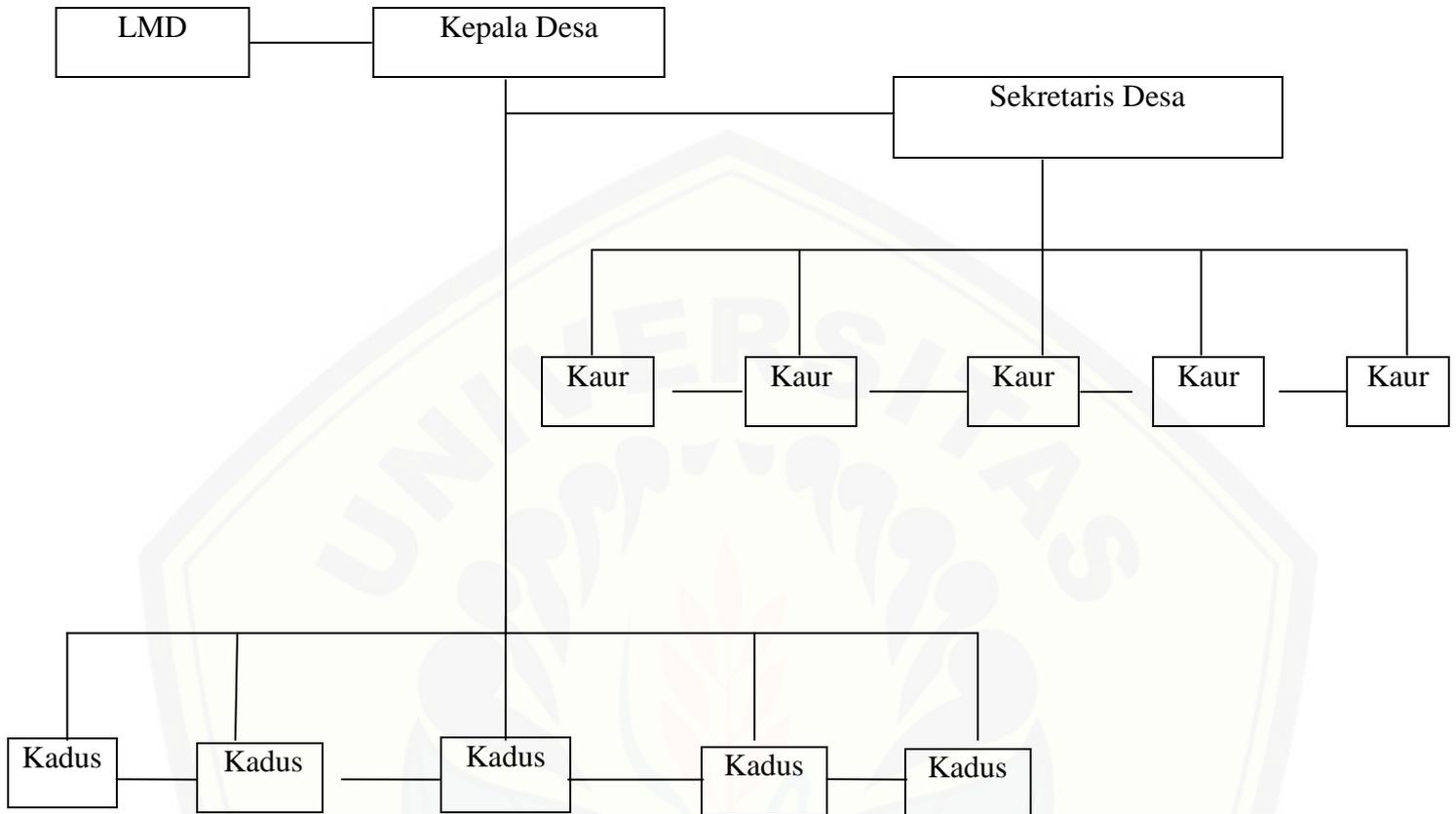
³⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 65.

³⁸ *Ibid.*

sebagian orang. Seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dilihat dari segi ekonomi biasanya orang tersebut tergolong orang mampu atau kaya dan mampu untuk membiayai proses kampanye yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah apalagi sampai menang maka akan memberi kepuasan tersendiri bagi mereka.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa tersebut yaitu kepala desa, dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat unsur pembantu kepala desa yaitu: sekretariat desa yang terdiri dari staf atau pelayanan, selain itu juga dibantu oleh unsur pelaksana teknis dimana pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain, unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa yang wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Penyelenggaraan pemerintah desa tersebut tergambar dalam tabel struktur organisasi berikut:

Tabel 2.8
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampunganyar



Sumber: Koleksi Kantor Desa Kampunganyar 2006.

Tabel di atas menunjukkan struktur pemerintahan yang ada di Desa Kampunganyar yang terdiri dari: kepala desa, kaur, dan, kepala dusun. Struktur organisasi pemerintah desa menunjukkan bahwa dalam pemerintahan kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dalam menyelenggarakan pemerintahannya kepala desa dibantu oleh aparat desa yang memiliki wewenang atau tugas masing-masing. Seperti halnya desa ini yang memiliki lima dusun, sehingga ada lima kepala dusun yang dipercaya oleh kepala desa untuk mengawasi kondisi masyarakat baik sosial, ekonomi, dan politik yang ada di setiap dusun secara langsung.

Pada 1999 sampai awal 2007 Desa Kampunganyar dipimpin seorang kepala desa yaitu Akmad Budiyo. Selama kepemimpinannya tersebut desa menunjukkan kondisi yang baik, artinya seluruh komponen yang menyangkut

struktur pelayanan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pelayanan pemerintah desa yang ada di Desa Kampunganyar tersebut, antara lain: Pelayanan pembangunan,³⁹ seperti: pembangunan jalan dan jembatan. Adanya pembangunan jalan dan jembatan tersebut, warga desa dapat pergi-pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Selain itu dapat memperlancar transportasi dalam hal menjual hasil bumi sehingga dapat tersalurkan dengan cepat serta dengan biaya perjalanan yang murah. Warga desa dapat membeli barang keperluan sehari-hari dari pasar atau dari kota dengan lancar dan biaya yang murah sehingga harga barang-barang tersebut menjadi murah. Pembangunan di bidang lain yaitu: TK (Taman Kanak-Kanak) yang memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena, dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa.

Pemerintah desa juga berupaya memberikan rasa aman dan tenteram kepada warganya dari tindakan kejahatan, kerusakan, dan bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, kekerasan warga, konflik antar warga dan antarkampung, kebakaran, dan banjir. Oleh karena itu pelayanan pemerintah desa diwujudkan dengan cara bekerja sama dengan RT dan RW yaitu membentuk sistem keamanan lingkungan atau yang biasa dikenal dengan kegiatan (siskamling). Caranya membuat satuan-satuan pos penjaga keamanan di setiap RT atau dusun. Pemerintah desa wujudkan dengan mengatur sistem ronda malam bagi setiap kepala keluarga, tata cara pertunjukan seni di malam hari, tata cara penggunaan pengeras suara di malam hari, dan sanksi bagi pelanggar keamanan dan ketertiban desa.⁴⁰ Pemerintah desa juga membina kerukunan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya seperti mengadakan upacara sedekah bumi atau bersih desa, mengadakan pesta seni peringatan HUT kemerdekaan, menggiatkan dan mendukung kegiatan olah raga, membina dan memupuk lembaga gotong royong, seni budaya, olah raga, serta keagamaan. Hal tersebut dicanangkan agar

³⁹ Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung, Hanif, Nurholis, *op.cit.*, hlm.104.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Akmad Budiyo mantan Kepala Desa Kampunganyar, pada 18 Agustus 2015.

masyarakat desa dapat membangun suasana yang rukun, aman, dan damai dalam sistem sosial budaya masyarakat desa.

Pelayanan pemerintah desa tersebut berhungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa: *pertama*, memberikan pelayanan kepada masyarakat; *kedua*, melakukan pembangunan; dan *ketiga*, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta wujud yang kongret. Pelayanan tersebut telah diterapkan di desa ini dan pelaksanaannya juga berdampak nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasakan dampak dari pembangunan tersebut yaitu kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya. Masyarakat puas karena masalah bersama yang dihadapi dapat terpecahkan berkat pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan baik dari pemerintah desa.⁴¹

Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti: sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.⁴² Sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan bertugas menjalankan administrasi pemerintah desa, serta memberikan pelayanan administratif kepala desa. Kepala dusun sebagai unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian terendah desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, pemerintahan desa yang bertugas mengurus terkait arsip desa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam urusan pembuatan surat-surat penting, Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya.⁴³ Berikut ini adalah perangkat Desa Kampunganyar pada masa pemerintahan Akmad Budiyo periode pertama:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Efendi masyarakat Desa Kampunganyar, pada 12 Maret 2015.

⁴² Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah atau kota atas nama bupati atau walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, Hanif Nurcholis, *op.cit.*, hlm. 76.

⁴³ Hasil wawancara dengan Warso Sekertaris Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah, pada 5 Februari 2015.

Tabel 2.9
Daftar Nama-Nama Perangkat Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Akhmad Budiyono	Kepala Desa	Krajan
2	Warso	Sekretaris Desa	Krajan
3	Rayis	Kaur. Pemerintahan	Rejosari
4	Kanawi	Kaur. Pembangunan	Krajan
5	Achmad Mulyono	Kaur. Keuangan	Krajan
6	Siti Amalia	Kaur. Umum	Krajan
7	Suripin	Kaur. Umum	Kopencungking
8	Pandris	Kepala Dusun	Krajan
9	Arisin	Kepala Dusun	Panggung
10	Sarono	Kepala Dusun	Rejopuro
11	Sumat	Kepala Dusun	Kopencungking
12	Nyono Sudarmaji	Kepala Dusun	Kalibendo

Sumber: Arsip Kantor Desa Kampunganyar tentang perangkat desa 2006.

Tabel di atas menunjukkan struktur perangkat Desa Kampunganyar pada masa Kepala Desa Akmad Budiyono periode 1999-2007, yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, kaur. pemerintahan, kaur. pembangunan, kaur. kesra, kaur. keuangan, kaur. umum, dan kepala dusun yang semuanya memiliki tugas atau wewenang masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desa. Dapat dilihat bahwa kepala desa tidak sendiri dalam menjalankan pemerintahan desa, tetapi ia dibantu oleh staf yang saling bekerjasama.

Pemerintahan desa yang ada di desa ini hampir sama dengan pemerintahan yang ada di desa lain, artinya pemerintah desa juga mengatur komunikasi dengan warganya. Komunikasi dalam pemerintahan desa dilakukan melalui lembaga musyawarah desa antara kepala desa pamong desa dengan masyarakatnya dan biasanya dilaksanakan di balai desa. Balai desa atau kantor desa sering menjadi tempat menyalurkan informasi, baik yang berupa penyampaian informasi tentang pembangunan atau instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan dengan masyarakat. Seperti penyuluhan tentang KUD (Koperasi Unit Desa) atau penerangan KB (Keluarga Berencana) sering dilaksanakan di balai desa.

Upaya menyalurkan informasi baik berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, atau keputusan yang menyangkut kegiatan pembangunan

Ahmad Bydiyono melakukan komunikasi tatap muka (face-to-face communication) dengan warga desa. Biasanya ia memberikan penerangan-penerangan melalui rapat-rapat di balai desa yang dihadiri oleh warga desa tersebut. Ia juga memberikan demonstrasi penggunaan atau pemakaian bibit unggul, pupuk atau obat hama (pestisida) di petak-petak sawah. Kepala desa dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat desa. Misalnya keputusan dalam pembuatan jembatan, jalan, atau memperbaiki irigasi harus diputuskan bersama dan mufakat.

Akhmad Budiyo selama menjadi kepala desa mencoba dekat dengan masyarakatnya dan berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan desanya. Karakternya yang religius juga memberikan dampak terhadap masyarakat yaitu, setiap acara bersih desa setiap 1 Muharram diadakan kegiatan moco lontar yusuf atau pengajian. Kegiatan keagamaan lainnya yaitu, satu bulan sekali desa ini melaksanakan pengajian rutin yang dilakukan di mushola atau masjid dengan mengundang atau mendatangkan tokoh agama yang dipandang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam. Masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan ini, sebab semasa pemerintahan kepala desa sebelumnya kegiatan keagamaan seperti ini jarang dan dilaksanakan.⁴⁴ Oleh karena itu, dengan kegiatan semacam ini selain mempererat tali silaturahmi antar masyarakat tetapi juga meningkatkan rasa keimanan masyarakat.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat Desa Kampunganyar disamping itu sebagian masyarakat juga beragama Islam, sehingga kegiatan semacam ini rutin dilakukan. Cara-cara atau kebijakan yang dilakukan Akmad Budiyo menunjukkan usaha untuk menjadikan desa ini tetap balance antara kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan.⁴⁵ Usaha semacam ini yang dapat memberikan dampak positif bagi si kepala desa sendiri, sebab dengan begitu

⁴⁴ Hasil wawancara Sukamat dan Jamal, pada 13 Maret 2015.

⁴⁵ Hasil wawancara Akmad Budiyo mantan Kepala Desa Kampunganyar, pada 18 Agustus 2015.

masyarakat banyak yang suka dan mendukung kegiatan yang dibuat oleh kepala desa. Secara sosial ia mempunyai banyak sanak keluarga dan hubungan pertemanan yang baik di desa ini. Oleh karena itu, tidak jarang setiap kegiatan yang dilakukan juga mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat. Hubungan kekerabatan memang menjadi salah satu faktor jalannya roda pemerintahan semasa ia menjabat.

Desa Kampunganyar yang terdiri dari lima dusun dan terdiri dari beberapa etnis yaitu: etnis Jawa, Madura, dan Osing yang semuanya tersebar di setiap dusun. Corak kehidupan masyarakat di sini hidup secara berdampingan antara etnis satu dengan etnis yang lain. Seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat yang secara berdampingan tersebut, melahirkan suatu perkawinan campuran diantara individu, sehingga hubungan kekerabatan semakin meluas.

Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di dasarkan pada konsep “rukun” atau dalam bahasa Osing disebut *rahab*.⁴⁶ Konsep ini dapat kita jumpai pada masyarakat agraris, mereka selalu menjunjung tinggi semangat kolektifitas sehingga akan terbangun semangat kebersamaan dan menghindarkan diri dari perpecahan. Seperti: gotong royong merupakan ciri khas dari masyarakat desa ini, upacara keagamaan, kerja bakti pembangunan rumah warga, hajatan, dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat yang saling berdampingan dengan etnis lain tidak mengurangi rasa persaudaraan. Kondisi masyarakat seperti ini tidak lepas dari peran seorang pemerintah desa yang membina desa ke arah yang lebih baik.

Adanya berbagai macam etnis yang tinggal di desa ini bukan merupakan hal yang mudah bagi pemerintah dalam mengatur dan menyusun berbagai kebijaksanaan pembangunan. Keberagaman etnis ini kadang dapat membawa berbagai masalah terutama dalam pembangunan. Benturan tersebut seperti perbedaan pendapat di antara individu yang dapat memunculkan *ceos* atau masalah, karena setiap masyarakat juga memiliki pandangan atau fikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan atau masalah dalam

⁴⁶ Sodaqoh Zainuddin dkk, *op.cit.*, hlm. 25.

masyarakat kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan menjadi penengah dalam permasalahan yang terjadi.

Akan tetapi permasalahan yang muncul masih bisa diatasi dengan baik. Hal tersebut dapat terwujud karena kesadaran akan persatuan sebagai satu bangsa Indonesia masih dirasakan sebagai kebutuhan untuk tidak terpecah-pecah dan menjadi bangsa yang tetap kuat. Meskipun masyarakat memiliki sikap sadar akan persatuan, namun potensi munculnya konflik dalam suatu wilayah juga tidak bisa diabaikan begitu saja.

Selama pemerintahan Akmad Budiyono desa tidak menunjukkan adanya kondisi politik yang mengarah terjadinya konflik. Permasalahan baik pemerintahan, pembangunan dan sosial dapat teratasi dengan damai. Meskipun ia menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat, namun tidak semua masyarakat mendukung kepemimpinannya. Begitu juga dengan Akhmad Budiyono di masa kepemimpinannya masyarakat merasa bahwa ia kurang cepat dalam menjemput bola, artinya sebagai kepala desa ia kurang kreatif dalam menciptakan ide-ide baru untuk kemajuan desa, program yang dilaksanakan hanya program dari pemerintah. Oleh karena itu, kemajuan desa masih kurang bila dibandingkan dengan desa lainnya. Pada dasarnya sebagai seorang pemimpin sikap seorang pemimpin banyak ditentukan oleh pengetahuan yang ia miliki. Kurangnya pengetahuan seorang pemimpin menimbulkan sikap kurang tanggap terhadap perkembangan, ini dapat menyebabkan ia didikte oleh bawahan. Keadaan yang demikian dapat menyebabkan tumbuhnya sikap didaktor seorang pemimpin. Sikap yang dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan, menurunkan nilai kepemimpinan seseorang.⁴⁷ Oleh karena itu, betapa pentingnya pemimpin desa aktif mengikuti perkembangan dalam berbagai sistem dan cara, sehingga tidak ketinggalan dalam pemiikiran dan menuju kepada kepemimpinan yang tungguh.

Akmad Budiyono ini merupakan keturunan etnis Madura dan ia sudah lama tinggal di desa ini, selama itu pula ia memiliki hubungan kekerabatan yang

⁴⁷ Made Wahyu Suthedja dan Igusti Ketut Swalem, *Management Pembangunan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 129-130.

baik di desa ini. Sebagian besar masyarakat masih memiliki hubungan saudara dengannya ditambah kerabat dari istrinya sehingga semakin banyak. Dari hubungan kekerabatan ini, wajar apabila ia memiliki pendukung yang banyak. Masyarakat siap menjadi pendukungnya kapan pun dan siap mendukung program-program desa yang ia buat.⁴⁸

Seiring berjalannya waktu hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik dalam masyarakat justru menimbulkan masalah, artinya kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Sikap iri kepada seseorang yang memiliki posisi spesial di masyarakat. Hal ini yang terjadi di Desa Kampunganyar, seperti yang disinggung di atas bahwa masyarakat senang dengan kepemimpinan Akmad Budiyo sehingga jumlah pendukungnya banyak. Hal tersebut bukan berarti semua masyarakat senang dan mendukung kepemimpinannya, namun juga ada masyarakat yang kurang senang dengan kinerjanya yang kurang bagus dalam membangun dan memajukan desa. Sikap dan sifat seperti ini wajar karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memang memiliki rasa iri dan merasa tersaingi oleh orang lain. Kondisi ini nantinya akan menjadi pembahasan penulis yang akan ditulis di bab berikutnya, terkait hubungan dengan proses persiapan pemilihan kepala desa pada September 2007.

⁴⁸ Hasil wawancara Sukemi dan Tofa masyarakat Desa Kampunganyar, pada 19 April 2015.

BAB 3

KONFLIK DAN DINAMIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KAMPUNGYAR

Bab 3 ini membahas tentang konflik dan dinamika politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Konflik diawali dengan kejadian pembakaran Kantor Kepala Desa yang terjadi pada 18 Agustus 2007. Kejadian pertama kali diketahui oleh tukang kebun kantor desa setempat yaitu pada pukul 03.30 WIB.¹ Menurut Murtoyo kejadian tersebut terjadi ketika desa masih dalam keadaan sepi dan ketika ia mau berangkat menuju masjid yang dekat dengan kantor desa. Pada saat itu ia langsung berteriak minta tolong serta membangunkan warga untuk ikut memadamkan api.² Akibat kejadian tersebut seluruh arsip, dokumen, dan perabotan yang berada di dalam kantor desa hangus terbakar. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian ditemukan sejumlah barang bukti, seperti: tutup botol dan tulisan yang berbunyi: “awas penipu swadaya masyarakat yang haram jadi harum”, sehingga polisi menyimpulkan bahwa kejadian ini diduga memang sengaja dilakukan oleh sejumlah oknum warga yang tidak puas dengan proses persiapan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada September. Ketidakpuasan warga tersebut karena adanya rasa persaingan antara calon, dimana salah satu dari keempat calon tersebut yaitu Akhmad Budiyono merupakan mantan Kepala Desa Kampunganyar yang awalnya tidak ingin mencalonkan namun justru mencalonkan kembali. Hal

¹ Lihat, <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/8/19/b8.html> diunduh pada 14 Juli 2014.

² Hasil wawancara dengan Murtoyo tukang kebun Kantor Desa Kampunganyar, pada 12 Agustus 2015.

ini yang menimbulkan rasa kecewa dan menganggap Akhmad Budiyo tidak konsisten dengan perkataannya sendiri.

Sepanjang sejarah pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Kampunganyar dan muncul permasalahan atau ketegangan menjelang pemilihan baru pertama ini. Lima kali pemilihan kepala desa yang sebelumnya tidak pernah terjadi ketegangan atau konflik yang mewarnai pemilihan kepala desa. Keempat calon yaitu: Mestari, Akhmad Budiyo, Imam Turmudi, dan Umar Said memiliki kekuatan atau kelompok pendukung masing-masing yang tersebar di lima dusun. Seperti salah satu calon yaitu Akhmad Budiyo ia merupakan kelompok santri memiliki pendukung yang kebanyakan berada di Dusun: Rejopuro, Kopencungking, dan Krajan. Selain itu ia juga memperoleh dukungan dari kalangan kiyai. Umar Said merupakan orang nasionalis dan terkenal sebagai orang abangan kelompok pendukungnya berada di Dusun Panggang.

Adanya kondisi menjelang pemilihan telah terjadi pembakaran kantor kepala desa, namun kejadian tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya kampanye sampai pada proses pemilihan. Proses pemilihan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kelompok pendukung dari masing-masing pendukung tidak saling bersitegang begitupun dengan pihak panitia yang bersikap netral terhadap keempat calon. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Akhmad Budiyo dan periode kerjanya mulai dari 2007 sampai 2013. Kondisi aman saat pemilihan berbanding terbalik dengan kondisi pasca pemilihan. Artinya pasca pemilihan muncul isu-isu yang mewarnai pemerintahannya, seperti muncul isu *money politic*, kinerjanya sebagai kepala desa kurang baik, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu isu tersebut membuat posisi dirinya sebagai kepala desa tidak nyaman dan sampai keluarnya surat pengunduran diri dirinya pada 2010. Selanjutnya penulis memaparkan secara kronologis proses terjadinya konflik dan dinamika politik dalam pemilihan Kepala Desa Kampunganyar, sebagai berikut:

3.1 Proses Awal Munculnya Konflik

Pemilihan Kepala Desa merupakan peristiwa politik lokal sebagai salah satu wujud dari demokrasi yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Kepala Desa merupakan jabatan yang cukup berharga di kalangan masyarakat desa. Di beberapa wilayah, pemilihan kepala desa sering menjadi arena persaingan antar elit desa secara kelompok atau individu. Elit desa tersebut saling bersaing dapat memengaruhi masyarakat dengan mengandalkan dua kekuatan yakni kekuatan materi dan non materi.

Kekuatan materi terdiri dari kepemilikan tanah dan uang, sedangkan kekuatan non materi terdiri dari: jaringan lokalitas, jaringan sosial-keagamaan, dan jaringan kekerabatan. Kemenangan yang terletak pada kekuatan jaringan kekerabatan (dengan jumlah dan pengaruh besar di masyarakat serta kemampuan mengorganisir jaringan tersebut), ternyata menjadi kekuatan yang cukup penting dan mengalahkan kekuatan materi. Kondisi yang cukup kontras melihat sistem demokrasi yang mengandalkan kemenangan berdasarkan akuntabilitas, kualitas dan kapabilitas para calon berhadapan dengan kekuatan jaringan kekerabatan untuk memenangkan pemilihan.

Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya.³ Pemilu desa tentu tidak ada partai yang mengusulkan bakal calon kepala desa. Hal ini membuktikan independensi dalam pemilihan kepala desa, karena kepala desa yang dipilih bebas menentukan arahnya pembangunan desa tidak terbatas dalam kontrak politik dengan partai pengusung tetapi langsung dengan masyarakat. Disisi lain tentang tidak adanya partai dalam pemilu desa membawa pada kepastian tentang tidak diakui pemilu kepala desa sebagai rezim pemilu. Menurut Jimly Assiddiqi keberadaan desa sebagai “*self governing community*” bersifat otonom atau mandiri. Selain itu, bahwa daya jangkau organisasi Negara secara

³ Rudini, H, *Atas Nama Demokrasi Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2000), hlm. 6-7.

struktural hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom. Semangat demikian telah dikukuhkan dalam perubahan UUD 1945 yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang hidup dalam masyarakat.⁴

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang multietnis dan multibudaya. Oleh karena itu dalam kondisi sosial masyarakat terkadang muncul masalah terutama dalam hal sosial politik. Adanya rasa fanatisme antar pendukung masing-masing kelompok, sehingga mudah menimbulkan konflik yang mengarah pada kekerasan. Seperti keadaan yang mencerminkan birokrasi di Indonesia. Peristiwa sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia, birokrasi Indonesia menjadi obyek kekerasan yang muncul di dalam masyarakat. Kantor kecamatan dan kantor-kantor pemerintah dibakar massa.⁵ Sungguh sangat memprihatinkan apabila melihat kondisi bangsa ini yang rentan akan budaya kekerasan. Masyarakat mudah percaya dengan isu-isu sepele yang sebenarnya belum terungkap kebenarannya. Adanya proses penumpukan perasaan di kalangan masyarakat Indonesia sehingga mudah untuk berkonflik. Masyarakat mudah percaya dengan isu-isu sepele yang sebenarnya belum terungkap kebenarannya. Adanya proses penumpukan perasaan di kalangan masyarakat Indonesia sehingga mudah untuk berkonflik.

Perkembangannya pemilihan kepala desa tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masing-masing pendukung calon maupun

⁴ Jimly Asshiddiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2006), hlm. 234.

⁵ Birokrasi di Indonesia bukan lagi hal netral dalam politik, tetapi telah memihak satu orsospol tertentu dan berfungsi sebagai *vote getter machine* (mesin pendulang suara) dari orsospol tertentu. Bagi birokrasi Indonesia, menjadi bagian dari suatu orsospol memiliki resiko. Selain menjadi obyek kekerasan juga menimbulkan *insecurity* dalam diri mereka. Seorang Camat, Bupati, Gubernur bahkan Lurah selalu merasa *insecure* karena takut kehilangan jabatannya apabila orsospol tertentu mengalami kekalahan. Rasa *insecure* terhadap jabatan ini dapat mendorong timbulnya tindakan *overacting* si pejabat yang dapat menimbulkan reaksi balik dari masyarakat berupa tindakan yang menentang wibawa pejabat tersebut. Rudini. H, *op.cit.*, hlm. 116-117.

campur tangan para LSM. Hal itu dapat menimbulkan konflik, baik konflik individu maupun konflik sosial yang pada dasarnya justru akan menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat memandang pemilihan kepala desa adalah hal yang sangat penting dan harus diperjuangkan untuk mencapai posisi yang diinginkan dan menaikkan prestise seseorang. Oleh karena itu konflik dan pertentangan di tengah-tengah etnisitas masyarakat yang homogen masih sering dijumpai.

Gambaran mengenai konflik pemilihan kepala desa menunjukkan bangsa Indonesia terutama masyarakat pedesaan memang masih berkeinginan untuk berkonflik. Keinginan tersebut ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan dimana merusak fasilitas umum. Pemicunya yaitu masyarakat mudah terpancing oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.

Salah satu kondisi politik di pedesaan yang dapat memicu terjadinya konflik yaitu terkait dengan pemilihan kepala desa. Desa merupakan unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting, baik di masa perjuangan maupun sesudah kemerdekaan terbukti dengan keberadaan seorang kepala desa. Perkembangannya di jaman reformasi kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan seseorang yang terpilih sebagai kepala desa berhak menduduki jabatannya selama enam tahun.

Ironisnya dalam pemilihan ini muncul kondisi politik yang menunjukkan rasa kompetisi atau persaingan di antara calon. Artinya pemilihan di tingkat lokal ini sering muncul isu-isu politik sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan berujung konflik. Hal ini yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dimana menjelang pemilihan kepala desa massal Kantor Kepala Desa Kampunganyar diduga dibakar oleh sejumlah oknum warga yang tidak puas dengan proses persiapan pemilihan kepala desa.

Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pada tahap persiapan dan pencalonan ini terdapat tiga calon yang lolos dan akan maju dalam pemilihan yaitu: Mestari, Umar Said, dan Imam Turmudi, namun pada detik-detik

terakhir menjelang penutupan Akmad Budiyono sebagai mantan Kepala Desa Kampunganyar ikut mendaftarkan diri. Oleh karena itu terdapat empat bakal calon yang maju dalam pemilihan.

Dari keempat calon tersebut masing-masing memiliki massa pendukung yang berbeda-beda. Keempat calon itu merupakan warga asli Desa Kampunganyar, sehingga pendukungnya adalah masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat yang tinggal di lima dusun yaitu: Dusun Rejopuro, Krajan, Kalibendo, Kopencungking, dan Panggang mempunyai pilihan berbeda-beda kepada calon mana yang akan mereka pilih. Masyarakat dihadapkan dengan empat calon yang akan maju dalam pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007. Calon nomor urut satu yaitu Imam Turmudi. Ia merupakan warga asli Desa Kampunganyar dan masih memiliki hubungan persaudaraan dengan calon nomor urut dua yaitu Akhmad Budiyono.⁶ Imam Turmudi memiliki pendukung yang berasal dari Dusun Panggang dan Kopencungking. Kedua dusun ini menjadi wilayah pendukungnya karena terdapat keluarga, selain itu juga terdapat dukungan dari kekerabatan yang berasal dari kelompok tani atau Gapoktan Desa Kampunganyar dimana ia menjadi salah satu anggotanya.⁷ Adanya hubungan kerja ini, maka memberi dampak positif bagi pencalonan dirinya. Oleh karena itu dukungan yang diperoleh dalam pemilihan ini lumayan banyak yaitu 765 suara. Model kampanye yang dilakukannya dengan cara sosialisasi dalam kegiatan pengajian yang dilakukan di rumah warga desa. Ia menjelaskan visi dan misi terkait membangun desa menjadi lebih baik lagi. Selain cara sosialisasi dengan ibu-ibu pengajian, ia juga membentuk tim sukses yang tugasnya mengatur jalannya kampanye mulai awal sampai akhir.

Calon nomor urut dua yaitu Akhmad Budiyono, ia merupakan mantan Kepala Desa Kampunganyar periode 1999-2007. Pencalonan dirinya ini merupakan untuk kedua kalinya. Ia salah satu calon yang memiliki pendukung paling banyak. Pendukungnya berasal dari Dusun Rejopuro, Kopencungking, dan Panggang. Ketiga dusun tersebut merupakan wilayah yang dominan sebagai

⁶ Hasil wawancara dengan Imam Turmudi, pada 12 Januari 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan Imam Turmudi dan Supiatun, pada 12 Januari 2015.

pendukung dirinya karena warga yang tinggal di tiga dusun tersebut kebanyakan adalah saudara dan kerabat dekat dari Akhmad Budiyo. Seperti Dusun Rejopuro dan Kopencungking banyak terdapat saudara dari Akhmad Budiyo dan saudara dari istrinya. Selain saudara juga terdapat hubungan kekerabatan dimana dari ketiga dusun tersebut merupakan kelompok pengajian atau istigosah yang merupakan kelompok kegiatan pengajian yang sama dengan Akhmad Budiyo. Oleh karena itu, dukungan banyak dari kalangan pengajian dan kiyai. Hal yang menarik dari bentuk dukungan yang diberikan kepada calon nomor urut dua ini, yaitu ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk mendatangi kegiatan pengajian atau kegiatan warga lainnya untuk menyampaikan visi dan misinya. Warga justru yang mendatangi rumahnya dan memberikan dukungan kepada Akhmad Budiyo secara langsung dengan berbincang-bincang, namun dalam suasana santai dan penuh keakraban. Masyarakat desa biasa menyebutnya dengan istilah *jagong*.

Sebelumnya, pada forum musyawarah bersama aparat desa yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Kampunganyar Akhmad Budiyo sempat mengatakan bahwa tidak akan mencalonkan diri kembali. Alasannya karena ia merasa sudah cukup mengabdikan sebagai kepala desa dan bertugas memimpin desa ini selama enam tahun. Realitanya, ia justru mendaftarkan diri kembali. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Warso yang saat itu ikut dalam musyawarah tersebut, bahwa:

“Tempo dulu itu Pak. Akhmad Budiyo memang berucap atau bilang kepada seluruh perangkat desa yang saat itu sedang mengadakan kegiatan musyawarah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Pernyataannya tersebut disaksikan oleh seluruh perangkat desa.”⁸

Pernyataan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar bahwa, Akhmad Budiyo sebagai salah satu calon tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Hal tersebut membuat ketiga calon yang sudah lolos kaget dan merasa kecewa dengan sikap tersebut. Kondisi ini mulai mengarah pada isu-isu politik yang mewarnai pemilihan kepala desa. Menurut Samsuri munculnya isu Akhmad Budiyo tidak konsisten dengan ucapannya sendiri, isu bahwa ia ingin

⁸ Hasil wawancara dengan Warso, pada 20 Desember 2014.

menguasai Desa Kampunganyar dengan menjabat sebagai kepala desa kembali dan isu ia tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjadi kepala desa dengan perkataannya tidak akan mencalonkan kembali namun kenyataannya ia mencalonkan kembali. Menurut Akhmad Budiyo menyebutkan sebenarnya ia memang tidak berkeinginan untuk mencalonkan sebagai kepala desa kembali, namun adanya dukungan dari kanan-kiri yaitu kerabat dan saudara yang cukup banyak akhirnya ia mendaftarkan diri.

Pencalonan Akhmad Budiyo yang secara mendadak tersebut memang menimbulkan pro dan kontra. Artinya, secara sistematis ia tidak melakukan pelanggaran karena ia mendaftar sebelum waktu penutupan pendaftaran. Oleh karena itu pihak panitia meloloskan dan mendaftar namanya sebagai calon kepala desa. Pihak yang tidak suka dengannya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama LSM pro reformasi yang merupakan masyarakat Desa Kampunganyar dan masih ada hingga sekarang.

Pencalonan Akhmad Budiyo untuk yang kedua kalinya tersebut memang mendapat dukungan cukup banyak dari masyarakat, antara lain: hubungan kekerabatan dan hubungan persaudaraan. Hal ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk dukungan secara moril kepada Akhmad Budiyo. Menurut Akhmad Budiyo dirinya tidak melakukan sosialisasi politik atau kampanye kepada masyarakat seperti datang dalam pengajian seperti yang diungkapkannya berikut ini:

“Pada saat itu Saya tidak menggunakan cara-cara berkampanye atau datang ke acara pengajian, arisan, dan lain sebagainya, karena memang sebelumnya Saya tidak berniat mencalonkan kembali. Masyarakat justru yang datang ke rumah Saya dan memberikan dukungannya kepada Saya untuk mencalonkan kembali”.⁹

Upaya masyarakat memberikan dukungan secara moril menunjukkan bahwa masyarakat masih menginginkan Akhmad Budiyo sebagai kepala desa untuk memimpin desanya kembali. Masyarakat menganggap ia pantas dan mampu untuk memimpin desa sehingga menjadikan desa ini lebih baik. Visi misi selama pemerintahannya yang pertama untuk dilanjutkan, karena selama enam tahun

⁹ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyo, pada 18 September 2015.

tersebut kinerjanya sebagai kepala desa cukup baik. Akhmad Budiyo mengungkap salah satu visi dan misinya mencalonkan kembali sebagai kepala desa, berikut ini:

“Visi dan misi Saya tidak jauh berbeda dengan visi dan misi yang saya canangkan dalam jabatan Saya periode pertama, yaitu ingin menjadikan Desa Kampunganyar menjadi desa yang lebih baik. Antara lain dalam bidang pembangunan, keamanan, kegiatan keagamaan. Hal tersebut Saya canangkan karena desa ini memang masih perlu pembenahan di bidang tersebut dan pada jabatan Saya periode pertama belum selesai. Oleh karena itu Saya melanjutkan visi dan misi tersebut dalam pencalonan yang kedua ini apabila Saya terpilih kembali”.¹⁰

Massa pendukung Akhmad Budiyo terdiri dari: hubungan persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Hubungan persaudaraan dari istrinya juga menambah massa pendukung baginya sehingga pendukungnya semakin bertambah. Kerabat di sini berarti teman yang sebenarnya tidak memiliki ikatan persaudaraan dengannya. Hubungan semacam itu sering dijumpai dalam masyarakat desa, biasanya dapat dilihat dari tingkat sosial. Masyarakat yang menjalin hubungan kekerabatan dengan cukup baik, maka tidak memandang ada hubungan saudara atau tidak.

Calon nomor urut tiga yaitu Mestari. Sebelumnya ia merupakan warga pendatang dari desa lain yaitu Rogojampi, kemudian pindah di Desa Kampunganyar dan kurang lebih masih enam tahun ia tinggal di desa ini. Ia tinggal di Dusun Panggang dan tidak banyak memiliki saudara atau hubungan kekerabatan di desa ini, sehingga pendukungnya relatif sedikit karena hanya berasal dari tetangga sekitar rumahnya. Selain itu ia juga tidak mengikuti kegiatan sosial seperti pengajian, gapoktan, dan lain sebagainya sehingga berpengaruh terhadap suara yang ia peroleh. Menurut Kateno bahwa masyarakat Desa Kampunganyar belum banyak yang mengenal Mestari, karena ia belum lama menjadi warga desa sini, sehingga kinerja atau latar belakang dirinya masyarakat desa belum banyak yang mengetahui.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyo, pada 18 Agustus 2015.

¹¹ Hasil wawancara dengan Kateno, 5 April 2015.

Calon nomor urut empat yaitu Umar Said. Ia dulunya juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kampunganyar periode 1999. Umar Said merupakan warga asli Desa Kampunganyar sejak lahir ia sudah tinggal di desa ini. Oleh karena itu, dalam pencalonan kali ini ia memperoleh dukungan warga dari Dusun Panggang dan Kalibendo. Dari dua dusun tersebut Umar Said memperoleh dukungan yang cukup banyak artinya, ia memiliki hubungan kekerabatan yang baik dari kedua dusun tersebut. Ia merupakan anggota dari partai Golkar maka dukungannya dominan dari anggota partai tersebut.¹² Anggota atau aktifis dari partai tersebut ada yang tinggal di dua dusun tersebut, sehingga menambah massa pendukung dan menjadi kekuatan untuk Umar Said dalam memperoleh dukungan untuk dirinya.

Dari wilayah-wilayah dukungan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan Desa Kampunganyar memiliki peta politik dalam menentukan dukungan untuk masing-masing calon yang akan maju dalam pemilihan kepala desa. Peta politik tersebut tersebar dalam lima dusun yang ada di Desa Kampunganyar dan setiap dusunnya telah memiliki pilihan terhadap calon yang akan dipilih. Masyarakat terbagi menjadi kelompok baik pengajian, anggota partai, sudara, dan kerabat. Dari kelompok itulah kekuatan dukungan nantinya akan muncul dan menunjukkan bahwa peta politik sangat berpengaruh dalam kegiatan politik. Apabila dilihat dari semangat yang dimiliki oleh keempat calon dalam Pemilihan menunjukkan mereka serius dalam mengikuti kegiatan ini. Mulai dari cara kampanye dengan sosialisasi dengan warga desa, melakukan *jagong* dengan mendatangkan kelompok pendukungnya di rumah kemudian memberikan konsumsi dan fasilitas lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mencalonkan sebagai kepala desa memang tidak murah. Mereka kadang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mensukseskan kegiatan ini dengan cara menggunakan uang tabungan pribadinya, bahkan juga ada yang rela menjual sawah untuk membiayai kegiatan ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh

¹² Hasil wawancara dengan Umar Said, pada 10 Maret 2015.

keempat calon ini, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan rata-rata keempat calon menghabiskan dana sekitar Rp. 60 juta sampai 90 juta rupiah .

Pada dasarnya hubungan kekerabatan yang berjalan dengan baik dilingkungan desa justru akan menambah saudara sehingga jaringan sosial semakin bertambah. Hal ini yang ditunjukkan oleh Akhmad Budiyono yang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup baik dengan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berharap ia mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Ia menanggapi dengan baik dukungan yang diberikan masyarakat kepadanya.

Dapat diketahui dukungan yang diperoleh oleh keempat calon memiliki jumlah yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan keempat calon memiliki daya tarik tersendiri dari masyarakat. Seperti halnya calon nomor urut dua Akhmad Budiyono yang memiliki massa pendukung lebih banyak dibandingkan dengan calon lainnya. Artinya sebagian besar masyarakat Desa Kampunganyar mendukung pencalonan kembali Akhmad Budiyono. Hal ini yang mengakibatkan rasa iri atau takut tersaingi oleh calon yang lain terutama calon nomor urut empat Umar Said dan kelompok LSM pro reformasi yang menganggap Akhmad Budiyono tidak konsisten dengan perkataannya. Hal ini yang kemudian membuat kondisi Desa Kampunganyar menjelang pemilihan mengalami ketegangan, yaitu Kantor Kepala Desa Kampunganyar yang diduga dibakar oleh oknum warga. Kondisi ini dipicu karena kekecewaan masyarakat terhadap persiapan pemilihan tersebut dan sikap Akhmad Budiyono yang tidak konsisten dengan ucapan sendiri. Kekecewaan tersebut kemudian ditunjukkan dengan sikap anarki yaitu dengan cara merusak fasilitas umum yaitu membakar Kantor Kepala Desa Kampunganyar.

Kejadian ini terjadi menjelang pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada September 2007, tepatnya pada pukul 03.30 dini hari dan desa masih dalam keadaan sepi.¹³ Murtoyo tukang kebun kantor desa melihat ada api sudah membakar kantor kepala desa dan ia langsung berteriak minta tolong dan

¹³ “Jelang Pilkades, Kantor Kades di Banyuwangi Dibakar”, dalam DetikNews.com diunduh pada 4 April 2014.

memberitahu bahwa terjadi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Masyarakat langsung beramai-ramai membantu memadamkan api, namun api yang sudah membesar sehingga tidak bisa menyelamatkan berkas-berkas yang ada di dalam kantor kepala desa tersebut. Kebakaran tersebut merusak kantor kepala desa dan hampir seluruh kantor hangus terbakar.¹⁴ Masyarakat Desa Kampunganyar awalnya berfikir kejadian ini disebabkan adanya konsleting listrik, namun juga ada masyarakat yang menduga bahwa kejadian ini sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau kantor memang sengaja dibakar. Oleh karena itu, masyarakat dibantu Aparat Kepolisian menyelidiki kejadian ini. Berikut adalah gambar Kantor Kepala Desa saat kejadian:

Gambar 3.1



Sumber: <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/8/19/b8.html>
Kantor Kepala Desa Kampunganyar Setelah Pembakaran.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pasca kejadian pembakaran Kantor Kepala Desa Kampunganyar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kebakaran saat itu cukup besar dan terlihat dipasang garis polisi. Akibat kejadian itu seluruh

¹⁴ Lihat, <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/8/19/b8.html> diunduh pada 4 April 2014.

perabotan yang ada di dalamnya baik meja, kursi, dan arsip ikut terbakar dan rusak sehingga tidak memungkinkan kantor untuk digunakan kembali.

Upaya penyelidikan terkait kejadian ini masyarakat dibantu Aparat Kepolisian mengerahkan Wakapolres Banyuwangi Kompol Danny Nasution yang turun langsung di lokasi kejadian. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi langsung memasang garis polisi di sekitar kantor yang terbakar dan langsung melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kejelasan dari kejadian ini, sehingga diperoleh bukti yang jelas.

Dari hasil olah TKP, polisi menemukan tutup botol bensin yang terdapat di dalam kantor. Tutup botol bensin tersebut langsung diamankan polisi untuk dijadikan barang bukti. Sehari sebelumnya, sempat muncul teror di kantor desa melalui tulisan. Isinya, menghujat diluluskannya satu calon kades yang diduga pernah melakukan korupsi.¹⁵ Tulisan tersebut berbunyi “awas penipu swadaya masyarakat yang haram jadi harum”. Adanya tulisan tersebut memperkuat bukti bahwa kantor desa sengaja dibakar terkait dengan ketidakpuasan proses persiapan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada bulan September.

Guna memperoleh data yang akurat Aparat Kepolisian meminta keterangan dari saksi yang terdiri dari: aparat pemerintahan Desa Kampunganyar, keempat calon kepala desa, dan Murtoyo saksi pertama yang melihat kejadian ini. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang jelas terkait kronologis kejadian yang sebenarnya. Kesaksian atau keterangan yang diperoleh akan menjadi senjata bagi kepolisian untuk mengusut kejadian ini, namun seiring berjalannya waktu kejadian ini tidak terungkap pelakunya dan polisi tidak mengusut sampai selesai. Kejadian ini begitu saja hilang dan tidak menjadi pembahasan penting di masyarakat.

Adanya kejadian ini memberikan dampak atau kerugian rusaknya Kantor Kepala Desa Kampunganyar, diantaranya: dokumen dan perabotan yang ada di dalam Kantor Kepala Desa hangus terbakar, piala yang dimiliki desa, lemari, meja kursi, arsip penting desa, dan dokumen untuk persiapan pemilihan kepala desa

¹⁵ Lihat, <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/8/19/b8.html> diunduh pada 4 April 2014.

yang akan berlangsung juga ikut terbakar.¹⁶ Padahal arsip yang berada di dalam kantor sangat penting. Dampak lainnya yaitu desa harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kantor desa kembali, supaya layak untuk digunakan kembali karena pada saat itu kondisi kantor tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.

Pasca kejadian ini seluruh aparat pemerintah desa beserta warga masyarakat Desa Kampunganyar melakukan kegiatan pengajian atau istighosah yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kampunganyar. Tujuan dilaksanakannya pengajian ini memohon doa kepada Allah S.W.T agar desa tetap dalam keadaan aman dan tidak terulang kejadian seperti ini kembali. Masyarakat juga berharap pelakunya akan sadar dan tidak mengulangi tindakan seperti ini lagi. Selain melaksanakan pengajian panitia berpesan kepada masyarakat untuk tetap fokus dan tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Panitia berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan kejadian ini, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar.

Adanya kejadian itu menunjukkan bahwa aroma persaingan dalam pemilihan kepala desa cukup jelas. Persaingan tersebut ditunjukkan dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang meneror dan membakar kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan perlawanan terhadap proses persiapan pemilihan yang dinilai kurang memuaskan. Kenyataannya dalam setiap kegiatan atau hubungan politik terutama dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya komunikasi politik.¹⁷ Adanya komunikasi politik maka terlihat jelas keinginan dari masing-masing pihak sehingga menekan timbulnya konflik atau kesalahpahaman. Konsistensi dalam setiap pengambilan keputusan juga sangat

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rayis Kaur Pemerintahan Desa Kampunganyar, pada 4 Februari 2015.

¹⁷ Perkembangan komunikasi politik di Tanah Air dikembangkan dalam rangka memantapkan pertumbuhan sistem Demokrasi Pancasila dengan meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya, dan bagi kekuatan sosial-politik untuk menampung dan menyalurkannya, sehingga berkembang komunikasi politik timbale-balik. Lihat, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 18.

penting, karena hal ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Pengambilan keputusan tersebut harus benar-benar dicermati dan dipikirkan dengan serius sehingga keputusan yang telah diambil tidak sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adanya kejadian tersebut menunjukkan politik yang ada di desa dapat memicu ketegangan meskipun hanya pemilihan kepala desa. Hal tersebut terbukti masih banyaknya warga yang melakukan aksi politik di luar batasan yang telah ditentukan. Seperti halnya kondisi politik yang terjadi di tingkat lokal. Kondisi politik yang terjadi di tingkat lokal dapat ditunjukkan dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa yang berlangsung setiap enam tahun sekali ini menjadi ajang untuk memperoleh kekuasaan di tingkat lokal. Interaksi sosial pada komunitas pedesaan acapkali masih dipengaruhi oleh masalah-masalah klasik seperti, perbedaan afiliasi politik dan keyakinan, kekerabatan, kedudukan, harga diri/ gensi, masalah tanah, dan lain-lain.¹⁸

Adanya kejadian pembakaran kantor desa tidak mengurangi antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa Kampunganyar. Meskipun kejadian ini terjadi menjelang pemilihan kepala desa, namun proses pemilihan kepala desa yang sudah dipersiapkan sebelumnya tetap akan berjalan dengan semestinya.¹⁹ Pelaksanaan pemilihan dilakukan di Kantor Kepala Desa dan semua panitia bersikap netral kepada setiap calon. Seperti yang diungkapkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa 2007, sebagai berikut:

“Saya sebagai ketua panitia melihat adanya kejadian pembakaran yang diduga karena ketidakpuasan masyarakat terhadap proses persiapan pemilihan tetap melaksanakan tugas saya dengan semestinya. Terkait ketidakpuasan itu dalam bentuk apa, karena semua proses pendaftaran berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi aturan. Panitia dalam hal ini sudah bersikap netral dan tidak memihak kepada kelompok manapun.”²⁰

¹⁸ Sajogyo dan Pudjiwati Sayogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 24.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Warso Sekertaris Desa Kampunganyar, pada 22 Oktober 2014.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sujali ketua panitia pilkades 2007, pada 23 Oktober 2014.

Panitia dalam kegiatan pemilihan ini sudah cukup netral dan tidak memihak kepada calon manapun. Ketua panitia sebagai penanggung jawab pertama menyatakan sikap netralnya dan menghimbau kepada anggota panitia lainnya agar bersikap sportif. Guna meminimalisasi timbulnya konflik atau kesalah pahaman, namun adanya kejadian pembakaran ini panitia tidak tahu pasti tujuan pembakaran. Panitia tidak mau terpengaruh dengan kondisi ini dan tetap menjalankan pemilihan yang telah ditetapkan. Sikap netral yang ditunjukkan oleh panitia pelaksanaan dipertegas oleh wakil ketua panitia mengungkapkan sebagai berikut:

“Panitia memang memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan pilkades itu, seperti bertanggung jawab terhadap kelancaran dan admisnistasi lainnya. Akan tetapi persoalan yang terjadi menjelang pilkades panitia tidak terlalu ikut campur karena panitia juga tidak mengetahui kejadian itu secara pasti. Adanya kondisi tersebut panitia tidak memihak kepada calon manapun dan pemilihan tetap berjalan dengan semestinya dan panitia bersikap netral.”²¹

Realitanya, seperti kondisi politik yang terjadi di Desa Kampunganyar dimana kondisi sosial politik desa menjelang pemilihan kepala desa 2007 mengalami ketegangan. Perasaan saling bersaing antara calon kepala desa sangat terlihat dalam dinamikan politik di desa itu. Bentuk persaingan tersebut antara lain: setiap calon melakukan aksi kampanye dengan cara berkeliling desa dengan meningkatkan untuk mencoblos nomor atau foto dari calon.²² Menurut Rayis kegiatan kampanye ini berjalan dengan lancar dan cukup ramai, artinya masyarakat antusias untuk melihat aksi kampanye yang dilakukan oleh keempat calon. Mereka bisa melakukan berbagai cara untuk mendapat simpati warga agar ia terpilih. Setiap calon yang maju dalam pemilihan kepala desa, mereka rela menggelontorkan uang pribadinya untuk melakukan aksi politik.

²¹ Hasil wawancara dengan Sumawi wakil ketua panitia pilkades 2007, pada 23 Oktober 2014.

²² Hasil wawancara dengan Mestari, pada 12 Maret 2015
Umar Said, pada 12 Maret 2015.
Imam Turmudi, pada 12 Maret 2015.
Akhmad Budiyo, pada 12 Maret 2015.

Pemilihan kepala desa 2007 ini merupakan salah satu pemilihan yang menjadi perhatian masyarakat desa, karena selama sejarah pemilihan kepala desa baru pertama ini terjadi kondisi sosial politik yang tidak seperti biasanya. Adanya Kejadian ini tidak mengurangi antusias masyarakat untuk tetap memilih calon yang akan dipilihnya. Peristiwa semacam ini seperti halnya konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik semacam ini muncul karena adanya kecemburuan politik terhadap kelompok lain. Konflik seperti ini disebut dengan konflik destruktif. Konflik destruktif muncul karena rasa benci satu kelompok terhadap kelompok lain.²³

Secara umum kejadian tersebut tidak berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena dalam tahapan ini masih dikategorikan pada pelanggaran yang bersifat administrasi dan tidak bersifat sistemis. Penanganan terkait hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik artinya pemeriksaan secara lebih akurat telah dilakukan oleh kepolisian dengan meminta keterangan seluruh perangkat desa, saksi, dan keempat calon.

3.2 Proses Pemilihan Kepala Desa

Adanya kejadian pembakaran kantor kepala desa bukan berarti menjadi penghalang untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Pemilihan secara massal itu tetap akan dilaksanakan. Panitia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan kondisi desa saat itu dan tetap memberikan hak pilihnya kepada calon yang mereka pilih. Meskipun dalam peta politik menunjukkan masyarakat Desa Kampunganyar terdiri dari kelompok pendukung dari calon bermacam-macam, namun tidak menjadikan peta politik sebagai alat untuk berkompetisi di saat pemilihan. Terbukti proses pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar dan antara kelompok pendukung calon satu dengan calon yang lain tetap menjaga hubungan baik.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa himbuan yang diberikan oleh

²³ Loekman Soetrisno, *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2003), hlm. 17.

²⁴ Hasil wawancara dengan Sujali dan Samawi, pada 20 Juli 2015.

panitia pelaksanaan pemilu mendapat respon baik untuk tetap berkompetisi secara sehat, artinya tidak terjadi ketegangan kembali.

Proses pemilihan kepala desa terdapat asas yang sama dengan asas pemilu. Asas tersebut berupa: langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil yang sering disingkat dengan Luber dan Jurdil. Adapun penjelasan tentang pengertian asas-asas tersebut sebagai berikut:²⁵

1. Langsung, artinya seluruh warga desa memilih secara langsung para calon kepala desa sesuai dengan keinginannya tidak boleh diwakili siapapun.
2. Umum, artinya dalam proses pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui oleh seluruh warga desa yang memiliki hak pilih yang syarat-syaratnya telah ditentukan oleh perundang-undangan dan tanpa ada diskriminasi.
3. Bebas, artinya para pemilih dalam proses pemilihan kepala desa secara bebas untuk memilih calon kepala desa dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
4. Rahasia, artinya menunjuk pada sifat tertutup yang dimiliki oleh para pemilih dalam hal menyumbangkan suaranya (mengenai siapa yang dipilihnya). Jadi hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri tanpa diketahui oleh orang lain.
5. Jujur, artinya dalam proses pemilihan kepala desa baik panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa, panitia pengawas, calon kepala desa, para pemilih, dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tersebut bertindak jujur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, artinya perlakuan yang sama terhadap peserta, tidak ada kistimewaan dan diskriminasi kepada peserta atau pemilih.

Pada dasarnya tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa sangat terdiri dari: panitia pemilihan, penjaringan, penyaringan, penetapan calon, kampanye, pemilihan, dan perhitungan suara. Kesemuanya itu harus dilaksanakan dengan baik dan profesional, artinya antara panitia dan calon harus bersikap adil dan jujur. Adapun tugas dan fungsi panitia adalah sebagai berikut:²⁶

A. Tugas Panitia

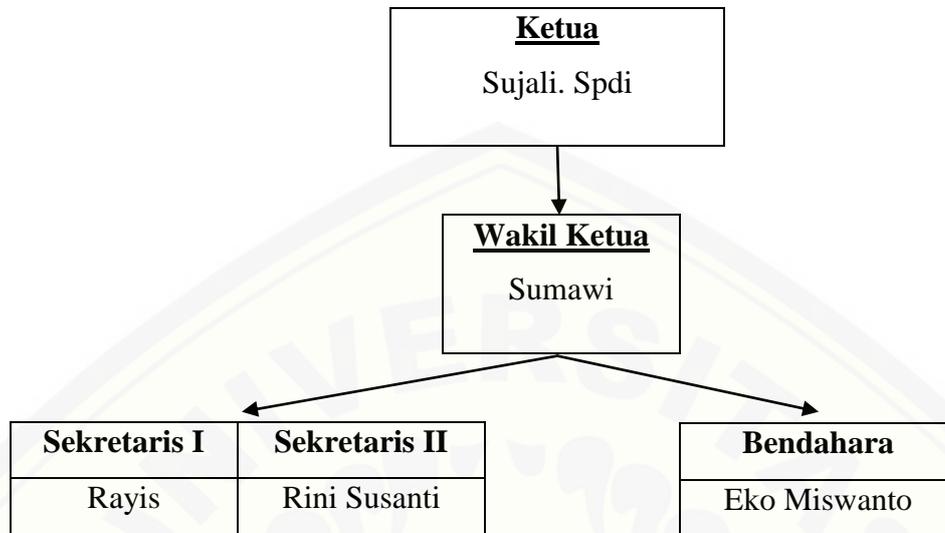
²⁵ Hasil wawancara dengan Sujali, pada 2 Agustus 2015.

²⁶ Arsip tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Tahun 2007.

1. Menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala desa
 2. Menyusun Program kerja, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa untuk diajukan kepada BPD;
 3. Mengumumkan secara luas jadwal kegiatan serta syarat pendaftaran bakal calon;
 4. Mengadakan pendaftaran pemilih;
 5. Mengumumkan secara luas daftar pemilih kepada masyarakat
 6. Menyiapkan surat suara;
 7. Menerima pendaftaran bakal calon;
 8. Melakukan pemeriksaan surat pencalonan dan persyaratan bakal calon;
 9. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 10. Menetapkan tata tertib kampanye
 11. Menetapkan pengenaan sanksi terhadap calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye
 12. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 13. Melaksanakan pemungutan suara
 14. Membuat laporan dan berita acara pemilihan dan penghitungan suara;
 15. Menetapkan pembatalan pemilihan dan sanksi berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
- B. Wewenang Panitia
1. menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 2. Melaporkan kepada BPD Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa
 3. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
 4. menjamin agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan tertib, lancar, aman, jujur dan adil
 5. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
 6. mengumumkan hasil penghitungan suara kepada masyarakat
 7. melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD

Berikut adalah susunan panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007:

Gambar 3.2
Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007



Sumber: wawancara Rayis sekretaris panitia pemilihan kepala desa 2007, pada 18 Agustus 2015.

Gambar di atas menunjukkan struktur panitia pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007 yang terdiri dari ketua, sekretaris I dan sekretaris II, dan bendahara. Pembentukan struktur panitia tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga alur dalam pemilihan ini jelas karena ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu pembentukan anggota panitia tersebut telah mendapat persetujuan dari kecamatan setempat.

Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar dilaksanakan pada 18 September 2007 dan bertempat di Kantor Kepala Desa Kampunganyar. Terdapat empat calon yaitu: Mestari, Akhmad Budiyono, Imam Turmudi, dan Umar Said. Keempat calon tersebut merupakan masyarakat asli desa ini dan mereka siap bersaing dalam pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan keempat calon juga melakukan sosialisasi politik atau kampanye.

Upaya yang dilakukan oleh keempat calon tersebut untuk mendapat dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya masing-masing calon memperkenalkan diri dan menjelaskan visi dan misinya kepada warga secara langsung. Mereka juga mendatangi forum-forum warga seperti:

arisan, pengajian, dan lain-lain untuk memperkenalkan program-programnya. Seperti kampanye yang dilakukan oleh calon yaitu, Umar Said dan Mestari. Mereka melakukan sosialisasi politik melalui pendekatan yang dilakukan kepada warga dengan cara hadir dalam acara pengajian yang dilaksanakan di tiap-tiap rumah warga. Ia menyampaikan visi dan misi yang ingin dicapai jika terpilih menjadi kepala desa dan warga merespon dengan baik.

Selama kampanye berlangsung tidak ada persoalan yang signifikan. Calkades (calon kepala desa) terkuat berkisar pada dua figur, yakni Umar Said dan Akhmad Budiyo. Kedua calon ini sama-sama memiliki pendukung yang cukup besar. Artinya keduanya yang sama memiliki hubungan kekerabatan seperti pengajian dan anggota partai dan hubungan persaudaraan yang cukup baik menjadi kekuatan bagi kedua calon ini untuk menang dalam pemilihan kepala desa. Adanya hubungan tersebut maka setiap calon juga memiliki massa pendukung yang berasal dari organisasi yang menaunginya tersebut. Massa pendukung dari kedua calon tersebut mencoba untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan dukungan secara moril. Hal tersebut dilakukan dengan harapan calon yang didukung menang dalam pemilihan ini. Meskipun kedua calon ini memiliki pendukung yang berasal dari kelompok pendukung yang berbeda, namun hubungan antara pendukung Umar Said dan pendukung Akhmad Budiyo menunjukkan sikap yang stabil.²⁷ Artinya selama kampanye para pendukung dari kedua calon ini tidak menunjukkan sikap yang memicu konflik atau ketegangan.

Setelah masa kampanye selesai dan masa satu hari tenang, maka tahap pemungutan suara dimulai. Model pemilihan adalah secara langsung dengan cara warga mencoblos nama calon. Pada tahapan ini memperlihatkan antusiasme warga cukup tinggi karena menyadari bahwa pemilihan tersebut penting untuk mereka. Paling tidak masyarakat menyaksikan semuanya diselenggarakan oleh warga desa sendiri.

Pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 WIB oleh Camat Glagah atas nama panitia Desa Kampunganyar. Para petugas yang melayani pendaftaran tersebar di lima loket yang empat loket ditempati oleh panitia yang bertugas di

²⁷ Hasil wawancara dengan Khoirudin dan Miseni pada 23 Agustus 2015.

bagian pendaftaran, pengambilan lembar suara setelah pemilih dicocokkan dengan biodata yang ada, dan pengumpulan kartu undangan yang telah diserahkan oleh pemilih kepada petugas pertama yang mendaftar, sedangkan satu loket sisanya ditempati panitia yang bertugas melayani pembetulan dalam kekeliruan yang terjadi pada lembar undangan, misalnya: kekeliruan nama, umur, atau lokasi RT.

Sementara menunggu masyarakat yang datang, panitia mengumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan alat pengeras bahwa proses pemungutan suara sudah bisa dilaksanakan atau telah dibuka dan menghimbau masyarakat untuk segera menggunakan hak pilihnya. Masyarakat Desa Kampunganyar secara bertahap mulai berdatangan menuju Kantor Kepala Desa untuk mulai melakukan pemilihan. Masyarakat yang sudah berusia minimal tujuh belas tahun memperoleh hak untuk memilih. Sebelumnya persiapan juga telah dilakukan oleh panitia antara lain: menyediakan bilik suara, kertas pemilihan yang terdiri dari empat calon, ruang pemungutan suara, alat pencoblosan, dan lain sebagainya.

Proses pemungutan suara dilakukan ketika pemilih datang ke lokasi yang disambut oleh petugas keamanan yang juga bertugas menunjukkan atau mengatur pengisian pada loket-loket yang tersedia. Para petugas keamanan di desa ini terdiri dari: Satpol PP, Kepolisian, dan TNI. Mereka sudah bersiap dengan rapi dan memakai seragam dinas untuk memberikan pengamanan selama pemilihan berlangsung. Pemilih sampai di loket kemudian menyerahkan kartu undangan pada petugas pertama. Petugas kedua mencocokkan identitas pemilih yang tertera pada kartu undangan dengan biodata yang telah ada. Petugas ketiga memanggil nama pemilih sambil memberikan lembar suara, sedangkan petugas ke empat mengumpulkan lembaran undangan dari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang telah mendapatkan lembar suara kemudian diantar oleh petugas keamanan agar tidak keliru memasuki bilik suara yang di dalamnya masih ada peserta pemilih yang lain.

Pada lembar suara terdapat empat kotak yang berisi nama calon kepala desa. calon dengan nomor urut pertama Imam Turmudi, kedua Mistari, ketiga

Akhmad Budiyo, dan keempat Umar Said.²⁸ Pada setiap nama calon tidak terdapat gambar atau simbol yang menunjukkan identitas mereka, namun hanya terdapat nama terang calon dan nomor urut saja. Panitia yang sudah menyiapkan tempat bilik suara dengan rapi dan tempat bilik suara di desa ini ditutup gordena warna hijau. Pada bilik suara telah disediakan alat yang terbuat dari paku besar, gunanya untuk melobangi salah satu nama calon yang menjadi pilihan si pemilih.

Pada proses pemungutan suara juga terdapat aturan-aturan di dalamnya, aturan tersebut terkait dengan surat suara. Misalnya apabila dalam mencoblos kartu suara itu ternyata tidak menggunakan alat yang telah disediakan maka kartu itu dinyatakan rusak, jika surat suara tidak dilobangi sama sekali dinyatakan tidak sah, dan apabila apabila terdapat lobang di luar nama calon juga dikatakan rusak.

Himbauan panitia kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan situasi tersebut ternyata ditanggapi oleh masyarakat dengan baik. Terbukti sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Berikut adalah jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa 2007:

Tabel 3.1
Jumlah Pemilu Kepala Desa Kampunganyar 2007

No.	Dusun	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	Krajan	362	389	751
2	Rejopuro	289	360	649
3	Panggang	282	293	575
4	Kopencungking	449	273	722
5	Kalibendo	161	163	324
	Jumlah	1.543	1.478	3.021

Sumber: Arsip Desa Kampunganyar tentang jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007, hlm. 7.

Tabel di atas menunjukkan masyarakat Desa Kampunganyar yang menggunakan hak pilihnya. Dari kelima dusun yang ada peserta yang paling banyak menggunakan hak pilihnya adalah masyarakat Dusun Kopencungking yaitu sebanyak 722 orang. Dapat diketahui bersama bahwa masyarakat yang

²⁸ Hasil wawancara dengan Rini Susanti dan Eko Miswanto panitia pemilihan kepala desa 2007, pada 10 Agustus 2015.

tinggal di dusun ini cukup banyak apabila dibandingkan dengan masyarakat yang ada di dusun yang lain. Masyarakat yang paling rendah menggunakan hak pilihnya adalah Dusun Kalibendo yaitu sebanyak 324 orang. Dusun ini jarang dihuni oleh masyarakat luar, artinya penduduk yang tinggal di dusun ini adalah mereka yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan menetap di wilayah perkebunan.

Setelah peserta pemilih menggunakan hak pilihnya kepada salah satu calon yang dikehendaki dengan cara mencoblos menggunakan alat yang disediakan, kartu suara dilipat kembali untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang diletakkan di luar bilik suara yang dijaga oleh petugas keamanan. Di atas mimbar yang agak lebih tinggi para pemilih dapat menyaksikan ke empat calon yang duduk di kursi dengan memakai peci hitam. Mereka tampak diam, tetapi sesekali bercakap-cakap lewat jarak yang hanya dipisahkan oleh sebuah meja di mana diletakkan makanan dan minuman untuk mereka. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya kemudian keluar lewat pintu yang telah disediakan.

Selama pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung secara tertib, artinya tidak ada persoalan yang signifikan. Pada pukul 11.00 WIB pemilih sudah mulai berkurang dan akhirnya pada pukul 12.00 WIB dilakukan peringatan melalui pengeras suara yang dipasang bahwa bagi warga desa yang merasa belum menggunakan hak pilihnya diharap segera datang ke lokasi pemilihan. Tepat pada pukul 13.00 pemilihan kepala desa dinyatakan telah ditutup, meskipun menurut peraturan yang resmi penutupan pelaksanaan pemilihan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.²⁹

Setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan tiba pada saat perhitungan suara, dalam hal ini seluruh anggota panita bersikap netral. Artinya, tidak memihak kepada calon manapun dan memberikan hasil yang sebenar-benarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Rayis sebagai sekretaris panitia sebagai berikut:

“Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh masyarakat Desa Kampunganyar selaku sekretaris panitia Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007, mewakili ketua panitia akan membacakan hasil perolehan suara. Panitia

²⁹ Hasil wawancara dengan Sujali, pada 6 Januari 2015.

dalam hal ini akan membacakan hasil suara secara jujur, jelas, dan terbuka di depan saksi, tidak unsur paksaan atau memihak kepada calon manapun.”³⁰

Proses perhitungan suara tidak jauh berbeda dengan proses pemungutan suara, kendati tegang justru menjadi tontonan masyarakat dari pendukung masing-masing kubu. Selain itu masyarakat yang lain juga ikut menyaksikan jalannya perhitungan suara. Meskipun kondisi tegang proses perhitungan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Perhitungan suara dilakukan di tempat yang sama yaitu Kantor Kepala Desa Kampunganyar pada pukul 13.30 WIB.

Penghitungan suara dilakukan di hadapan para saksi dari masing-masing calon yang sudah ditunjuk sendiri oleh ke empat calon tersebut. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 45 menit. Keseluruhan pemilihan yang dimulai pukul 8 pagi berakhir pada pukul 5 sore itu akhirnya berlangsung dengan relatif aman. Perhitungan suara menunjukkan hasil sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Perolehan Suara dari masing-masing calon Kepala Desa Kampunganyar 2007

No.	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Imam Turmudi	244
2	Akhmad Budiyo	1.029
3	Mestari	765
4	Umar Said	895

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Kampunganyar perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar 2007, hlm. 5.

Tabel di atas menunjukkan perolehan suara dari masing-masing calon yang telah dilakukan perhitungan oleh panitia secara langsung. Perolehan suara antara lain: Imam Turmudi 244 suara, Mistari 765 suara, Akhmad Budiyo 1.029 suara, dan Umar Said 895 suara. Jadi, calon kepala desa dengan nomor urut tiga yaitu Akhmad Budiyo yang merupakan mantan Kepala Desa Kampunganyar periode 1999-2007 terpilih kembali menjadi kepala desa untuk masa jabatan 2007-

³⁰ Hasil wawancara dengan Rayis sekretaris panitia pilkades 2007, pada 23 Oktober 2014.

2013. Suasana pengumuman kemengan itu disambut dengan sorak dan tepuk tangan warga Desa Kampunganyar.

Calon yang terpilih dan yang tidak terpilih bersama-sama dibimbing dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Kecamatan Glagah untuk menuruni tangga. Keempat calon satu sama lain tampak saling berangkulan diapit petugas keamanan. Penetapan sebagai kepala desa sesuai dengan keputusan Bupati Banyuwangi pada 23 September 2007,³¹ dimana menetapkan Akmad Budiyo sebagai Kepala Desa Kampunganyar periode 2007-2013 dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak sedikitnya perolehan suara yang diperoleh setiap calon menunjukkan bahwa kekuatan pendukung dari masing-masing calon jumlahnya berbeda-beda. Pendukung yang diperoleh calon berasal dari masyarakat Desa Kampunganyar, namun masyarakat juga memiliki pilihan yang tidak sama. Oleh karena itu, hubungan ketetanggan dan kekerabatan menjadi kekuatan di desa untuk mendukung calon-calon tersebut.

Keempat calon ini memiliki dukungan dari kelompok kekerabatan, ketetanggan, dan persaudaraan. Kelompok kekerabatan biasanya bertumpang-tindih dengan kelompok ketetanggan, sebab orang-orang sekerabat biasanya masih tinggal dalam dukuh yang sama, bahkan banyak dijumpai yang rumahnya saling bersebelahan. Hal ini disebabkan karena mereka sama-sama membangun rumah di atas tanah warisan dari leluhur mereka, namun mereka juga bertempat yang berbeda dukuh, yang biasanya terjadi karena adanya perkawinan antara dua orang yang berasal dari dukuh yang berlainan.³²

Hubungan kekerabatan ini dapat dilihat dalam kegiatan selamatan, gotong royong, dan kegiatan lainnya. Selain kelompok kekerabatan terdapat juga

³¹ Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/500/KEP/429.012/2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah.

³² Sartono Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 123.

kelompok sosio-keagamaan.³³ Masyarakat Desa Kampunganyar mayoritas beragama Islam. Pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama lazim disebut kalangan santri.³⁴ Kelompok santri memiliki ikatan keagamaan yang lebih kuat serta pandangan berfikir kelompok ini tertuju kepada seorang ulama. Hal ini sama halnya dengan salah satu calon yaitu Akhmad Budiyo yang dapat dikategorikan sebagai kelompok santri. Secara sosial ia sering melaksanakan kegiatan keagamaan baik yang ada di desa maupun kegiatan di luar desa. Ia memiliki nilai keagamaan yang cukup kuat dan sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan.³⁵ Hal ini seperti yang ia terapkan dalam pemerintahan periode pertama, di mana ia rutin melakukan pengajian setiap minggu, setiap bulan, dan acara besar keagamaan.

Sebagian besar masyarakat memberi respon baik dan mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini memberikan dampak positif bukan negatif bagi mereka. Hal ini yang menjadi nilai plus bagi dirinya untuk maju serta memenangkan pemilihan kembali karena dengan hubungan kekerabatan yang cukup baik dengan masyarakat, maka ia memperoleh dukungan yang banyak dan bisa menang dalam pemilihan.

³³ Kelompok sosio-keagamaan merupakan kelompok masyarakat desa yang terbentuk sesuai dengan agama yang mereka anut. Masyarakat pedesaan yang merupakan masyarakat yang multicultural sehingga terdapat kelompok santri, abangan. Kelompok santri atau pemeluk agama Islam cenderung taat menjalankan ajaran-ajaran agama dan orientasi vertikal tertuju kepada seorang ulama atau modin. Sedangkan kelompok abangan orientasi vertikal lebih ditujukan kepada orang yang bisa menjamin kepentingan ekonomi mereka. *Ibid.*, hlm. 124-125.

³⁴ Kalangan santri, peribadatan pokok adalah penting juga khususnya sembahyang yang pelaksanaannya secara sadardianggap baik oleh kalangan santri maupun non-santri sebagai tanda istimewa seorang yang benar-benar santri, tetapi hal itu tidak begitu banyak diperhatikan kalangan santri adalah doktrin agama, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Mereka nampaknya sangat tertarik, khususnya santri “modernis” kota. Jenis santri pun beragam dari yang perbedaannya dengan tetangga mereka yang abangan tampak hanya terletak pada bertahan diri bahwa mereka ini benar-benar muslim sejati. Sementara tetangga mereka tidak, sampai kepada yang menjanjinnya kepada muslim modernisasi hampir seluruh kehidupan mereka. Namun, untuk semuanya perhatian terhadap dogma sebegitu jauh telah menggantikan perhatian kepada upacara. Lihat, Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 173.

³⁵ Hasil wawancara Slamet masyarakat Desa Kampunganyar, pada 22 Juli 2015.

Perkembangannya masyarakat juga berhak menentukan calon mana yang ingin mereka pilih. Sebenarnya pendukung ke empat calon tersebut merata di setiap dusunnya. Dari kelima dusun yang ada di wilayah ini masing-masing dusun memiliki kontribusi untuk memberikan dukungan kepada calon yang mereka inginkan. Salah satu calon yang memiliki pendukung cukup banyak adalah Akmad Budiyo, dimana wilayah dukungannya dominan berada di Dusun Rejopuro, Kopencungking, dan Panggang.³⁶

Ketiga dusun ini merupakan wilayah yang banyak terdapat saudara dan kerabatnya. Masyarakat mendukung penuh agar ia mencalonkan diri dan berharap bisa menjabat kembali sebagai kepala desa, sehingga tidak heran massa pendukungnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan juga dapat mempengaruhi posisi kemenangan seseorang. Hal ini seperti ungkapan salah satu kerabat dari Akhmad Budiyo:

“Benar dik, Akhmad Budiyo memang memiliki hubungan persaudaraan yang cukup baik terutama di Dusun Rejopuro ini. Dusun ini banyak terdapat saudara terutama dari keluarga istrinya dan semuanya menjaga hubungan baik. Oleh karena itu tidak heran pada pencalonan dirinya kembali keluarga sangat mendukung sekali.”³⁷

Desa sebagai salah satu unit pemerintahan terkecil senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi. Dari kelompok-kelompok sosial inilah interaksi antar individu dapat diidentifikasi dan diukur tingkat intensitasnya.

Kemenangan Akmad Budiyo juga diiringi dengan isu-isu politik seperti isu *money politic*. Isu ini muncul setelah pemilihan selesai dilaksanakan. Pihak Akmad Budiyo diduga menggunakan *money politic* untuk mendapat dukungan dari masyarakat sehingga ia menang. Seiring Berjalannya waktu isu ini tidak ditanggapi serius oleh masyarakat dan pemerintah desa. Munculnya isu-isu semacam ini bisa muncul karena pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan

³⁶ Hasil wawancara Akmad Budiyo mantan Kepala Desa Kampungayar, pada 10 November 2014.

³⁷ Hasil wawancara dengan Suryono masyarakat Dusun Rejopuro, pada 10 Maret 2015.

kemenangannya sehingga membuat isu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Seperti yang diungkapkan oleh Umar Said merupakan salah satu calon, bahwa:

“Pak. Akmhah Budiyono menggunakan money politic untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Ia membagi-bagikan uang kepada masyarakat misalnya Dusun Krajan yang awalnya merupakan wilayah dukungan Saya.”³⁸

Terkait kemenangan Akhmad Budiyono, muncul isu-isu politik yang berkembang di masyarakat yaitu ia menggunakan *money politic* sebagai cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Kendati banyak masyarakat yang percaya akan hal tersebut namun tidak terbukti kebenarannya.

3.3 Kondisi Desa Kampunganyar Setelah Pemilihan Kepala Desa 2007

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 509/ KEP/ 429. 012/2007,³⁹ menetapkan Akhmad Budiyono sebagai Kepala Desa Kampunganyar periode 2007-2013. Selama masa jabatannya itu ia diberi tugas atau tanggung jawab untuk membangun desa ke arah yang lebih baik. Ia meneruskan visi dan misinya yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Misalnya untuk membangun sebuah taman kanak-kanak (TK) serta meningkatkan keamanan dengan membentuk sistem ronda yang lebih efisien kembali.

Kemenangan Akhmad Budiyono tersebut justru mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat. Seperti LSM pro reformasi yang ada di Desa Kampunganyar. Anggotanya terdiri dari pemuda desa dan bapak-bapak bahkan juga seperti tokoh masyarakat yang dianggap memiliki peran penting. Kelompok ini mencoba menyebarkan isu-isu yang mewarnai pemerintahannya, seperti adanya isu *money politic*.⁴⁰ Keterkaitan kelompok ini yang mulai awal pencalonan

³⁸ Hasil wawancara dengan Umar Said salah satu calon kepala desa, pada 12 April 2015.

³⁹ Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah.

⁴⁰ *Money Politic* secara umum diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Selain itu, *money politic* diartikan sebagai jual-beli suara pada sebuah proses politik kekuasaan. Menurut pakar hukum tata Negara Universitas Inonesia, Yusril Ihza Mahendara mendefinisikan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Ia mengatakan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan

ditunjukkan dengan membakar Kantor Kepala Desa Kampunganyar sampai kemenangan Akhmad Budiyono. Setelah kemenangan konflik ini tidak berakhir sampai disitu, artinya selama pemerintahan Akhmad Budiyono kelompok ini mencari-cari kesalahan dan ingin mengusut tuntas kejelekan yang pernah dilakukan pada jabatan sebelumnya. Tepanya pada tahun kedua pemerintahannya kinerja kepala desa terus menjadi perhatian dan mencoba untuk menjatuhkan harga diri kepala desa.

Awalnya Akhmad Budiyono diisukan menggunakan politik uang tersebut untuk memangkan pemilihan.⁴¹ Masyarakat diberikan imbalan uang yang nominalnya tidak jelas untuk mencoblos dirinya, namun isu ini hanya kabar burung saja dan tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Menurut penuturan Sarti bahwa:

“Jarene seng aku krungu Akhmad Budiyono iku ngekeki duit nang wong-wong supaya menang. Aku ogak ngerti duit iku piro seng dikekne tapi iku jarene wong-wong seng ngomong, soale aku dewe yo gak entok duet nduk. Kene wong cilik nduk ora ngerti masalah koyok iku, soale lak kakean omong wedi.”⁴²

“Saya dengar dari orang-orang katanya pak Akhmad Budiyono memberikan uang kepada masyarakat. Saya tidak tahu berapa uang yang diberikan dan itu hanya katanya orang-orang. Soalnya saya sendiri juga tidak mendapat uang tersebut. Sini hanya orang kecil atau miskin nak tidak mengerti masalah seperti itu, karena kalau kebanyakan bicara takut salah.”

Berkembangnya isu *money politic* yang dilakukan oleh Akhmad Budiyono memang telah menyebar ke masyarakat. Seperti isu bahwa ia memeberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih dirinya. Perkembangannya, namun ada masyarakat yang juga tidak merasa diberikan uang atau menikmati money politi tersebut.

Isu *money politic* sebenarnya hanya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang tidak senang terhadap Akhmad Budiyono. Hal ini

pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidanabiasa yaitu penyuaipan. Lihat, Indra Ismawan, *Money Politic* (Yogyakarta: Media Persindo, 1999), hlm. 4-5.

⁴¹ Penggunaan uang sebagai alat untuk meraih tujuan kekuasaan poitik sebenarnya bukan suatu yang baru. Ideologi yang membenarkan tindakan tersebut sudah ada sejak era Nicolo Machiavelli, ahli strategi politik asal Italia abad XV. *Ibid.*, hlm. 21.

⁴² Hasil wawancara dengan Sarti, pada 17 Maret 2015.

dilakukan agar masyarakat menganggap ia melakukan tindakan suap kepada masyarakat yang mendukung dirinya. Kenyataannya memang ia pada saat pemilihan kepala desa mendapatkan dukungan terbanyak sehingga dapat menjabat sebagai kepala desa kembali. Masa pendukungnya lebih banyak dari hubungan persaudaraan. Menurut Rayis massa pendukungnya sebagian besar dari hubungan persaudaraan yang ia miliki, bahwa:

“Pak. Akhmad memiliki pendukung yang cukup banyak dan itu hampir sebageian besar berasal dari keluarganya. Ia memang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup banyak ditambah lagi saudara dari istri yang tinggal di Dusun Rejopuro.”⁴³

Dari penjelasan di atas menunjukkan calon nomor urut dua yaitu Akhmad Budiyo memiliki pendukung yang banyak. Terbukti pendukungnya terdiri dari saudara, teman, dan kelompok pengajian. Di samping itu hubungan baik yang terjalin antara calon dan masyarakat tersebut cukup baik, sehingga banyak masyarakat yang senang dengan kinerja yang sebelumnya telah ia jalankan dan mengharapkan agar ia terpilih kembali.

Selain hubungan persaudaraan Akhmad Budiyo juga memiliki hubungan kekerabatan yang cukup baik. Hubungan kekerabatan tersebut terdiri dari: pertemanan dan rekan bisnis yang terjalin dengan harmonis. Adanya koneksi semacam ini maka memberikan kekuatan baginya untuk memenangkan pemilihan itu.⁴⁴ Menurut salah satu tim sukses Akhmad Budiyo yang bernama Suratno, mengungkapkan bahwa:

“Meskipun pembawaanya yang tidak banyak bicara, namun Pak.Akhmad memiliki hubungan yang cukup baik dengan masyarakat. Misalnya dengan teman kerja padahal tidak memiliki hubungan saudara. Akhmad Budiyo tipikal orang yang rendah hati sehingga teman-temannya senang dan mendukung pencalonannya kembali.”⁴⁵

⁴³ Hasil wawancara dengan Rayis, pada 20 Maret 2015.

⁴⁴ Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa kelompok kekerabatan atau kekeluargaan dalam kondisi normal, utuh, merupakan kekuatan yang luar biasa ampuhnya karena kelompok ini selalu berkembang dalam kuantitas. Apalagi jika dibarengi dengan berkembangnya secara kualitas maka dengan sendirinya jaringan sosialnya pun berkembang sangat luas. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 194.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Suratno, pada 19 Agustus 2015.

Dari hubungan persaudaran dan kekerabatan itulah menunjukkan bahwa ia memang memiliki kekuatan pendukung yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa isu terkait *money politic* tidak benar dan buka untuk alasan sebagai kemenangan dirinya. Kenyataannya isu tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ada barang bukti yang jelas.

Isu *money politic* tersebut tidak terbukti, namun masyarakat tetap menganggap isu tersebut benar. Sebagian masyarakat sudah mempercayai dan menilai Akhmad Budiyono telah melakukan kebohongan. Secara umum masyarakat hanya terprofokasi isu yang diciptakan oleh kelompok tertentu yang tidak suka dengan dirinya tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan memunculkan isu tersebut berharap masyarakat akan berfikir negatif terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Sikap seperti ini dapat muncul karena perilaku iri terhadap kekuasaan yang dimiliki orang lain, karena merasa orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

Periode kedua ini ia menjalankan tugasnya sebagai kepala desa sesuai dengan tupoksi sebagai kepala desa.⁴⁶ Artinya, ia bertanggung jawab terhadap desanya dan menjalankan tugasnya sebagai kepala desa sesuai dengan Undang-Undang. Seiring berjalannya waktu pemerintahannya di periode kedua ini desa mengalami kondisi yang kurang stabil, artinya desa mengalami *ceos*. Permasalahan inilah yang menjadikan posisinya sebagai kepala desa menjadi tidak nyaman. Ia selama menjabat dianggap kinerjanya tidak baik dan merugikan desa. Seperti: permasalahan tanah bengkok dan pronas.

Munculnya permasalahan ini masih ada hubungannya dengan LSM mencoba mengungkap masalah keuangan. Terkait permasalahan tanah bengkok sebenarnya hanya kesalah pahaman saja, sebagai kepala desa ia memang tidak mendapat upah yang besar namun ia mendapat upah dari tanah bengkok.⁴⁷ Tanah

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sukemi masyarakat Desa Kampunganyar, pada 7 Juli 2015.

⁴⁷ Praktek tanah bengkok adalah semacam pengganti sistem upah yang terdiri dari memberikan imbalan kepada pamong desa untuk tugas administrasinya selama mereka memegang jabatan itu dalam masyarakat desa atau bahkan setelah pension dengan menikmati sebidang tanah bengkok yang luas. Lihat, Hans Antlov dan Sven

bengkok yang diperuntukkan atau dialokasikan untuk kepala Desa Kampunganyar seluas 3 sampai 4 patok.⁴⁸ Selama ia menjabat, tanah tersebut menjadi hak dan tanggung jawabnya. Keberadaan tanah bengkok inilah yang diduga menjadi masalah, dimana terdapat kayu mahoni dan dianggap telah dikuasai oleh Akhmad Budiyo. Permasalahan ini terkait saat ia masih menjabat kepala desa memang melakukan penebangan terhadap kayu mahoni dan ia jual. Hasil dari penjualannya tersebut diduga ia gunakan secara pribadi.

Kelompok LSM ini menganggap Akhmad Budiyo telah menyelewengkan hasil penjualan kayu tersebut. Menurut Bejo dan Kamat yang merupakan anggota dari kelompok ini mengatakan Akhmad Budiyo telah melakukan penyelewengan uang tanah bengoko. Kelompok tersebut menganggap Akhmad Budiyo hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan perkembangan desa.⁴⁹ Mereka menginginkan hasil dari penjualan kayu tersebut seharusnya untuk pembangunan desa dan tidak untuk kepentingan pribadi.⁵⁰ Permasalahan ini harus ditindak lanjuti, guna keuangan desa sampai kepada hal yang benar.

Selain kelompok masyarakat yang kontra namun di sisi lain juga ada masyarakat yang pro terhadap Akhmad Budiyo. Secara umum terkait permasalahan isu tersebut masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan, namun munculnya pengaruh dari LSM dengan nama LSM pro reformasi tersebut mencari kesalahan Akhmad Budiyo. Oleh karena itu isu seputar penebangan kayu tersebut mudah sampai kepada masyarakat. Masyarakat umum yang awalnya tidak mempermasalahkan hal ini mulai terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Padahal isu yang berkembang di masyarakat belum terbukti kebenarannya. Adanya isu tersebut berdampak pada jabatannya sebagai kepala desa.

Cederroth, *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus Pemerintahan Otoriter* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 143.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyo, pada 18 Juli 2015.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bejo dan Kamat, pada 19 Juli 2015.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Gendon, pada 20 Juli 2015.

Keberadaan kayu tersebut sebenarnya memang diperuntukkan untuk kepala desa yang sedang menjabat maupun kepala desa selanjutnya.⁵¹ Setelah kayu ditebang ia menanam kembali bibit kayu mahoni dan diperuntukkan untuk kepala desa selanjutnya.⁵²

Persoalan lainnya yaitu terkait program pemerintah di bidang proyek operasi nasional pertanahan (prona) atau persertifikat tanah. Prona merupakan pendaftaran tanah atau sertifikat tanah yang dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah.⁵³ Pesertifikatan tanah melalui prona ini memberikan banyak keuntungan dibanding dengan persertifikatan yang dilakukan atas keinginan sendiri. Keuntungannya antara lain: adanya subsidi dari pemerintah berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang ingin melegalkan tanahnya dengan biaya yang murah. Seperti dalam bentuk betok dan akte atau sertifikat. Pemohon sertifikat mendapatkan keringanan biaya dan cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Proses penerbitan sertifikat melalui prona pada dasarnya sama dengan penerbitan sertifikat atas kehendak sendiri. Perbedaannya, jika permohonan sertifikat melalui Prona, pemohon datang ke kantor kepala desa yang mengkoordinir untuk menyerahkan data-data fisik tanahnya sehingga tidak harus datang ke kantor Pertanahan. Sedangkan permohonan sertifikat kehendak sendiri, selain harus datang langsung ke kantor pertanahan, pemohon juga harus membayar biaya yang lebih mahal.

Mengingat pelaksanaan program Prona merupakan kegiatan Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan Instansi lain: Pemerintah Kabupaten

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rayis Kaur Pemerintahan Desa Kampunganyar, pada 18 Agustus 2015.

⁵² Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyono mantan Kepala Desa Kampunganyar, pada 18 Agustus 2015.

⁵³ Kegiatan prona pertanahan mempunyai target group masyarakat yang kurang mampu atau golongan ekonomi lemah dan menengah serta masyarakat desa atau kelurahan yang masuk dalam program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Lihat, Nur Aini, *Kajian Yuridis pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Prona di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2013 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Skripsi Fakkultas Hukum Universitas Jember, 2014), hlm. 22.

Banyuwangi, Camat dan Kepala Desa Kampunganyar, serta pemohon atau masyarakat desa, maka kesuksesannya dibutuhkan suatu koordinasi dan kinerja yang baik. Selain itu percepatan pendaftaran hak milik tanah yang diselenggarakan tersebut hendaknya juga tetap memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah sengketa dan konflik pertanahan.⁵⁴

Program pemerintah ini yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat di pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dan tidak dipungut biaya atau gratis. Pada prakteknya kepala desa meminta biaya kepada masyarakat sebesar Rp. 300.000. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan transportasi, pembelian materai, dan administrasi lainnya. Penarikan biaya sebesar itu mendapat respon dari masyarakat, dimana ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju merasa bahwa biaya sebesar itu tidak sebanding apabila harus mengurus sendiri dimana akan mengeluarkan biaya dua kali lipat atau bahkan lebih mahal.

Masyarakat yang tidak setuju menganggap biaya tersebut sangat mahal dan membebani mereka terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi miskin. Isu lain yaitu muncul dugaan biaya yang diminta tersebut untuk memperoleh keuntungan dari program ini dan menganggap Akhmad Budiyo melakukan tindakan korupsi. Biaya itu ditujukan untuk kepentingan operasional desa, namun sebagian masyarakat tidak menyadari hal tersebut.⁵⁵ Apabila dibandingkan dengan wilayah atau desa lainnya yang mendapat bantuan Prona dari pemerintah ini, biaya sebesar itu termasuk murah. Wilayah lain masyarakatnya justru dikenakan biaya yang lebih mahal yaitu sebesar Rp. 850.000 sampai 2.000.000 kepada setiap kepala keluarga.

⁵⁴ Lilik Puja Rahayu, *Implementasi Kebijakan Persertifikatan Hak Milik Tanah Melalui Prona Dalam Rangka Reformasi Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bondowoso*, Tesis Fakultas Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Jember, (2008), hlm. 80.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Rayis Kaur Pemerintah Desa Kampunganyar, pada 18 September 2015.

Masyarakat dan LSM yang kontra terhadap Akhmad Budiyo sebagai kepala desa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan isu-isu yang dapat menjatuhkan posisinya sebagai kepala desa. Hal ini terlihat dari berkembangnya isu-isu seputar korupsi dana prona tersebut. Kelompok masyarakat tersebut mencoba mempengaruhi masyarakat dan ingin memperkarakan hal ini ke jalur hukum. Sebelumnya kelompok LSM pro reformasi dan masyarakat yang kontra tersebut melakukan aksi penolakan yang dilakukan di depan Kantor Desa Kampunganyar dan meminta penjelasan terkait dengan permasalahan ini. Kantor Kepala Desa Kampunganyar saat itu dalam kondisi ramai dan memanas. Tepatnya pada 2 November masyarakat dan LSM yang kontra melakukan demo di depan Kantor Kepala Desa Kampunganyar.⁵⁶ Demo ini meminta kejelasan terkait keuangan desa selama ini apakah sudah tepat atau tidak. Mereka meminta kejelasan dan meminta perkara ini diusut dengan tuntas dan meminta kepala desa memberikan keterangan yang akurat.

LSM dan masyarakat yang kontra meminta kepala desa untuk memberikan keterangannya di Kantor Kecamatan Glagah. Tuntutan ini direspon oleh Akhmad Budiyo, ia datang dan memberikan penjelasan kepada Camat, perwakilan LSM dan perwakilan masyarakat pro terhadapnya. Dari pertemuan ini diharapkan ia dapat memberikan jawaban atas isu-isu dan permasalahan desa terkait pembangunan dan keuangan desa.

Pertemuan ini berlangsung sangat lama, artinya permasalahan ini menyangkut orang banyak, LSM dan masyarakat yang kontra ingin mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya terkait hasil penjualan kayu mahoni dan biaya pendaftaran sertifikat tanah. Pada pertemuan ini Akhmad Budiyo menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia memberikan jawaban bahwa dana penjualan kayu mahoni tidak untuk pribadi, melainkan digunakan untuk dana kas desa yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan desa. Terkait biaya pendaftaran prona Rp.300.000 itu digunakan untuk biaya transportasi selama mengurus berkas-berkas seperti: foto kopi, stempel, biaya materai dan legalisir ke

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bejo anggota LSM Kampunganyar, pada 3 Desember 2015.

Kantor Kecamatan.⁵⁷ Akan tetapi setelah mendengar jawaban yang disampaikan oleh Akhmad Budiyono itu pihak LSM dan masyarakat yang kontra tidak melakukan aksi penolakan. Hal ini menjadikan posisinya sebagai kepala desa semakin tersudutkan.

Dari jawaban tersebut LSM dan masyarakat tidak percaya dengan jawaban atau keterangan yang diberikan oleh Akhmad Budiyono. Mereka menganggap ia tidak jujur dan hanya alibi untuk membersihkan namanya. Masyarakat juga menilai kinerjanya selama menjadi kepala desa tidak sukses dan hanya menimbulkan masalah bagi desa. Adanya penolakan tersebut maka LSM mengajukan persyaratan bagi Akhmad Budiyono, yaitu meminta agar ia mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak mundur tapi persoalan ini tetap diperkarakan. Hal ini juga dibenarkan oleh Umar Said yang merupakan lawan dan salah satu calon kepala desa 2007.

Melihat masyarakat yang tidak percaya dengan jawaban yang diberikannya, maka Akhmad Budiyono memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa. Menurut Akhmad Budiyono untuk apalagi ia menjabat kepala desa, namun masyarakat hanya melihat kesalahan dan tidak menghargai setiap pekerjaan yang ia lakukan.⁵⁸ Selain itu ditambah ancaman yang ia dapatkan melalui SMS agar ia mengundurkan diri menjadikan posisinya semakin tidak nyaman.

Pada akhirnya keputusan yang diambil oleh Akhmad Budiyono yaitu ia bersedia untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Kampunganyar dan dibuktikan dalam surat pernyataan hitam di atas putih pada 27 Desember 2010.⁵⁹ Keputusan yang diambil oleh Akhmad Budiyono dianggap sudah menjadi keputusan yang tepat dan melalui pertimbangan sebelumnya. Kondisi desa yang tidak kondusif ini ditambah isu-isu terkait kinerjanya sebagai kepala desa membuat ia memutuskan untuk tidak menjabat kembali. Kedudukannya sebagai

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyono, pada 18 Juli 2015.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyono, pada 18 Juli 2015.

⁵⁹ Lihat, Surat Pernyataan Pengunduran kepala desa yang ditandatangani Akhmad Budiyono pada 27 Desember 2010.

kepala desa sepertinya memang sudah tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Kenyataanya selama menjadi kepala desa ia berusaha melakukan yang terbaik untuk kemajuan desa, namun masih ada masyarakat yang tidak menghargai kerja kerasnya selama menjabat.⁶⁰

Melihat sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada Akhmad Budiyo dapat dikategorikan sebagai kekerasan tertutup. Artinya, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung. Hal ini terlihat dengan aksi teror kepada Akhmad Budiyo dimana teror dan ancaman.⁶¹ Keadaan tersebut sangat mengganggu posisinya sebagai kepala desa sehingga menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu ia sebagai kepala desa harus mempertaruhkan posisinya dan mundur dari jabatannya.

Setelah dilakukan kesepakatan dan pengunduran diri Akhmad Budiyo, maka permasalahan mulai awal pencalonan sampai kemenagannya telah selesai, meskipun dalam penyelesaiannya diwarnai dengan tindakan anarki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan di Indonesia masih menjadi ajang perebutan bagi beberapa kalangan terutama dalam permasalahan ini ialah elit desa yang lingkungannya tidak luas.

Ironisnya kekuasaan yang seharusnya menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat tetapi menjadi ajang untuk berkonflik. Kekuasaan tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam masyarakat pasti ada orang yang tidak setuju atau melakukan perlawanan, baik secara terbuka atau terselubung terhadap kekuasaan. Menurut Amitai Etzioni,⁶² kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Akhmad Budiyo, pada 18 Agustus 2015.

⁶¹ Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dengan mengancam ada sedikit orang yang bisa mengontrol orang lain. Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan dan merupakan unsure penting kekuatan (power), kemampuan untuk mewujudkan keinginan sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Lihat, Thoma Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁶² *Ibid.*, hlm.163.

Keterlibatan kelompok LSM pro reformasi ini dengan permasalahan kinerja Akhmad Budiyo memang nampak jelas. Kelompok ini yang merasa tidak terima terus melakukan aksi-aksi teror kepada Akhmad Budiyo dan mengancam agar ia turun dari jabatannya. Kelompok ini yang mulai awal pencalonan memang sudah tidak suka atas pencalonan, kemenangan Akhmad Budiyo menunjukkan sikap anarkinya sampai pada setelah pemilihan. Hal ini yang berdampak pada pengunduran diri kepala desa.

Keterlibatan LSM dalam permasalahan ini menunjukkan permasalahan desa ini memang sangat kompleks. Akan tetapi LSM ini melakukan tindakan yang kurang profesional, artinya mereka tidak mengumpulkan bukti-bukti secara benar atau melakukan cara musyawarah secara kekeluargaan. Melainkan dalam permasalahan ini resolusi konflik dilakukan dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak namun dengan keputusan pengunduran diri oleh kepala desa. Pengunduran diri yang dilakukan dengan keterpaksaan dan ancaman.